



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN  
2022

KABUPATEN SABU RAIJUA



# PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA INSPEKTORAT

Jalan El Tari  
Seba

## PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Seba, 28 Maret, 2023

Inspektur Kabupaten Sabu Raijua, *fm*

*fm*  
**Ferdy J. Malelak, SH**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19690614 199503 1 006



## EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2022

No	Perangkat Daerah	Nilai KK (20%)	Nilai PK (60%)	Realisasi APBD/APBN (20%)	Nilai Akhir (100%)	Kategori A/B/C/D/E	Interpretasi
1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	66,67	100	95,58	92,45	A	SANGAT BAIK
2	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJATERAAN RAKYAT	80,00	93,52	93,84	90,88	A	SANGAT BAIK
3	BAGIAN HUKUM	66,67	100	82,98	92,5	A	SANGAT BAIK
4	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	95,00	100	95,44	98,09	A	SANGAT BAIK
5	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	83,33	100	98,51	96,37	A	SANGAT BAIK
6	BAGIAN UMUM	66,67	97	93,52	90,48	A	SANGAT BAIK
7	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	50,00	100,00	96,22	89,24	A	SANGAT BAIK
8	BAGIAN ORGANISASI	83,33	88,00	91,20	87,71	A	SANGAT BAIK
9	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	66,67	93,40	88,22	87,02	A	SANGAT BAIK
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66,67	82,25	88,18	80,32	B	BAIK
11	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	58,33	80,11	90,81	80,32	B	BAIK
12	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	50,00	92,65	98,92	85,37	A	SANGAT BAIK
13	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	58,33	100,00	91,87	90,04	A	SANGAT BAIK
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	58,33	113,78	89,44	97,82	A	SANGAT BAIK
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	83,33	146,84	80,85	120,94	A	SANGAT BAIK
16	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	58,33	219,78	95,00	162,53	A	SANGAT BAIK
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50,00	83,00	89,84	77,77	B	BAIK
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	58,33	100	97,52	91,17	A	SANGAT BAIK
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	58	82,3	92,39	79,5	B	BAIK
20	DINAS PARIWISATA	70,00	108,00	88,94	96,59	A	SANGAT BAIK
21	DINAS PERHUBUNGAN	75,00	100,00	96,17	94,23	A	SANGAT BAIK
22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	66,67	100,0	94,63	92,26	A	SANGAT BAIK

No	Perangkat Daerah	Nilai KK (20%)	Nilai PK (60%)	Realisasi APBD/APBN (20%)	Nilai Akhir (100%)	Kategori A/B/C/D/E	Interpretasi
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	66,67	112,88	96,27	100,32	A	SANGAT BAIK
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	58,83	83,00	83,52	78,27	B	BAIK
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	85,05	102	89,84	96,26	A	SANGAT BAIK
29	SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	66,67	86	95,77	83,9	B	BAIK
30	INSPEKTORAT DAERAH	83,33	100	83,31	93,33	A	SANGAT BAIK
31	KECAMATAN SABU BARAT	50,00	100	92,25	88,45	A	SANGAT BAIK
32	KECAMATAN SABU TENGAH	58,33	100	91,,23	93,72	A	SANGAT BAIK
33	KECAMATAN SABU TIMUR	58,33	100	96,43	90,95	A	SANGAT BAIK
34	KECAMATAN SABU LIAE	50,00	100	85,54	87,11	A	SANGAT BAIK
35	KECAMATAN HAWU MEHARA	58,33	100	92,89	90,24	A	SANGAT BAIK
36	KECAMATAN RAIJUA	50,00	99,71	94,21	88,67	A	SANGAT BAIK
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	66,67	100	84,40	90,21	A	SANGAT BAIK
38	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	50,00	100,00	83,91	86,78	A	SANGAT BAIK
39	RSUD	66,67	90,00	92,18	85,77	A	SANGAT BAIK

**DENGAN MENGGUNAKAN SKALA ORDINAL**

$x \geq 84\%$  : Sangat Baik  
 $74\% \leq X < 84\%$  : Baik  
 $55\% < X < 74\%$  : Cukup Baik  
 $X \leq 55\%$  : Belum Baik

Seba, 20 Maret 2023

BUPATI SABU RAIJUA,



Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si



## BUPATI SABU RAIJUA

### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Peningkatan akuntabilitas menuntut kinerja pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), untuk itu pelaporan kinerja ini disusun berdasarkan Sasaran Strategis dan indikator kinerja daerah masing-masing sasaran yang terukur dengan membandingkan target dan capaian indikator kinerja daerah yang bersifat *outcomes*, yang menggambarkan capaian kinerja pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran startegis pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2022.

Diharapkan agar Laporan kinerja ini menjadi sarana evaluasi terhadap Kinerja Daerah agar menjadi lebih produktif, efektif dan efisien kedepannya, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja maupun dari aspek keuangan di tahun mendatang. Kami juga berharap laporan kinerja ini akan bermanfaat bagi publik sebagai informasi atau evaluasi, serta menjadi upaya berkesinambungan bagi Kabupaten Sabu Raijua dalam meningkatkan kinerja.

Secara umum kinerja daerah tahun 2022 telah memberikan hasil yang positif, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum berhasil atau masih perlu akselerasi dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mewujudkan pencapaian visi dan misi

Kabupaten Sabu Raijua. Atas segala kekurangan dalam pencapaian dan penyampaian laporan ini, kami mohon maaf, dan atas masukan dan saran perbaikan kinerja terhadap hasil evaluasi laporan ini, kami ucapkan limpah terima kasih.

Seba, 20 Maret 2023

BUPATI SABU RAIJUA,

The official seal of Kabupaten Sabu Raijua is circular, featuring a central emblem with a bird and a shield, surrounded by the text "BUPATI SABU RAIJUA" and two stars. A blue ink signature is written across the seal.

Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022. Laporan ini memuat pengukuran kinerja dalam memberikan pelayanan publik sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi *core bussiness* instansi pemerintah atas penggunaan anggaran untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Proses penilaian kinerja yang terukur dan bersifat *outcomes* menjadi bagian dari upaya untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, sehingga bisa terus meningkatkan kinerjanya dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua merupakan formulasi laporan kinerja semua perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, pengukuran pencapaian kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang di capai dalam kerangka evaluasi dan upaya perbaikan kinerja di tahun mendatang untuk pencapaian sasaran strategis sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sabu Raijua sebagai wujud praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayan publik.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Sabu Raijua tahun 2022 sebanyak 29 indikator. Pencapaian kinerja diatas 95 Persen atau berkategori **SANGAT TINGGI** sebanyak 19 Indikator; pencapaian kinerja 80,00 Persen s/d 94,99 Persen atau berkategori **TINGGI** sebanyak 5 Indikator; pencapaian kinerjanya 60,00 Persen s/d 79,99 Persen atau berkategori **SEDANG** sebanyak 3 Indikator; pencapaian kinerjan dibawah 5 Persen atau berkategori **SANGAT RENDAH** sebanyak 2 Indikator; sedangkan sasaran kinerja yang pencapaian kinerjanya 51,00 Persen s/d 59,99 persen atau berkategori **RENDAH** tidak ada.

Secara keseluruhan dari 4 tujuan dan 13 sasaran utama dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, ukuran kinerjanya dituangkan dalam 29 indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam Bab VIII Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil analisis kinerja, rata-rata Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 mencapai **106,57 persen** atau terkategori **SANGAT TINGGI**.

Capaian Rata-rata yang sangat tinggi ini tidak bermakna seluruh target telah tercapai di atas target yang ditetapkan, namun lebih dipengaruhi oleh beberapa target dari indikator kinerja utama yang capaiannya jauh melampaui target yang ditetapkan atau diatas 100 persen, mempengaruhi capaian target kinerja secara akumulatif. Tingkat Pencapaian Kinerja Tahun 2022 per masing-masing Misi terangkum sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian kinerja misi pertama yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan”** sebesar **96,45%**, atau terkategori **SANGAT TINGGI** dan dari target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2022 mencapai **82,02%**. Pencapaian ini diukur dari 11 indikator dengan 3 sasaran utama yaitu :
  - 1) Meningkatkan Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR; (7 Program)
  - 2) Meningkatkan Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT; (7 Program)
  - 3) Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU; (21 Program)Dilaksanakan melalui 35 Program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.110.189.398,- terealisasi sebesar Rp.101.161.263.190 atau mencapai 91,81 persen sampai dengan akhir tahun.
2. Rata-rata capaian kinerja misi kedua yaitu **“Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi, serta Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah, Dengan Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Utama”** sebesar **107,19%** atau terkategori **SANGAT TINGGI**, dan dari target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2022 mencapai **74,74%**. Pencapaian ini diukur dari 7 indikator dengan 3 sasaran utama yaitu :
  - 1) Menjamin Ketercukupan Pangan, Air & Energi Menuju SARAI CUKUP; (12 Program)
  - 2) Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL; (6 Program)
  - 3) Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU; (9 Program)Dilaksanakan melalui 27 Program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.36.310.482.326,- terealisasi sebesar Rp.32.672.024.094 atau mencapai 89,98 persen sampai dengan akhir tahun.
3. Rata-rata capaian kinerja misi ketiga yaitu **“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Profesional dan Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Efisien Dan Akuntabel”** sebesar **94,72 %** atau terkategori **SANGAT TINGGI**, dan dari target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2022 mencapai **92,60%**. Pencapaian ini diukur dari 6 indikator dengan 3 sasaran utama yaitu :
  - 1) Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR; (18 Program)
  - 2) Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN; (6 Program)
  - 3) Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH; (6 Program)Dilaksanakan melalui 30 Program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.139.491.523.540,- terealisasi sebesar Rp.123.224.165.925 atau mencapai 88,34 persen sampai dengan akhir tahun.
4. Rata-rata capaian kinerja misi keempat yaitu **“Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang Handal, Pemerataan Wilayah Serta Menjamin Pembangunan Berkelanjutan”** sebesar **127,94 %** atau terkategori **SANGAT TINGGI**, dan dari target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2022 mencapai **82,90%**. Pencapaian ini diukur dari 5 indikator dengan 4 sasaran utama yaitu :
  - 1) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas INFRASTRUKTUR; (10 Program)

- 2) Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR; (2 Program)
- 3) Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI; (4 Program)
- 4) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang BERKELANJUTAN (4 Program)

Dilaksanakan melalui 20 Program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.118.499.008.832,- terealisasi sebesar Rp.107.637.384.185 atau mencapai 90,83 persen sampai dengan akhir tahun.

Dalam Pencapaian Kinerja sebagaimana tersebut diatas, dari 29 indikator kinerja utama, terdapat dua Indikator yang terkategori Sangat Rendah, yakni terkait dengan sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR dengan indikator utama adalah Harapan Lama Sekolah dengan tingkat pencapaian 47, 62 persen atau terealisasi 6,29 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 13,21 tahun. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya anggapan masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan tentu saja Pemerintah Daerah terus berupaya dengan berbagai cara dalam upaya pencapaian target melalui kegiatan sosialisasi dalam berbagai kegiatan. Demikian halnya juga dengan Indikator yang terkategori sangat rendah terkait dengan sasaran " Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR" dengan indikator utama adalah Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK) dengan tingkat pencapaian 44,31 persen atau terealisasi sebesar 0,74 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,67 persen. Hal ini masih dipengaruhi oleh kondisi pasca pandemic covid-19, termasuk perubahan cuaca yang mempengaruhi kelancaran transportasi dan pasokan kebutuhan perekonomian di daerah.

Selanjutnya Akuntabilitas keuangan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah tahun 2022, dilaksanakan melalui 112 Program dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.404.490.413.688,- terealisasi sebesar Rp.364.694.837.394 atau mencapai **90,16 persen** atau Terkategori **TINGGI**. Secara keseluruhan, tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua merealisasikan pendapatan sebesar Rp566.681.051.422,44 atau **93,74 persen** dari target sebesar Rp.604.507.472.367,00, dengan Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.574.823.815.297,70 atau **89,59 persen** dari anggaran sebesar Rp.641.636.086.568,00.

Dalam kaitannya dengan upaya perbaikan akuntabilitas kinerja, tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dalam kerangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah dilakukan upaya-upaya perbaikan sebagai berikut :

1. Reviu terhadap dokumen perencanaan pada level Kabupaten (Dokumen RPJMD dan RKPD) dan Level PD (Dokumen RENSTRA-PD dan RENJA-PD), untuk memastikan ketepatan rumusan tujuan dan sasaran strategis di tingkat Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang berorientasi pada hasil/*outcome*, dan mampu menjawab isu strategis yang dihadapi. Yang ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2. Telah disempurnakan dan dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang lebih spesifik, relevan, terukur dan cukup disertai dengan target-target kinerja yang memadai sehingga indikator kinerja yang telah ditetapkan mampu menunjukkan ketepatan dan keandalan dari ketercapaian kinerja;
3. Telah melengkapi IKU dengan formulasi hitungan, dan sumber data, dan juga telah mereviu Kembali IKU sebagai indikator utama pada level Pemda dan Perangkat Daerah;

Selain tindaklanjut terhadap rekomendasi LHE AKIP sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah juga dalam upaya perbaikan Kinerja kedepan, melalui Bagian Organisasi telah melakukan perbaikan penyajian pelaporan kinerja ini sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran. Selain itu adanya pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam penilaian kinerja SKPD melalui kegiatan evaluasi kinerja (fisik dan keuangan) setiap triwulan melalui Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sabu Raijua Disamping itu, juga telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang terdapat keterkaitan indikator kinerja SKPD, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan untuk mencapai indikator kinerja daerah yang dikoordinir oleh BAPPEDA, guna menyajikan capaian kinerja sasaran strategis atau hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah ini diharapkan akan meningkatkan perbaikan kinerja dan pelayanan publik termasuk pelaporannya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akuntabel.

## DARTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 TUJUAN DAN SASARAN.....	2
1.4 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA.....	3
1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA.....	12
1.6 ISU STRATEGIS.....	19
1.7 SISTIMATIKA LAPORAN.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	21
2.2. INDIKATOR KINERJA.....	24
2.3. STRATEGI DAN PROGRAM SERTA ARAH KEBIJAKAN DAERAH.....	27
2.4. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2022.....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	38
1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini.....	40
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	42
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi serta membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	46
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif yang telah dilakukan.....	50
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	59
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	61
B. REALISASI ANGGARAN.....	197
BAB IV PENUTUP.....	213
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021 .....	4
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021...5	
Tabel 1.4 Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2021 .....	10
Tabel 2.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua .....	23
Tabel 2.2. Visi, Misi Tujuan Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 .....	24
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	36
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja .....	39
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	40
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	43
Tabel 3.4 Capaian Kinerja RPJMD dan Standard Nasional .....	47
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatkan Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR61	
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Sasaran Meningkatkan Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT ..	69
Tabel 3.7 Tenaga Pada Rumah Sakit Kelas D Pratama.....	75
Tabel 3.8 Standar Ketenagaan Puskesmas .....	76
Tabel 3.9 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU .....	83
Tabel 3.10 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP .....	97
Tabel 3.11 Rincian penayangan RUP pada aplikasi SIRUP Tahun 2022 .....	119
Tabel 3.12 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL .....	122
Tabel 3.13 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU .....	126
Tabel 3.14 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Integritas Aparatur Dalam Pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR.....	131
Tabel 3.15 Nama – Nama Penerima Bantuan Sosial Perguruan Tinggi .....	138
Tabel 3.16 Penerima Beasiswa.....	140
Tabel 3.17 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN .....	156
Tabel 3.18 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam	

Pelayanan Menuju SARAI RAMAH .....	164
Tabel 3.19 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR .....	171
Tabel 3.20 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR.....	180
Tabel 3.21 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI .....	182
Tabel 3.22 Daftar Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online.....	184
Tabel 3.23 Cakupan Akses Internet Pemerintah Tahun 2022 .....	185
Tabel 3.24 Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang BERKELANJUTAN .....	189
Tabel 3.25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	191
Tabel 3.26 Kondisi Kategori .....	192
Tabel 3.27 Cakupan Pengawasan AMDAL.....	193
Tabel 3.28 Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	195
Tabel 3.29 Realisasi Pendapatan Transfer .....	196
Tabel 3.30 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah .....	197
Tabel 3.31 Rasio Kemandirian Daerah .....	197
Tabel 3.32 Realisasi Belanja Operasi.....	198
Tabel 3.33 Realisasi Belanja Modal.....	199
Tabel 3.34 Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis melalui Program .....	201
Tabel 3.35 Pembiayaan.....	210

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pelatihan Kurikulum Merdeka.....	63
Gambar 3.2 Pelatihan Proktor dan Teknisi ANBK.....	63
Gambar 3.3 Kegiatan Sosialisai Pendidikan Anti Korupsi .....	63
Gambar 3.4 Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD .....	64
Gambar 3.5 Pembangunan Fisik .....	64
Gambar 3.6 Kegiatan Proses Kegiatan Belajar Mengajar .....	65
Gambar 3.7 Kegiatan Monitoring Kelayakan dan Perizinan PAUD.....	66
Gambar 3.8 Kegiatan hibah buku di perpustakaan kelurahan bolou .....	66
Gambar 3.9 Kegiatan Lomba Sepak Bola Pelajar.....	68
Gambar 3.10 Kegiatan Pramuka .....	68
Gambar 3.11 Pelayanan Dokter Spesialis Obgyn (Kandungan) .....	74
Gambar 3.12 Pelayanan Dokter Spesialis Bedah.....	74
Gambar 3.13 Pelayanan Dokter Spesialis Anak.....	74
Gambar 3.14 Pelayanan Dokter Spesialis Penyakit dalam .....	75
Gambar 3.15 Kegiatan Penyuluhan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan anak) .....	80
Gambar 3.16 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar .....	80
Gambar 3.17 Kegiatan Orientasi Tim Pendamping Keluarga .....	81
Gambar 3.18 Foto Penyaluran Bantuan Bagi Lansia dan Disabilitas Terlantar.....	85
Gambar 3.19 Foto Penyaluran BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM .....	86
Gambar 3.20 Foto penyerahan bantuan.....	86
Gambar 3.21 Foto kegiatan sosialisasi dan pelatihan PUG .....	87
Gambar 3.22 Foto Kegiatan Bimtek Bagi Aktivis PATBM .....	87
Gambar 3.23 Foto Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	88
Gambar 3.24 Foto Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus .....	88
Gambar 3.25 Foto Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak.....	89
Gambar 3.26 Foto Kegiatan Harmonisasi Ranperda KLA di Kanwil KEMENKUMHAM Propinsi.....	89
Gambar 3.27 Foto Kegiatan Public Hearing Ranperda KLA .....	90
Gambar 3.28 Foto Kegiatan Sosialisasi KLA/DLA.....	90
Gambar 3.29 Foto kegiatan Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO .....	90
Gambar 3.30 Foto Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan	

Anak.....	91
Gambar 3.31 Pelatihan Meubeler.....	91
Gambar 3.32 Pelatihan Kecantikan.....	92
Gambar 3.33 Kegiatan Padat Karya .....	93
Gambar 3.34 Sosialisasi Pencegahan Perselisihan .....	93
Gambar 3.35 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi .....	94
Gambar 3.36 Penyerahan Bansos .....	95
Gambar 3.37 Pameran UMKM.....	95
Gambar 3.38 Kegiatan Sosialisasi Program Transmigrasi.....	96
Gambar 3.39 Sosialisasi Program Transmigrasi.....	96
Gambar 3.40 Bantuan Kapal Ikan 2 GT Fiber Glass Tahun 2022 .....	104
Gambar 3.41 Bantuan Kapal 1 GT DAK Tahun 2022.....	104
Gambar 3.42 Bantuan Pukat Monofilamen Tahun 2022.....	105
Gambar 3.43 Bantuan Mesin Ketinting Tahun 2022 .....	106
Gambar 3.44 Bantuan Fish Finder Tahun 2022 .....	106
Gambar 3.45 Pengadaan Bibit Rumput Laut Tahun 2022 .....	108
Gambar 3.46 Pengadaan Budidaya Ikan Lele Tahun 2022 .....	108
Gambar 3.47 Pengadaan Para-para Penejemuran Rumput Laut Tahun 2022.....	109
Gambar 3.48 Pengadaan Tali 2 mm dan 6 mm Tahun 2022 .....	110
Gambar 3.49 Bantuan Pengadaan Bibit Ikan Lele Tahun 2022 .....	111
Gambar 3.50 Bantuan Pengadaan Budidaya Ikan Nila Tahun 2022 .....	111
Gambar 3.51 Penyerahan dan Pemeriksaan Dokumen.....	114
Gambar 3.52 Kegiatan Monitoring.....	115
Gambar 3.53 Rapat Koordinasi .....	115
Gambar 3.54 Monitoring Distribusi .....	116
Gambar 3.55 Monitoring Pengisian .....	116
Gambar 3.56 Monitoring Pelayanan .....	116
Gambar 3.57 Kegiatan Tim Pengendalian dan Pengawasan .....	117
Gambar 3.58 Rapat Pleno .....	117
Gambar 3.59 Kegiatan Literasi dan Edukasi.....	118
Gambar 3.60 Penyangangan SIRUP .....	120
Gambar 3.61 Kegiatan Pokja Pemilihan .....	121
Gambar 3.62 Kegiatan Monitoring Pembangunan.....	121
Gambar 3.63 Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran.....	121

Gambar 3.64 Lomba Tarian Seni Budaya dan Permainan Rakyat.....	125
Gambar 3.65 Kegiatan Pembayaran Insentif Dewan Mone Ama, Juru Pelihara Situs dan Ritual Adat .....	126
Gambar 3.66 Kegiatan Bimtek LKPM 2022 .....	128
Gambar 3.67 Kegiatan Tol Laut.....	129
Gambar 3.68 Kegiatan Pasar Murah 2022 .....	130
Gambar 3.69 Pembangunan Industri .....	130
Gambar 3.70 Penyusunan Dokumen .....	134
Gambar 3.71 Dokumen LKPJ .....	134
Gambar 3.72 Dokumen LPPD.....	135
Gambar 3.73 Perayaan Nata Korpri .....	135
Gambar 3.74 Penyerahan Bantuan Sapi Qurban .....	136
Gambar 3.75 Kegiatan Lembaga Dana Hibah.....	136
Gambar 3.76 MusaBakti Qur'an.....	136
Gambar 3.77 Kegiatan Pesparani.....	137
Gambar 3.78 Pembangunan Gedung Sinode .....	137
Gambar 3.79 Kegiatan GN-AKSA.....	137
Gambar 3.80 Verifikasi Bansos .....	138
Gambar 3.81 Kegiatan Dharma Wanita .....	139
Gambar 3.82 Sosialisasi E-Reporting.....	139
Gambar 3.83 Rumah Yohana Kele .....	140
Gambar 3.84 Rumah Ibadah .....	140
Gambar 3.85 Rumah Masyarakat .....	141
Gambar 3.86 Penghimpunan Aspirasi.....	142
Gambar 3.87 Kegiatan Uji Publik .....	142
Gambar 3.88 Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa .....	145
Gambar 3.89 Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kegiatan pemberdayaan Tk. Desa .....	146
Gambar 3.90 Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel. Mebba .....	147
Gambar 3.91 Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kegiatan pemberdayaan Tk. Desa .....	147
Gambar 3.92 Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan .....	147
Gambar 3.93 Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa/Kel .....	148
Gambar 3.94 Kegiatan latihan Paskibra Tk. Kecamatan Sabu Liae.....	148
Gambar 3.95 Rapat koordinasi pengawasan dan pembinaan tingkat pemerintah desa.....	149
Gambar 3.96 Rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Tk. Kecamatan .....	149

Gambar 3.97 Monitoring kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa .....	150
Gambar 3.98 Wawasan Kebangsaan.....	151
Gambar 3.99 Pemilih Pemula yang mendapatkan Pendidikan Politik.....	152
Gambar 3.100 Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan .....	152
Gambar 3.101 Etnis/Suku/Agama/Ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.....	153
Gambar 3.102 Konflik Sosial, Budaya, Ideology, Politik, Ekonomi yang ditangani .....	154
Gambar 3.103 Indeks Inovasi Daerah .....	158
Gambar 3.104 Pelaksanaan Penertiban Ternak .....	165
Gambar 3.105 Penertiban PKL yang berjualan di atas trotoar .....	165
Gambar 3.106 Operasi PEKAT .....	165
Gambar 3.107 Pengamanan dan Monitoring Trantibum .....	166
Gambar 3.108 Pengawasan terhadap penjualan BBM Bersubsidi .....	166
Gambar 3.109 Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran .....	169
Gambar 3.110 Pemasangan Rambu Rawan Bencana .....	169
Gambar 3.111 Verifikasi dan Validasi Terhadap Kerusakan Rumah Calon Penerima.....	170
Gambar 3.112 Tanggap Darurat Kebakaran dan Pencarian Nelayan Hilang Akibat Cuaca Buruk ..	170
Gambar 3.113 Pelayanan Air Bersih oleh Tangki BPBD dan Tangki Pihak Ketiga .....	171
Gambar 3.114 Pengadaan Tandon 3.300 L .....	171
Gambar 3.115 Rumah Penerima Bantuan .....	177
Gambar 3.116 Rumah Penerima Bantuan .....	178
Gambar 3.117 Sosialisasi .....	178
Gambar 3.118 Penerima Bantuan.....	178
Gambar 3.119 Penerima Bantuan.....	179
Gambar 3.120 Penerima Bantuan.....	179
Gambar 3.121 Penerima Bantuan.....	179
Gambar 3.122 Survei Jalan Lingkungan .....	180
Gambar 3.123 Pengadaan Rambu .....	181
Gambar 3.124 Website Kabupaten Sabu Raijua .....	184
Gambar 3.125 Kegiatan Basic Mikrotik Training (MTCNA).....	186
Gambar 3.126 Advanced Mikrotik Training - Routing (MTCRE) .....	186
Gambar 3.127 Penangan Gangguan Jaringan Intra .....	187
Gambar 3.128 Dokumen Sabu Raijua Dalam Angka.....	188
Gambar 3.129 Dokumen Kecamatan Dalam Angka .....	188

Gambar 3.130 Dokumen Produk Domestik Regional Bruto .....	188
Gambar 3.131 Dokumen Produk Domestik Regional Bruto .....	188

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja

LAKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yaitu **“Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”**, melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM dan pengentasan kemiskinan;
2. Menjamin ketercukupan pangan, air dan energi, serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah, dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama;
3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewudkan birokrasi yang bersih,efisien, efektif dan akuntabel;
4. Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan infrastuktur yang handal, pemerataan wilayah serta menjamin pembangunan berkelanjutan.

LKIP Kabupaten Sabu Raijua ini disajikan dengan menyandingkan target kinerja pemerintah daerah dan realisasinya, hasil-hasil implementasi program/kegiatan, capaian hasil yang telah dirasakan masyarakat atau pencapaian sasaran strtegis dan sasaran program, serta kerja sama lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan, guna menjawab target-target yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran

berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026.

## **1.2. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;
8. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022.

## **1.3. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan penyusunan laporan kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja Pemerintah Sabu Raijua yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Sabu Raijua untuk meningkatkan kinerja.

### 1.3.2 Sasaran

Sasaran laporan kinerja adalah:

1. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua yang akuntabel dan transparansi sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan;
2. Peningkatan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya;
3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

## 1.4. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA

### 1.4.1 Aspek Geografi

Kabupaten Sabu Raijua mencakup empat pulau yakni Sabu dan Raijua yang berpenghuni serta Wadu Mea dan Dana yang tidak berpenghuni dengan total luas 459,58 km<sup>2</sup>. Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 10°25'7,12" - 10°49'45,83" lintang selatan dan antara 121°16'10,78" - 122°0'30,26" bujur timur dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sawu
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Timur : Laut Sawu
- Sebelah Barat : Laut Sawu

Rata – rata ketinggian wilayah berada pada 0 – 100 meter diatas permukaan laut. Pada umumnya permukaan tanah berbukit – bukit dan rata – rata kemiringan 45° dengan perincian sebagai berikut :

- 0° – 10° : 15 %
- 10° – 50° : 55 %
- 50° – 100° : 30 %

Adapun jenis tanah yang dominan adalah Alluvial, Grumosol, Litosol dan Mediteran dengan tekstur tanah halus hingga kasar. Selain itu Kabupaten Sabu Raijua memiliki gunung – gunung kapur yang membentang sepanjang kawasan. Flora di Kabupaten Sabu Raijua sebagian besar terdiri dari padang rumput yang luas, pohon lontar, pohon pinus, gewang dan hutan mangrove. Sementara faunanya terdiri atas hewan-hewan menyusui besar seperti kerbau,sapi, kuda, hewan menyusui kecil seperti kambing, babi dan domba, serta unggas yang terdiri atas ayam dan bebek. Pada tahun 2021, rata-rata temperatur udara di Sabu Raijua mencapai 29,5 °C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan November (29,5°C) dan terendah pada bulan Juli (26,5 °C). Secara umum disetiap kecamatan mengalami musim kemarau yang

panjang dan curah hujan yang rendah. Wilayah administrasi Kabupaten Sabu Raijua terbagi atas 6 kecamatan yakni Kecamatan Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Timur, Sabu Liae dan Sabu Tengah. Kecamatan Sabu Barat memiliki wilayah terluas yakni 40.29% dari total luas wilayah dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua dengan Seba sebagai ibukota. Enam kecamatan tersebut selanjutnya terbagi lagi atas 58 desa, 5 kelurahan, 245 dusun, 486 Rukun Warga (RW) dan 965 Rukun Tetangga (RT). Secara terperinci Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun, RW/RT, serta luas wilayah di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 1.1** Wilayah Administrasi Kabupaten Sabu Raijua

Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah					Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
		Desa	Kel.	Dusun	RW	RT	
1) Raijua	Ledeunu	3	2	15	30	60	38,16
2) Sabu Barat	Seba	17	1	71	141	274	185,16
3) Hawu Mehara	Tana Jawa	10	-	46	91	186	62,81
4) Sabu Timur	Bolou	8	2	33	64	128	37,21
5) Sabu Liae	Eilogo	12	-	50	102	200	57,62
6) Sabu Tengah	Eimadeke	8	-	30	58	117	78,62
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>5</b>	<b>245</b>	<b>486</b>	<b>965</b>	<b>459,58</b>

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2022

#### 1.4.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2021 berjumlah 94.133 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2021 berada di Kecamatan Sabu Barat yakni sebanyak 35.076 jiwa, disusul Kecamatan Hawu Mehara sebanyak 19.781 jiwa, dan kecamatan lainnya berkisar antara 9.000 s/d 11.000 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sabu Barat	17.941	17.135	35.076
2.	Hawu Mehara	10.151	9.630	19.781
3.	Sabu Timur	4.767	4.606	9.373
4.	Sabu Liae	5.577	5.433	11.010
5.	Sabu Tengah	4.787	4.528	9.315
6.	Raijua	4.841	4.737	9.578
	<b>Jumlah</b>	<b>48.064</b>	<b>46.069</b>	<b>94.133</b>

Sumber : Dispendukcapil, 2023

**Tabel 1.3** Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tdk/Belum Sekolah	26.651
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	15.490
3.	Tamat SD/Sederajat	24.407
4.	SLTP/Sederajat	9.832
5.	SLTA/Sederajat	13.629
6.	D-I/II/III	1.434
7.	D-IV/Strata I	2.656
8.	Strata II	34
9.	Strata III	0
	<b>Jumlah</b>	<b>94.133</b>

Sumber : *Dispendukcapil, 2023*

#### 1.4.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual berdasarkan rata-rata geometrik sektor pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Sektor Kesehatan terkait Usia Harapan Hidup dan Sektor Ekonomi terkait Standar Hidup Layak (pendapatan perkapita).

Data menunjukkan Nilai IPM Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari tahun 2017 sebesar 55,22 tahun terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 57,03. Capaian ini telah sesuai dengan target IPM dalam RPJMD untuk tahun 2021. Namun demikian capaian angka ini jika disandingkan dengan capaian baik ditingkat Provinsi (65,28) maupun Nasional (72,29) masih tertinggal jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

**Diagram 1.1.** Perkembangan IPM Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 - 2021



Sumber : *Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2022*

#### 1.4.4 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua tergambar dalam Nilai PDRB dan angka kemiskinan sebagai berikut :

##### 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

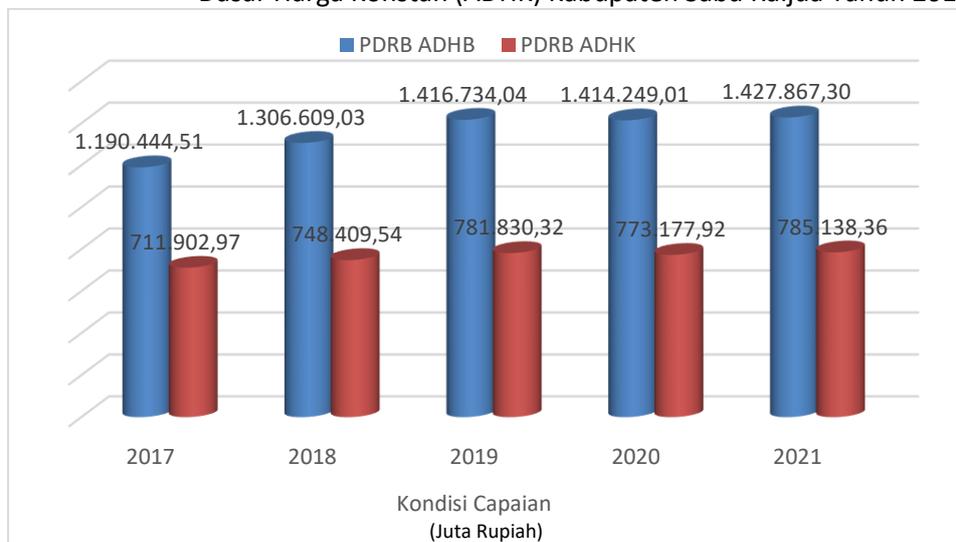
Aktivitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut. PDRB adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan salah satu ukuran kinerja pembangunan ekonomi pada tingkat regional.

PDRB di tingkat kabupaten/kota dihitung menggunakan pendekatan produksi yaitu menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas sektor ekonomi di wilayah tersebut dan pendekatan penggunaan yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan serta PDRB Perkapita dapat menggambarkan kegiatan perekonomian masyarakat suatu daerah yang juga menunjukkan tingkat kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Beberapa faktor lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat diantaranya adalah faktor laju pertumbuhan penduduk, struktur perekonomian daerah yang berkontribusi terhadap Nilai PDRB dan kegiatan perekonomian yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Gambaran kondisi atau perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua yang terangkum dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dilihat pada gambar PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sabu Raijua sebagai berikut:

**Diagram 1.2.** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2021

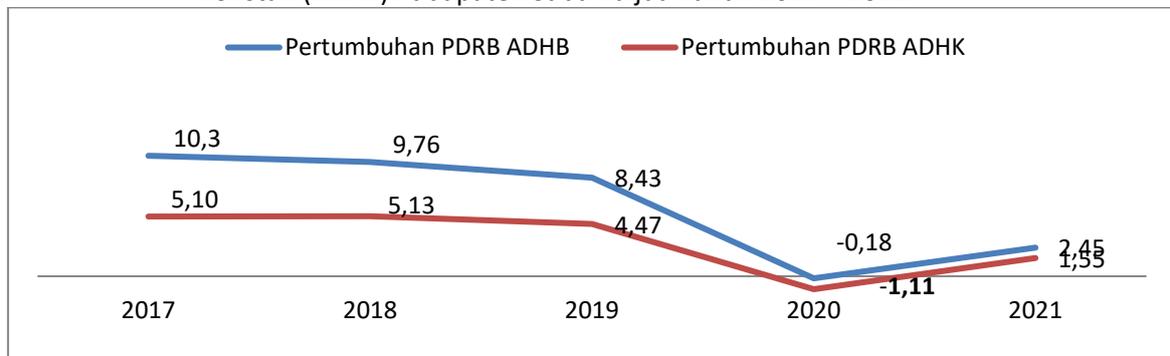


Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2022

Gambar diatas menunjukkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami perkembangan ditandai dengan meningkatnya angka PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika dilihat dari tahun 2017 Nilai PDRB ADHB terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2021. Selama tahun 2017 menuju 2019 nilai PDRB ADHB konsisten mengalami kenaikan sebesar 110 miliar kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2 miliar dan berhasil naik lagi sebesar 13 miliar di tahun 2021. Sama halnya juga dengan pertumbuhan PDRB ADHK yang mengalami fluktuasi pada 5 (lima) tahun terakhir tetapi masih terlihat konsisten berada di angka 700 miliar. Terjadinya penurunan pada tahun 2020 lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang juga berdampak pada pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua. Namun grafik diatas dinilai masih menunjukkan tren positif pada Nilai PDRB ADHK dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2017-2021). Peningkatan ini mengindikasikan adanya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada gambar grafik berikut :

**Diagram 1.3.** Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2021



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha, 2022

Gambar diatas menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDRB ADHB terus melambat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017, Nilai PDRB ADHB meningkat 10,30 persen dari tahun sebelumnya atau mencapai Rp 1,19 triliun. Berbeda dengan tahun 2018 dan 2019 dimana meskipun Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan yaitu masing – masing Rp 1,31 triliun dan Rp 1,41 triliun tetapi grafik tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan di tahun 2018 melambat menjadi sebesar 9,76 persen dan tahun 2019 sebesar 8,43 persen dan terus mengalami perlambatan hingga tahun 2020 mencapai -0,18 persen dan kembali mengalami peningkatan mencapai 2,45 persen di tahun 2021. Pertumbuhan PDRB ADHB yang mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2020 lebih disebabkan karena faktor pandemi Covid-19. Namun demikian Angka

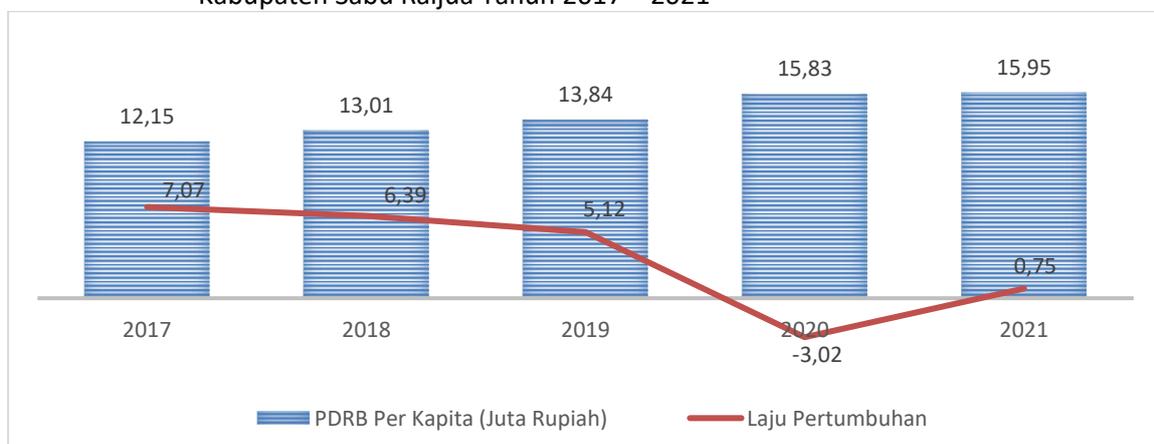
ini belum mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya karena masih mengandung faktor kenaikan harga (inflasi). Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang lebih mendekati keadaan riil atau telah menghilangkan pengaruh inflasi diperoleh dari pertumbuhan PDRB ADHK. Pertumbuhan PDRB ADHK pada grafik diatas terlihat lebih konsisten dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB ADHB walaupun juga ikut mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020.

Diagram 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Nilai PDRB ADHK sebesar Rp 712 miliar meningkat hingga Rp 748 miliar di tahun 2018. Peningkatan tersebut juga ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Nilai PDRB ADHK pada gambar 1.3 yaitu sebesar 5,10 persen di tahun 2017 dan mencapai 5,13 persen ditahun 2018. Pertumbuhan PDRB ADHK kemudian mulai melambat di tahun 2019 yaitu hanya sebesar 4,47 persen dan mengalami penurunan hingga (1,11) persen di tahun 2020. Penurunan ini juga lebih disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap menurunnya nilai produksi pada sektor-sektor ekonomi penunjang nilai PDRB di tingkat Kabupaten. Penurunan laju pertumbuhan ini sejalan dengan menurunnya Nilai PDRB ADHK di tahun tersebut. Nilai PDRB ADHK kembali meningkat di tahun 2021 mencapai Rp 785 miliar atau sebesar 1,55 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, data diatas masih mengindikasikan bahwa pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sabu Raijua cenderung berkembang secara konsisten selama 5 (lima) tahun terakhir, sedangkan pemicu melambatnya laju pertumbuhan ditahun kelima lebih disebabkan pada faktor bencana non alam (pandemi Covid-19).

Sejalan dengan Nilai PDRB ADHB dan ADHK, Nilai PDRB Perkapita juga terus mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB Perkapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :

**Diagram 1.4.** Laju Pertumbuhan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2021



Sumber : PDRB Kabupaten Sabu Raijua Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 dan 2022

Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah Nilai PDRB per kapita. Grafik pada gambar di atas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2021.

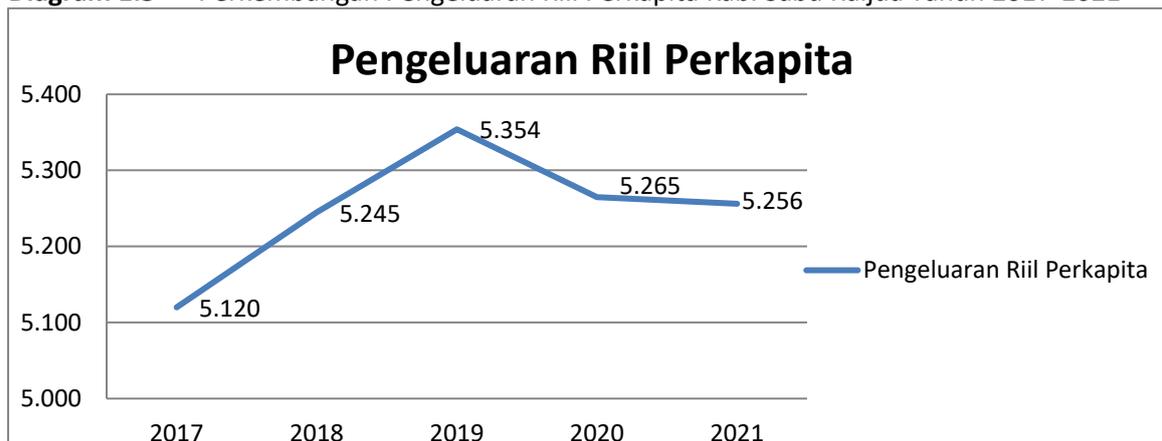
Dapat dilihat pada tahun 2017 pendapatan per kapita penduduk mencapai Rp 12,15 juta yang berarti rata – rata pendapatan setiap penduduk dalam 1 (satu) tahun berjalan sebesar Rp.12,15 juta kemudian meningkat menjadi Rp 13,81 juta di tahun 2018, Rp 13,84 juta di tahun 2019, Rp 15.83 di tahun 2020 hingga mencapai nilai tertinggi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp 15,95 juta. Meskipun jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan, grafik tersebut juga menggambarkan tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita penduduk yang melambat selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017, pendapatan per kapita penduduk bertumbuh sebesar 7,07 persen dibanding tahun sebelumnya. Meskipun jumlah pendapatan meningkat namun laju pertumbuhan mulai melambat di tahun 2018 sebesar 6,39 persen, dan di tahun 2019, laju pertumbuhan hanya mencapai 5,12 persen dan kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan ditahun 2020 yaitu hanya mencapai -3,02 persen. Penurunan tersebut juga disebabkan oleh adanya faktor pandemi Covid-19. Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 dalam berbagai aspek maka laju pertumbuhan mulai menunjukkan tren positif di tahun 2021 yaitu meningkat menjadi 0,75 persen.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa meskipun laju pertumbuhan menurun akibat dari adanya faktor pandemi Covid-19 yang berdampak pada rendahnya kontribusi sektor ekonomi terhadap nilai PDRB, tetapi jumlah pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan.

## **2) Pengeluaran Per Kapita**

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan belanja. Adapun jumlah pengeluaran per kapita di Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Diagram 1.5** Perkembangan Pengeluaran Riil Perkapita Kab. Sabu Raijua Tahun 2017-2021



Sumber : BPS NTT, 2022

Grafik diatas menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Sabu Raijua cenderung konsisten pada Rp 5 juta dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp 5,120 juta lalu terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai nilai tertinggi yaitu Rp 5,354 juta. Pengeluaran per kapita kemudian mengalami penurunan semenjak pandemi Covid-19 yaitu Rp 5,265 juta di taun 2020 dan Rp 5,256 juta di tahun 2021. Jumlah pengeluaran per kapita tersebut masih dibawah rata-rata pengeluaran per kapita di tingkat Provinsi NTT yang mencapai Rp 7,554 juta.

### 3) Angka Kemiskinan

Selain aktivitas perekonomian daerah yang dilihat dari Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan serta Nilai PDRB Per kapita masyarakat Sabu Raijua sebagaimana tergambar diatas, aktivitas perekonomian dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari angka kemiskinan. Secara ringkas, angka kemiskinan Kabupaten sabu Raijua dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4** Angka Kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	28.220	28.883	29.490	30.140	30.600
2.	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	31,07	30,83	30,52	30,18	30,13
3.	Indeks Kedalaman Kemiskinan	7,24	6,60	6,20	5,88	8,12
4.	Indeks Keparahan Kemiskinan	2,21	1,85	1,78	1,57	2,94
5.	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	354.983	368.187	374.256	403.846	438.492

Sumber : Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka, 2022

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai

kemampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran atau yang disebut garis kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, menggunakan data hasil SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Data diatas menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dibawah garis kemiskinan, yakni dari tahun 2017 sebesar Rp 354,983 meningkat menjadi Rp 438,492 di tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami peningkatan di tahun 2021 mencapai 8,12. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun 2021 perbandingan rata-rata pengeluaran penduduk terhadap garis kemiskinan semakin dalam. Hal tersebut ditunjukkan dengan ukuran rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin yang awalnya mendekati garis kemiskinan dimana nilai indeks pada tahun 2017 sebesar 7,24 kemudian menurun atau mendekati garis kemiskinan ditahun 2018 menjadi 6,60 dan di tahun 2019 menjadi 6,20 poin lalu semakin mendekati garis kemiskinan di tahun 2020 dengan nilai indeks 5,88 poin namun mengalami kenaikan signifikan di 2021 mencapai 8,12 poin yang kemudian dapat dikatakan menjauhi garis kemiskinan.

Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin atau seberapa jauh jarak pengeluaran orang miskin dalam suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeksnya, semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin.

Data diatas juga menjelaskan di tahun 2021 kesenjangan atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin lebar. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ketimpangan atau jarak pengeluaran antar penduduk miskin mencapai 2,21 poin dan kemudian ketimpangan semakin berkurang pada tahun 2018 menjadi 1,85 poin lalu pada tahun 2019 menjadi 1,78 poin dan semakin berkurang di tahun 2020 dengan nilai indeks keparahan kemiskinan mencapai 1,57 poin namun di tahun berikut mengalami kenaikan mencapai 2,94 poin.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2017 s/d 2020 terdapat peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang cenderung stabil meskipun di tahun 2021 sedikit mengalami penurunan. Demikian pula indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2017 s/d 2020, namun nilai indeksnya kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 atau semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan semakin tinggi ketimpangan atau jarak pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambaran ini sejalan dengan jumlah penduduk miskin yang terus mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2017 sebanyak 28.220 jiwa meningkat menjadi 30.600 jiwa di tahun 2021. Walaupun jumlah penduduk miskin terus meningkat namun persentase jumlah penduduk miskin terus menurun. Data diatas menunjukkan bahwa tahun 2017 persentase penduduk miskin sebesar 31,07 persen lalu menurun menjadi 30,13 persen di tahun 2021. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,94 persen sedangkan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 2.380 jiwa. Penurunan persentase penduduk miskin ini dapat dikatakan belum signifikan jika disandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2021 baik ditingkat Nasional (9,71 persen) maupun di Tingkat Provinsi NTT (20,44 persen). Peningkatan jumlah penduduk miskin cenderung akan terjadi setiap tahunnya, mengingat standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, menyebabkan pengeluaran rata-rata perkapita sebagian masyarakat yang sebelumnya berada sedikit diatas garis kemiskinan atau dikatakan sebagai rentan miskin pada tahun sebelumnya menjadi berada di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan pada tahun pelaksanaan survei.

#### **1.5 TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perubahannya tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dilengkapi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD).

Dengan harapan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dapat lebih berperan dan mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasi prinsip-prinsip dan semangat kerja yang bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk melaksanakan urusan Daerah di maksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sabu Raijua secara profesional, transparansi, partisipasi dan akuntabel.

Adapun tugas dan fungsi PD Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, sebagai berikut:

1. **Sekretariat Daerah** mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi, dengan fungsi sebagai berikut:
  - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah.
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur pada perangkat daerah.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat DPRD** mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesekretariatan, fasilitasi dan dukungan administrasi bagi DPRD, Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan DPRD.
  - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan.
  - c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
  - d. Penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, dalam pelaksanaan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. **Inspektorat** mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat, dengan fungsi:
- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
  - b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
  - c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
  - d. Penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
  - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. **Kepala Dinas** mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang pelayanan publik secara menyeluruh untuk kesejahteraan masyarakat baik itu urusan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian serta Ketentraman Ketertiban masyarakat umum dengan fungsinya sebagai berikut :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketentraman dan keteriban umum;
  - b. perencanaan meliputi perumusan rencana dan program di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketentraman dan keteriban umum;

- c. pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan tata usaha pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, pengelolaan dan pembinaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketentraman dan keteriban umum;
  - d. pengaturan dan pengawasan pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketentraman dan keteriban umum;
  - e. penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketentraman dan keteriban umum;
  - f. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan pendidikan, kesehatan, perekonomian, ketentraman dan keteriban umum;
  - g. pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. **Kepala Badan** mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menentukan kebijaksanaan melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian dengan fungsinya sebagai berikut :
- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang penyelenggaraan bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
  - b. perumusan kebijakan umum di bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian serta koordinasi penjabaran visi dan misi kepala daerah menjadi program dan kegiatan;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
  - d. pengaturan dan pengawasan penyusunan dokumen bidang Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
  - e. penyelenggaraan koordinasi perencanaan diantara Perangkat Daerah melalui Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian dilanjutkan ke provinsi dan pusat;
  - f. pengelolaan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah disesuaikan dengan Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian;
  - g. pengkoordinasian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang telah dihasilkan sebagai input untuk penyusunan perencanaan pembangunan lebih lanjut yang ditindaklanjuti dengan laporannya;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
6. **Sekretariat Dinas** mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan dengan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinastermasuk penataan arsip.
7. **Sekretariat Badan** mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan dengan fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha dinastermasuk penataan arsip.
8. **Kecamatan** di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas;
  - b. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
  - c. Pengelolaan urusan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, Perlengkapan dan rumah tangga;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
9. **Kelurahan** merupakan unsur staf yang berada dibawah kecamatan mempunyai tugas pokok melakukan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya dengan fungsi:
- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. Peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
  - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;

- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi yang dilimpahkan kepada pemerintah kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua, terdiri dari :

- a) Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 8 Bagian :
  - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
  - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
  - 3. Asisten Adminitrasi Umum
  - 4. Bagian Pemerintahan
  - 5. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - 6. Bagian Hukum
  - 7. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
  - 8. Bagian Administrasi Pembangunan
  - 9. Bagian Umum
  - 10. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
  - 11. Bagian Organisasi
- b) Sekretariat DPRD
- c) Inspektorat Daerah
- d) Dinas, terdiri dari :
  - 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
  - 2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
  - 5. Dinas Penanaman Modal, PTSP, Perindustrian dan Perdagangan
  - 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - 7. Dinas Transmigrasi, Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja
  - 8. Dinas Perhubungan
  - 9. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - 10. Dinas Lingkungan Hidup
  - 11. Dinas Pariwisata
  - 12. Dinas Kelautan dan Perikanan
  - 13. Dinas Pertanian dan Pangan
  - 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  - 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

17. Satuan Polisi Pamong Praja

e) Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
3. Badan Keuangan Daerah

f) Organisasi Perangkat Daerah Lainnya :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sabu Raijua

g) Kecamatan, terdiri dari :

1. Kecamatan Sabu Barat
2. Kecamatan Sabu Tengah
3. Kecamatan Sabu Timur
4. Kecamatan Sabu Liae
5. Kecamatan Hawu Mehara
6. Kecamatan Raijua

**Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua**

Seuai PERDA Nomor 7 Tahun 2016



## 1.6 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang. Isu-Isu strategis berdasarkan permasalahan di tahun 2022 yang terangkum dalam dokumen Perencanaan tahunan (RKPD Tahun 2022) mencakup :

1. Perlu upaya penguatan peningkatan kualitas layanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan;
2. Perlu upaya peningkatan Pembangunan infrastruktur dan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
3. Perlu upaya penguatan perekonomian daerah dan masyarakat yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, khususnya di bidang Pariwisata dan UMKM;
4. Perlu upaya peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

## 1.7 SISTIMATIKA LAPORAN

Sistimatika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 terdiri dari 4 Bab yaitu, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan Maksud tujuan, sasaran dan dasar hukum penyusunan LKIP serta gambaran umum kondisi daerah, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama atau isu strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun berkenaan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja berdasarkan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi serta Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

### **LAMPIRAN**

1. Penghargaan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
2. Inovasi Pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama periode tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan kinerja dimaksudkan sebagai rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021–2026, tahun 2022 adalah tahun kedua pelaksanaan perencanaan 5 tahunan, yang memuat visi, misi, dan terjemahan agenda kepala daerah terpilih dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pelaksanaannya terencana dan bertahap dengan pembiayaan APBD. Dokumen RPJMD Sabu Raijua periode 2021-2026 juga berisi isu strategis daerah Kabupaten Sabu Raijua yang selaras dengan isu strategis daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan isu strategis nasional.

Visi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah **“Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”**.

Visi tersebut dibangun dengan spirit universal bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh masyarakat Kabupaten Sabu Raijua. Visi ini menggambarkan makna pembangunan yang diharapkan akan dicapai pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 2021-2026 yakni:

1. Bersatu merepresentasikan kebersamaan semua elemen masyarakat Kabupaten Sabu Raijua yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dan masyarakat Sabu Raijua diaspora dan semua Lembaga yang ada untuk berkolaborasi membangun Kabupaten Sabu Raijua, membangun dalam suasana kekeluargaan yakni memperkuat budaya masyarakat Sabu Raijua berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong royong, berinovasi memanfaatkan potensi wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
2. Maju merepresentasikan terwujudnya peningkatan taraf hidup yang dimaknai sebagai suatu kondisi derajat atau kualitas kehidupan yang terus meningkat.

Kabupaten Sabu Raijua yang Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Daerah adalah Kabupaten yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata. Kabupaten Sabu Raijua sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus

bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka.

kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

3. Bermartabat, ditandai dengan terpenuhinya hak seseorang untuk dihargai dan dihormati, dan diperlakukan secara etis dan berkeadilan sesuai dengan harkatnya sebagai warga negara, baik dalam nilai agama, etika, moralitas, hukum, sosial, politik, dan ekonomi. Manusia yang bermartabat merupakan manusia yang menikmati umur panjang, dapat hidup bahagia, mempunyai akses yang luas terhadap pengetahuan dan dapat hidup yang layak. Masyarakat yang bermartabat juga selaras dengan masyarakat yang memiliki kepribadian dengan landasan bergotong royong, kerjasama, untuk mencapai martabat manusia seutuhnya yang adil, makmur, dan sejahtera.

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, akan ditempuh melalui Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Menjamin kecukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama
3. Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel
4. Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan Infrastruktur yang handal, pemerataan wilayah serta menjamin pembangunan berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut kemudian menjadi dasar penetapan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai sasaran kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan. Selanjutnya sasaran kinerja dan strategi ditetapkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah.

Berikut ini adalah ringkasan informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan IKU yang merupakan sasaran strategis atau sebagai pernyataan perjanjian kinerja untuk tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.1.** Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sabu Raijua

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
Visi: “Mewujudkan Kabupaten Sabu Raijua yang Bersatu, Maju dan Bermartabat”		
Misi I : Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia dan pengentasan kemiskinan	Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan	1 Meningkatkan Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR
		2 Meningkatkan Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT
		3 Meningkatkan keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU
Menjamin kecukupan pangan, air dan energi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah dengan sektor pariwisata sebagai penggerak utama	Menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat	1 Menjamin Kecukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP
		2 Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL
		3 Meningkatkan Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU
Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional dan mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, efektif dan akuntabel	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan public dan birokrasi	1 Meningkatkan Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR
		2 Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN
		3 Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH
Meningkatkan akses masyarakat melalui penyediaan Infrastruktur yang handal, pemerataan wilayah serta	Meningkatnya akses masyarakat dan pembangunan berkelanjutan	1 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	
menjamin pembangunan berkelanjutan		2	Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR
		3	Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI
		4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

## 2.2. Indikator Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja tentu pemerintah perlu menentukan Indikator Kinerja utama (IKU) maupun indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU adalah ukuran sebuah instansi mencapai tujuan. IKU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU membantu optimalisasi pencapaian sasaran.

Sedangkan IKD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Berikut ini adalah indikator kinerja dari masing-masing Tujuan/Sasaran:

**Tabel 2.2.** Visi, Misi Tujuan Sasaran dan Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026

Visi : “Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”			
MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4
MISI I	1	Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia
			Angka kemiskinan
		1.1	Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR

Visi : “Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”			
MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3	4
		1.2	Lulusan SMA/SMK yang Melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi
		Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT	Usia harapan hidup
			Prevalensi Balita Gizi Buruk Per 1000 KH
			Angka Kematian Ibu Hamil per 100.000 KH
			Angka Stunting
			Persentase Vaksinasi Covid-19
		1.3	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU
		Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	Tingkat partisipasi Angkatan kerja
			Tingkat Pengangguran Terbuka
			Indeks pembangunan gender
			Indeks Pemberdayaan gender
			Laju Pertumbuhan PDB per tenaga kerja
<b>MISI II</b>	<b>2</b>	<b>Menumbuhkan tingkat Perekonomian daerah dan masyarakat</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>
		2.1 Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
			Persentase ketersediaan pangan
			Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
			Produksi sektor pertanian
		2.2 Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	Persentase Kontribusi Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang Mendukung PDRB ADHK
			Jumlah Even Pariwisata pertahun
		2.3	PDRB per Kapita

Visi : “Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”				
MISI	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3		4
			Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	Pengeluaran per Kapita
				Persentase PAD terhadap APBD
				Peningkatan Nilai Ekspor
MISI III	3	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dan birokrasi		Indeks Kepuasan Masyarakat
		3.1	Meningkatnya Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
				Persentase Aparatur Sipil Negara yang Melaporkan Harta Kekayaannya
				Skor <i>Monitoring Center For Prevention</i> (MCP)
		3.2	Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis <i>elektronik</i>
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
		3.3	Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH	Presentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
				Presentase aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat
Penanganan Layanan Aduan Masyarakat				
Tingkat Kapabilitas APIP dalam waskat				
MISI IV	4	Meningkatnya akses masyarakat dan pembangunan berkelanjutan		Presentase Capaian Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Umum

Visi : “Sabu Raijua Bersatu, Maju dan Bermartabat”				
MISI	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran
1	2	3		4
		4.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR	Pertumbuhan Sub Sektor Jasa Konstruksi
		4.2	Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan
				Peningkatan Angkutan Umum Darat
				Persentase Sarana Pelabuhan Udara/Laut dan Terminal Bis yang beroperasi
		4.3	Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik
		4.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup

### 2.3. Strategi dan Program serta Arah Kebijakan Daerah

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

#### 2.3.1. Strategi dan Program

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Rumusan Strategi dan Program sesuai sasaran untuk mencapai Misi adalah sebagai berikut :

**a. Strategi Misi Kesatu**

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju **SARAI PINTAR** adalah :

- 1) Peningkatan Kompetensi dan pemerataan Guru serta sarana dan prasarana pendidikan PAUD, SD, SMP dan Non Formal;
- 2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pendidikan dasar, PAUD dan Non Formal di masyarakat
- 3) Pemberlakuan jam belajar dan pelajaran tambahan melalui pembudayaan gemar membaca dan pengelolaan perpustakaan;
- 4) Peningkatan Kapasitas dan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan olahraga

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pengembangan Kurikulum
- 3) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
- 4) Program Pembinaan Perpustakaan
- 5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
- 6) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 7) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju **SARAI SEHAT** adalah :

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penempatan dan pemerataan tenaga medis dan paramedis, kerjasama dokter spesialis serta Pemberantasan penyakit menular secara intensif dan *continue*;
- 2) Upaya promosi kesehatan bagi masyarakat serta Bantuan layanan kesehatan *mobile*
- 3) Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga Berencana;

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
- 3) Program Sediaan Informasi, alat kesehatan dan makan minum
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan
- 5) Program pengendalian penduduk

- 6) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- ❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Menuju **SARAI MAMPU** adalah :
- 1) Mengedukasi masyarakat tentang kemiskinan, Kepedulian Sosial serta melakukan intervensi terhadap indikator kemiskinan
  - 2) Perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan social
  - 3) Pengarusutamaan gender dalam Kegiatan Pemberdayaan dan pembangunan
  - 4) Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Usaha yang berbasis UMKM
  - 5) Penataan pusat perekonomian baru melalui Transmigrasi local
  - 6) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :
- 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga
  - 2) Program Pemberdayaan Sosial
  - 3) Program Rehabilitasi Sosial
  - 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 5) Program Penanganan Bencana
  - 6) Program Pengurusan Keutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
  - 7) Program Perlindungan Perempuan
  - 8) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - 9) Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak
  - 10) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - 11) Program Perlindungan Khusus Anak
  - 12) Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja
  - 13) Program Penempatan Tenaga Kerja
  - 14) Program Hubungan Industrial
  - 15) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
  - 16) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
  - 17) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
  - 18) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
  - 19) Program Pengembangan UMKM
  - 20) Program Perencanaan Transmigrasi
  - 21) Program Pembangunan Transmigrasi

22) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

**b. Strategi Misi Kedua**

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Menjamin Ketercukupan Pangan, Air Dan Energi Menuju **SARAI CUKUP** adalah :

- 1) Mengupayakan ketercukupan pangan melalui GERAKAN PANGAN LESTARI
- 2) Peningkatan nilai produksi pada sektor Pertanian dan Perikanan
- 3) Mengupayakan ketercukupan air melalui GERAKAN TAHAN AIR
- 4) Mengupayakan ketersediaan BBM, penataan distribusi BBM dan upaya penambahan kuota BBM subsidi dan Non Subsidi serta mengedukasi masyarakat dalam pemanfaatan BBM

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Peningkatan Disersifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 4) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 6) Program Penyuluhan Pertanian
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 8) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 9) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 10) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 12) Program Perekonomian dan Pembangunan

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Berkembangnya Sektor Pariwisata menuju **SARAI BEAUTIFULL** adalah :

- 1) Peningkatan pembangunan pariwisata melalui pembangunan desa wisata, Penataan obyek wisata alam, buatan, atraksi, kuliner dan cinderamata;
- 2) Meningkatkan produksi sektor primer dan industri rumah tangga untuk menunjang pariwisata.
- 3) Mengidentifikasi obyek wisata baru dan menggiatkan promosi serta memberdayakan masyarakat sadar wisata.

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- 2) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindung Hak Kekayaan Intelektual
  - 4) Program Pemasaran Pariwisata
  - 5) Program Pengembangan Kebudayaan
  - 6) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- ❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Perekonomian Daerah menuju **SARAI MAJU** adalah :
- 1) Peningkatan Penanaman Modal didaerah;
  - 2) Memacu pertumbuhan sektor produksi, perdagangan dan jasa untuk membuka lapangan kerja baru sehingga mampu meningkatkan produksi masyarakat dan menekan angka pengangguran
  - 3) Meningkatkan produksi sektor primer dan induatri rumah tangga serta produksi nira (gula sabu dan gula semut) untuk menunjang pariwisata menuju satu rumah tangga satu produk
  - 4) Mengoptimalkan pengelolaan pabrik AMDK dan Pabrik Rumput Laut serta memperluas inovasi industri garam serta produk turunan lainnya

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2) Program Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 6) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 8) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 9) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

### c. Misi Ketiga

- ❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Integritas Apratur dalam pelayanan Pemerintahan Menuju **SARAI JUJUR** adalah :
- 1) Menciptakan dan memperluas kawasan berintegritas dan perilaku birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN.s
  - 2) Meningkatkan budaya kerja yang disiplin, bertanggungjawab dan berkinerja.
  - 3) Penataan regulasi daerah

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 3) Program Kepegawaian Daerah
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 5) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 6) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 7) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 8) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 9) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 10) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 11) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 12) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Lembaga Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- 13) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 14) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya
- 15) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
- 16) Program Pengelolaan Arsip
- 17) Program Pendataan Desa
- 18) Program Administrasi Pemerintahan Desa

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju **SARAI TRANSPARAN** adalah :

- 1) Melakukan Integrasi dan sinergisitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pembangunan di daerah serta penyusunan Dokumen Perencanaan berbasis *elektronik*;
- 2) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, ekonomis, efektif dan akuntabel;

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- 4) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 6) Program Pengelolaan Pendetapan Daerah

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju **SARAI RAMAH** adalah :

- 1) Menciptakan dan meningkatkan budaya kerja dan etos kerja birokrasi yang melayani dengan kesungguhan hati;
- 2) Pelayanan tanggap bencana yang cepat, tepat dan memuaskan berbasis teknologi informasi melalui program Sabu Raijua dalam genggaman.

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 2) Program Pendaftaran Penduduk
- 3) Program Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 5) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 6) Program Penanggulangan Bencana

#### **d. Misi Keempat**

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas **INFRASTRUKTUR** adalah :

- 1) Peningkatan kualitas jalan, jembatan, gedung dan bangunan pengairan;
- 2) Pembangunan TPA, Perluasan jaringan listrik dan air, serta pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah :

- 1) Program Pengembangan Pemukiman
- 2) Program Penataan Bangunan Gedung
- 3) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 4) Program Penyelenggaraan Jalan
- 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 6) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 8) Program Pengembangan Perumahan
- 9) Program Kawasan Pemukiman

10) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Terwujudnya **TRANSPORTASI LANCAR** adalah :

- 1) Pembangunan terminal pengujian kendaraan bermotor, serta Penyediaan angkutan umum dari desa ke obyek wisata, pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat layanan masyarakat;
- 2) Peningkatan kualitas dermaga dan peningkatan fasilitas pendukung pelabuhan lainnya

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meluasnya Pemanfaatan **TEKNOLOGI INFORMASI** adalah :

- 1) Modernisasi pelayanan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi;
- 2) Perluasan akses masyarakat terhadap teknologi informasi melalui penambahan hotspot internet disetiap Desa/Kelurahan;
- 3) Penyediaan Data Statistik Daerah;
- 4) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah

- 1) Program Informasi dan Kominkasi Publik
- 2) Program Aplikasi Informatika
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

❖ Strategi yang perlu dilakukan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang **BERKELANJUTAN** adalah :

- 1) Perencanaan dan Pengendalian lingkungan hidup
- 2) Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Lingkungan hidup bagi masyarakat;
- 3) Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam pencapaian Sasaran ini Program-Program yang dilaksanakan adalah

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Hidup
- 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

#### 4) Program Pengelolaan Persampahan

##### **2.3.2. Arah Kebijakan Daerah**

Pembangunan daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Tema Pembangunan di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 adalah: “Pemantapan Pemulihan Ekonomi berbasis UMKM dan Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat”.

Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPd Kabupaten Sabu Raijua Pada Tahun 2022 dan RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026 diarahkan pada :

1. Penguatan perekonomian masyarakat berbasis UMKM yang produktif, stabil dan merata melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing.
2. Pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menghubungkan antar bagian wilayah dan atau pusat- pusat pertumbuhan ekonomi dan Pariwisata dengan memperhatikan aspek Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup;
3. Peningkatan Aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan serta pengurangan tingkat kemiskinan dan Stunting;
4. Peningkatan kinerja birokrasi dan tata kelola Layanan pemerintahan yang baik

##### **2.4. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022**

Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam perjanjian kinerja dijabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan perjanjian kinerja dilaksanakan setelah pengesahan dokumen anggaran. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 dengan memperhatikan besaran anggaran yang telah ditetapkan.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi. Adapun Target Kinerja Tahunan berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3** Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
<b>MISI I :</b>					
<b>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan</b>					
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kesetaraan Gender	1	Indeks pembangunan manusia	Indeks	57,04
		2	Indeks pembangunan gender	Indeks	93,04
2.	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR	1.1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,21
		1.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,14
3.	<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT	2.1	Usia harapan hidup	Tahun	61,62
		2.2	Prevalensi Stunting	%	19,70
		2.3	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,43
4.	<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	3.1	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,14
		3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,87
		3.3	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	60,33
		3.4	Persentase angka kemiskinan	%	30,12
<b>MISI II :</b>					
<b>Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi, serta Meningkatnya Daya Saing Perekonomian Daerah, Dengan Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Utama</b>					
1.	<b>Tujuan :</b> Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Daerah dan Masyarakat	1	Laju pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	2,55
2.	<b>Sasaran 1:</b> Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	1.1	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,11
		1.2	Skor pola pangan harapan	Skor	65,18
3.	<b>Sasaran 2:</b> Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	2.1	Pertumbuhan kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK	%	5,55
4.	<b>Sasaran 3:</b> Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	3.1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,67
		3.2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	15,20
		3.3	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,641
<b>MISI III :</b>					
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Profesional Dan Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Efisien Dan Akuntabel</b>					
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dan Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET
2.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju Sabu Raijua Jujur	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61
3.	<b>Sasaran 2:</b> Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP
		2.2	Indek pengelolaan keuangan daerah	Indeks	75
4.	<b>Sasaran 3:</b> Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH	3.1	Presentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	100
		3.2	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat	%	100
<b>MISI IV :</b> <b>Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang Handal, Pemerataan Wilayah Serta Menjamin Pembangunan Berkelanjutan</b>					
1.	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastuktur	1	Rata – rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75
2.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastuktur	1.1	Pertumbuhan Sub Sektor jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	3,33
3.	<b>Sasaran 2:</b> Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR	2.1	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,67
4.	<b>Sasaran 3:</b> Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI	3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,56
5.	<b>Sasaran 4:</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang BERKELANJUTAN	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,00

Sumber : RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Acuan untuk menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua adalah RPJMD Tahun 2021-2026, RKT 2022 dan Perjanjian Kinerja 2022. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Key Performance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja yang bersifat strategis. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan, kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya untuk mengatasinya maka secara sistimatis disajikan uraian tentang pengukuran kinerja, pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan dengan menggunakan metode:

##### a) Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target/Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi rencana menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah rencana menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**Atau:**

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Reaisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

##### b) Metode Penyimpulan Capaian Sasaran Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1** Skala Pengukuran Kinerja

NILAI	SKALA PENGUKURAN KINERJA
$X \geq 95,00 \%$	Sangat Tinggi
$80,00\% \leq X \leq 94,99\%$	Tinggi
$60,00 \% \leq X \leq 79,99 \%$	Sedang
$51,00 \% \leq X \leq 59,99 \%$	Rendah
$X \leq 50,99\%$	Sangat Rendah

Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju terwujudnya Pemerintahan yang baik sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menuangkan capaian kinerja tersebut dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai wujud Kinerja Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai kewenangan yang dimiliki.

Instrumen pertanggungjawaban ini meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang disampaikan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Selanjutnya untuk setiap Sasaran kinerja strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

## 1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

**Tabel 3.2** Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2022			KATEGORI
		TUJUAN/SASARAN			TARGET	REALISASI	%	
<b>MISI I</b>								
<b>Meningkatkan Kualitas SDM dan Pengentasan Kemiskinan</b>								
A	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kesenjangan Gender	1	Indeks pembangunan manusia	Indeks	57,04	57,03	99,98	Sangat Tinggi
		2	Indeks pembangunan gender	Indeks	93,04	92,31	99,22	Sangat Tinggi
1.	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR	1.1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,21	6,29	47,62	Sangat Rendah
		1.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,14	6,65	93,14	Tinggi
2.	<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT	2.1	Usia harapan hidup	Tahun	61,62	57,48	93,28	Tinggi
		2.2	Prevalensi Stunting	%	19,7	18,1	108,84	Sangat Tinggi
		2.3	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,43	2,26	151,77	Sangat Tinggi
3.	<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	3.1	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,14	65,69	87,42	Tinggi
		3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,87	3,3	86,97	Tinggi
		3.3	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	60,33	55,93	92,71	Tinggi
		3.4	Persentase angka kemiskinan	%	30,12	30,13	99,97	Sangat Tinggi
<b>MISI II</b>								
<b>Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi, serta Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah, Dengan Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Utama</b>								
A.	<b>Tujuan :</b> Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Daerah dan Masyarakat	1	Laju pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	2,55	1,55	60,78	Sedang
1.	<b>Sasaran 1:</b> Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	1.1	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,11	4,02	78,67	Sedang

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2022			KATEGORI
		TUJUAN/SASARAN			TARGET	REALISASI	%	
		1.2	Skor pola pangan harapan	Skor	65,18	65,2	100,03	Sangat Tinggi
2.	<b>Sasaran 2:</b> Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	2.1	Pertumbuhan kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK	%	5,55	6,09	109,73	Sangat Tinggi
3.	<b>Sasaran 3:</b> Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	3.1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,67	3,39	202,99	Sangat Tinggi
		3.2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	15,2	15,95	104,93	Sangat Tinggi
		3.3	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,641	5,256	93,17	Sangat Tinggi
<b>MISI III</b>								
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Profesional Dan Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Efisien Dan Akuntabel</b>								
A.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dan Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi
1.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	61,00	41,68	68,33	Sedang
2.	<b>Sasaran 2:</b> Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
		2.2	Indek pengelolaan keuangan daerah	Indeks	75,00	75,00	100,00	Sangat Tinggi
3.	<b>Sasaran 3:</b> Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH	3.1	Presentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		3.2	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2022			KATEGORI
		TUJUAN/SASARAN			TARGET	REALISASI	%	
<b>MISI IV</b>								
<b>Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Inrastruktur Yang Handal, Pemerataan Wilayah Serta Menjamin Pembangunan Berkelanjutan</b>								
A.	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastuktur	1	Rata – rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75	75	100,00	Sangat Tinggi
1.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas INFRASTRUKTUR	1.1	Pertumbuhan Sub Sektor jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	3,33	7,53	226,13	Sangat Tinggi
2.	<b>Sasaran 2:</b> Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR	2.1	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,67	0,74	44,31	Sangat Rendah
3.	<b>Sasaran 3:</b> Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI	3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,56	2,6	166,67	Sangat Tinggi
4.	<b>Sasaran 4:</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang BERKELANJUTAN	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69	70,79	102,59	Sangat Tinggi
<b>Jumlah</b>							<b>106,57</b>	

Sumber : RPJMD, Data BPS 2022, Perangkat Daerah, 2023

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2021			KATEGORI	CAPAIAN 2022			KATEGORI
		TUJUAN/SASARAN			TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%	
<b>MISI I</b>												
<b>Meningkatkan Kualitas SDM dan Pengentasan Kemiskinan</b>												
A	Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kesetaraan Gender	1	Indeks pembangunan manusia	Indeks	57,02	57,02	100,00	Sangat Tinggi	57,04	57,03	99,98	Sangat Tinggi
		2	Indeks pembangunan gender	Indeks	92,79	92,79	100,00	Sangat Tinggi	93,04	92,31	99,22	Sangat Tinggi
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR	1.1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,18	6,26	47,50	Sangat Rendah	13,21	6,29	47,62	Sangat Rendah
		1.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,89	6,66	96,66	Sangat Tinggi	7,14	6,65	93,14	Tinggi
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT	2.1	Usia harapan hidup	Tahun	61,13	60,66	99,23	Sangat Tinggi	61,62	57,48	93,28	Tinggi
		2.2	Prevalensi Stunting	%	25,49	25,5	99,96	Sangat Tinggi	19,7	18,1	108,84	Sangat Tinggi
		2.3	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,41	2,04	167,16	Sangat Tinggi	3,43	2,26	151,77	Sangat Tinggi
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	3.1	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,13	68,82	91,60	Tinggi	75,14	65,69	87,42	Tinggi
		3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,07	3,08	99,68	Sangat Tinggi	2,87	3,3	86,97	Tinggi
		3.3	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	58,13	56,04	96,40	Sangat Tinggi	60,33	55,93	92,71	Tinggi
		3.4	Persentase angka kemiskinan	%	30,13	30,18	99,83	Sangat Tinggi	30,12	30,13	99,97	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2021			KATEGORI	CAPAIAN 2022			KATEGORI
		TUJUAN/SASARAN			TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%	
<b>MISI II</b>												
<b>Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi, serta Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah, Dengan Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Utama</b>												
A.	<b>Tujuan :</b> Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Daerah dan Masyarakat	1	Laju pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,11	1,11	100,00	Sangat Tinggi	2,55	1,55	60,78	Rendah
1.	<b>Sasaran 1:</b> Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	1.1	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	4,56	1,76	38,60	Sangat Rendah	5,11	4,02	78,67	Tinggi
		1.2	Skor pola pangan harapan	Skor	63,9	79,38	124,23	Sangat Tinggi	65,18	65,2	100,03	Sangat Tinggi
2.	<b>Sasaran 2:</b> Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	2.1	Pertumbuhan kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK	%	5,48	5,13	100,03	Sangat Tinggi	5,55	6,09	109,73	Sangat Tinggi
3.	<b>Sasaran 3:</b> Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	3.1	Pertumbuhan sektor industri pengelolaan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	0,83	0,71	Tinggi	Sangat Tinggi	1,67	3,39	202,99	Sangat Tinggi
		3.2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	14,69	15,83	107,76	Sangat Tinggi	15,2	15,95	104,93	Sangat Tinggi
		3.3	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	5,497	5,265	95,78	Sangat Tinggi	5,641	5,256	93,17	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2021			KATEGORI	CAPAIAN 2022			KATEGORI
		TUJUAN/SASARAN			TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%	
<b>MISI III</b>												
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Profesional Dan Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Efisien Dan Akuntabel</b>												
A.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dan Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi	Baik	Baik	100,00	Sangat Tinggi
1.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,00	N/A	N/A	N/A	61,00	41,68	68,33	Sedang
2.	<b>Sasaran 2:</b> Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
		2.2	Indek pengelolaan keuangan daerah	Indeks	70,00	70,00	100,00	Sangat Tinggi	75,00	75,00	100,00	Sangat Tinggi
3.	<b>Sasaran 3:</b> Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH	3.1	Presentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		3.2	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
<b>MISI IV</b>												
<b>Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Inrastruktur Yang Handal, Pemerataan Wilayah Serta Menjamin Pembangunan Berkelanjutan</b>												
A.	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastuktur	1	Rata – rata persentase jangkauan	%	60	60	100,00	Sangat Tinggi	75	75	100,00	Sangat Tinggi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN 2021			KATEGORI	CAPAIAN 2022			KATEGORI
		TUJUAN/SASARAN			TARGET	REALISASI	%		TARGET	REALISASI	%	
			infrastruktur wilayah Kabupaten									
1.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas INFRASTRUKTUR	1.1	Pertumbuhan Sub Sektor jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	1,67	-7,96	N/A	N/A	3,33	7,53	226,13	Sangat Tinggi
2.	<b>Sasaran 2:</b> Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR	2.1	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	0,83	-7,98	N/A	N/A	1,67	0,74	44,31	Sangat Rendah
3.	<b>Sasaran 3:</b> Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI	3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,45	1,35	93,10	Tinggi	1,56	2,6	166,67	Sangat Tinggi
4.	<b>Sasaran 4:</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang BERKELANJUTAN	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67	69	102,99	Sangat Tinggi	69	70,79	102,59	Sangat Tinggi

Sumber : RPJMD, Data BPS 2022, Perangkat Daerah, 2023

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi serta Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.4 Capaian Kinerja RPJMD dan Standard Nasional

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN RPJMD			CAPAIAN STANDARD NASIONAL		
		TUJUAN/SASARAN			TARGET AKHIR	REALISASI 2022	%	TARGET	REALISASI 2022	%
<b>MISI I</b>										
<b>Meningkatkan Kualitas SDM dan Pengentasan Kemiskinan</b>										
A	Tujuan : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kestetaraan Gender	1	Indeks pembangunan manusia	Indeks	59,90	57,03	95,21	65,91	57,03	86,53
		2	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,29	92,31	97,90	91,07	92,31	101,36
1.	Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR	1.1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,35	6,29	47,12	12,98	6,29	48,46
		1.2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,11	6,65	82,00	8,34	6,65	79,74
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT	2.1	Usia harapan hidup	Tahun	63,57	57,48	90,42	71,47	57,48	80,43
		2.2	Prevalensi Stunting	%	3,00	18,1	16,57	21,60	18,1	119,34
		2.3	Laju pertumbuhan penduduk	%	3,50	2,26	154,87	1,17	2,26	51,77
3.	Sasaran 3 : Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU	3.1	Tingkat partisipasi Angkatan kerja	%	75,20	65,69	87,35	55,50	65,69	118,36
		3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,90	3,30	57,58	5,23	3,30	158,48
		3.3	Indeks Pemberdayaan gender	Indeks	69,13	55,93	80,91	75,24	55,93	74,34
		3.4	Persentase angka kemiskinan	%	27,82	30,13	92,33	9,78	30,13	32,46

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN RPJMD			CAPAIAN STANDARD NASIONAL			
				TARGET AKHIR	REALISASI 2022	%	TARGET	REALISASI 2022	%	
<b>MISI II</b>										
<b>Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi, serta Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah, Dengan Sektor Pariwisata Sebagai Penggerak Utama</b>										
A.	<b>Tujuan :</b> Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Daerah dan Masyarakat	1	Laju pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,25	1,55	29,52	5,30	1,55	29,25
1.	<b>Sasaran 1:</b> Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP	1.1	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	7,28	4,02	55,22	-	4,02	-
		1.2	Skor pola pangan harapan	Skor	70,51	65,2	92,47	-	65,2	-
2.	<b>Sasaran 2:</b> Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL	2.1	Pertumbuhan kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK	%	6,03	6,09	101,00	-	6,09	-
3.	<b>Sasaran 3:</b> Meningkatnya Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU	3.1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan (pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,00	3,39	67,80	-	3,39	-
		3.2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	17,23	15,95	92,57	-	15,95	-
		3.3	Pengeluaran per Kapita	Juta Rupiah	6,214	5,256	84,58	11,299	5,256	46,52
<b>MISI III</b>										
<b>Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Yang Profesional Dan Mewujudkan Birokrasi Yang Bersih Efisien Dan Akuntabel</b>										
A.	<b>Tujuan :</b> Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dan Birokrasi	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	100,00	Baik	Baik	100,00
1.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	65,00	41,68	64,12	-	41,68	-
2.	<b>Sasaran 2:</b> Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan	2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100,00	-	WTP	-

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN RPJMD			CAPAIAN STANDARD NASIONAL		
		TUJUAN/SASARAN			TARGET AKHIR	REALISASI 2022	%	TARGET	REALISASI 2022	%
	Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN	2.2	Indek pengelolaan keuangan daerah	Indeks	82,00	75,00	91,46	-	75,00	-
3.	<b>Sasaran 3:</b> Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH	3.1	Presentase Penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
		3.2	Presentase aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-
<b>MISI IV</b>										
<b>Meningkatkan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Infrastruktur Yang Handal, Pemerataan Wilayah Serta Menjamin Pembangunan Berkelanjutan</b>										
A.	<b>Tujuan :</b> Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastuktur	1	Rata – rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten	%	75,00	75,00	100,00	-	75,00	-
1.	<b>Sasaran 1:</b> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas INFRASTRUKTUR	1.1	Pertumbuhan Sub Sektor jasa Konstruksi (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	10,00	7,53	75,30	-	7,53	-
2.	<b>Sasaran 2:</b> Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR	2.1	Pertumbuhan Sub Sektor transportasi dan Pergudangan (Pertumbuhan PDRB ADHK)	%	5,00	0,74	14,80	-	0,74	-
3.	<b>Sasaran 3:</b> Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI	3.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,00	2,6	130,00	-	2,6	-
4.	<b>Sasaran 4:</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang BERKELANJUTAN	4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,00	70,79	94,39	-	70,79	-

Sumber : RPJMD, Data BPS 2022, Perangkat Daerah.2023

Diagram 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama, 2022



**4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan data sebagaimana tabel Capaian Kinerja diatas, akan dibahas berdasarkan masing-masing tujuan dan sasaran strategisnya dengan indikator kerjanya sebagai berikut:

**A. Tujuan Misi I yaitu : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kesetaraan Gender dengan indikator :**

- ❖ **Indeks Pembangunan Manusia;** Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dikenal secara universal ditunjukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual berdasarkan rata-rata geometrik sektor pendidikan terkait dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah Sektor Kesehatan terkait Usia Harapan Hidup dan Sektor Ekonomi terkait Standar Hidup Layak (pendapatan perkapita). Data IPM Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga tahun 2022 mencapai 57,03. Mendekati target RPJMD sebesar 57,04 atau tingkat pencapaiannya dikategorikan **SANGAT TINGGI**. Namun demikian Pencapaian nilai IPM ini juga jika disandingkan dengan capaian ditingkat provinsi (65,28) maupun nasional (70,29) masih tertinggal jauh. Hal ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakatnya, khususnya pada 3 sektor tersebut.
- ❖ **Indeks Pembangunan Gender;** adalah ukuran pembangunan manusia berbasis gender dilihat dari 3 dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak berbasis gender. Peningkatan indeks pembangunan gender dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran per-kapita perempuan, peningkatan angka

harapan lama sekolah perempuan, peningkatan rata-rata lama sekolah perempuan dan peningkatan angka harapan hidup perempuan. Capaian realisasi indeks pembangunan gender Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yaitu 92,31 mendekati target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 93,04 atau tingkat pencapaiannya dikategorikan **SANGAT TINGGI**, bahkan melampaui Standard Nasional yang menargetkan sebesar 91,07.

**1. Sasaran I dari Misi I ini adalah Meningkatkan Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR dengan Indikator :**

**1.1. Harapan lama sekolah;** adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang . Angka harapan sekolah di hitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas .Indikator ini di ukur oleh BPS melalui metode survey. Capaian realisasi Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sabu Raijua Pada tahun 2022 adalah 6,29 tahun masih jauh dari target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 13,21 tahun atau dikategorikan **SANGAT RENDAH**. Hal ini dipengaruhi oleh masih adanya anggapan atau pandangan dari masyarakat miskin kalau anak tidak perlu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tapi harus bekerja membantu orang tua. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi bentuk pendekatan lainnya kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

**1.2. Rata-rata lama sekolah;** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2022 mencapai 6,65 tahun mendekati target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 7,14 tahun atau tingkat pencapaiannya dikategorikan **TINGGI**.

**2. Sasaran II dari Misi I ini adalah Meningkatkan layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT dengan Indikator :**

**2.1. Usia Harapan Hidup;** merupakan salah satu indikator sasaran yang digunakan sebagai alat ukur dalam pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan layanan kesehatan menuju SARAI SEHAT. Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa yang mendatang. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Berdasarkan serangkaian rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi

sampai mencapai umur tertentu. Capaian usia harapan hidup pada Tahun 2022 adalah 60,66 Tahun, mendekati target yang ditetapkan yakni 61,62 Tahun atau tingkat pencapaiannya dikategorikan **TINGGI**.

**2.2. Prevalensi stunting;** atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang dan stimulasi psikososial yang tidak memadai (terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun). Anak tergolong stunting apabila panjang/tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang/tinggi anak seumurnya (TB/U) (Kementerian Kesehatan, 2018). Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latarbelakang sosial dan ekonomi yang buruk. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi di 63 Desa/kelurahan di Kabupaten Sabu Raijua, pada Periode Februari 2021 presentase balita stunting sebesar 29,5% dan cenderung menurun pada periode Agustus 2021 menjadi 25,5%. Selama Tahun 2022 dengan target yang ditetapkan yakni 19,70%, pada Periode Agustus Kabupaten Sabu Raijua berhasil menurunkan presentase balita stunting menjadi 18,1%, melebihi target yang ditetapkan atau dikategorikan **SANGAT TINGGI**. Dan diharapkan akan terus mengalami penurunan hingga mencapai 10% di tahun 2023.

**2.3. Laju pertumbuhan penduduk;** Berkenaan dengan angka pertumbuhan penduduk, kriteria laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: Laju pertumbuhan cepat, apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya; Laju pertumbuhan sedang, apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1% – 2% setiap tahunnya; Laju pertumbuhan lambat, apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1% setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan jumlah penduduk Sabu Raijua kembali meningkat, dimana dari jumlah 89.320 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 90.837 jiwa pada Tahun 2021 atau dari target 3,41%, laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 dapat ditekan dengan capaian 2,04 %. Sedangkan target laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2022 dari target sebesar 3,43 % dapat ditekan dengan capaian 2,26% atau dikategorikan **SANGAT TINGGI**. Meski demikian, angka ini juga berarti telah melewati batas ideal yang ditargetkan Standard Nasional yaitu 1,17 persen per tahun atau memiliki laju pertumbuhan lambat.. Pemerintah memiliki beberapa program untuk menekan tingkat kelahiran, salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB).

**3. Sasaran III dari Misi I ini adalah Meningkatkan Keberdayaan masyarakat menuju Sarai Mampu dengan Indikator sebagai berikut:**

**3.1. Tingkat partisipasi angkatan kerja;** program yang dijalankan berupa perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan pelayan dan penyediaan informasi pasar kerja, untuk tahun 2022 total pencari kerja yang terdaftar sebanyak 316 orang dan yang ditempatkan sebanyak 201 orang, dengan capaian realisasi tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 sebesar 65,69% mendekati target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 75,14% atau dikategorikan **TINGGI**.

**3.2. Tingkat pengangguran terbuka;** program yang dijalankan berupa pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, untuk tahun 2022 total pencari kerja yang di latih berbasis kompetensi sebanyak 30 orang dan dapat menciptakan 30 lapangan kerja baru. Selanjutnya program yang dijalankan berupa program perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan padat karya infrastruktur pembuatan parit jebakan air di 8 (delapan) lokasi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 248 orang. Program dan kegiatan ini berdampak pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 menjadi 3,30% mendekati target yang ditetapkan sebesar 2,87% atau pencapaiannya dikategorikan **TINGGI**.

**3.3. Indeks Pemberdayaan gender (IDG);** merupakan indikator yang menggambarkan adanya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi politik dan digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan kapabilitas dan peran perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Perhitungan IDG dilakukan pada 3 dimensi yaitu (1) Keterwakilan di parlemen dengan indikator proporsi kererwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan; (2) Pengambilan keputusan dengan indikator proporsi dari manejer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi laki-laki dan perempuan; serta (3) Dimensi distribusi pendapatan dengan indikator upah buruh non pertanian laki-laki dan perempuan. Capaian realisasi indeks pemberdayaan gennder Kabupaten tahun 2022 yaitu 55,93% mendekati target yang ditetapkan 60,33% atau dikategorikan **TINGGI**.

**3.4. Persentase angka kemiskinan;** menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua dapat dikatakan cukup tinggi yakni diatas 30an persen dari tahun 2017 sebesar 31,07% terus bergerak turun hingga 2022 mencapai 30,13%. Walaupun terus mengalami penurunan angka ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan ditingkat provinsi (20,44%) maupun tingkat nasional (9,71%). Sehingga masih dibutuhkan

upaya terus-menerus dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sabu Raijua. Namun demikian capaian angka kemiskinan Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 sebesar 30,13%, mendekati target yang ditetapkan sebesar 30,12% atau tingkat pencapaian dikategorikan **SANGAT TINGGI**.

**B. Tujuan Misi II yaitu : Menumbuhkan Tingkat Perekonomian Daerah dan Masyarakat dengan indikator :**

❖ **Laju pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB ADHK);** diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB tahun ke -n di kurangi dengan nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100. Struktur PDRB menurut pengeluaran yang juga menggambarkan struktur perekonomian, belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Konsumsi rumah tangga masih merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi di Kabupaten Sabu Raijua. Capaian realisasi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yaitu 1,55% belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 2,55%. Kecilnya target dan capaian yang diperoleh lebih disebabkan oleh adanya faktor kondisi perekonomian yang belum stabil pasca pandemi covid-19. Namun demikian pencapaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 1,55% dengan tingkat pencapaian 60,78% masih dikategorikan **SEDANG**.

**1. Sasaran I dari Misi II ini adalah Menjamin kecukupan pangan, air dan energi menuju SARAI CUKUP dengan Indikator :**

**1.1. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pertumbuhan PDRB ADHK);** kategori ini mencakup segala perusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk di jual kepada pihak lain. Perusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsistem) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Capaian realisasi pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yaitu 4,02% belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 5,11%. Capaian yang diperoleh belum mencapai target lebih disebabkan oleh adanya faktor kondisi perekonomian yang belum stabil pasca pandemi covid-19. Namun demikian pencapaian pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan tingkat pencapaian 78,67% masih dikategorikan **SEDANG**.

**1.2. Skor pola pangan harapan;** Pola pangan harapan (PPH) ditunjukkan melalui skor dengan skor maksimal 100 artinya semakin beragam dan proporsional konsumsi pangan masyarakat maka skor PPHnya makin tinggi. Karena itu implementasi pola pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman ditingkat keluarga akan berdampak pada cakupan masyarakat yang

lebih luas sehingga mempengaruhi capaian skor PPH. Capaian realisasi skor PPH Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yaitu 10303% melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 65,18% atau dikategorikan **SANGAT TINGGI**.

**2. Sasaran II dari Misi II ini adalah Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL dengan Indikator :**

**2.1. Pertumbuhan kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK;**

lapangan usaha sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan PDRB ADHK mencakup penyediaan akomodasi dan makan minum dengan kontribusi tahun 2022 sebesar 4,15% dan lapangan usaha pada bidang real estate dengan kontribusi tahun 2022 mencapai 1,94%. Dengan demikian realisasi kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK sebesar 6,09% (4,15%+1,94%) melampaui target yang ditetapkan RPJMD sebesar 5,55% atau dikategori **SANGAT TINGGI**.

**3. Sasaran III dari Misi II ini adalah Meningkatnya perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU dengan Indikator :**

**3.1. Pertumbuhan sektor industri pengolahan (pertumbuhan PDRB ADHK);** merupakan salah

satu sektor perekonomian yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan ecar dari berbagai jenis barang dan memberikan imbalan jasa dari penjualan . Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2022 adalah 3,39% melampaui target yang ditetapkan RPJMD sebesar 1,67% atau dikategori **SANGAT BERHASIL**.

**3.2. PDRB per kapita;** merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang

tinggal di daerah tersebut, berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua terus mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun terakhir. Capaian realisasi PDRB per kapita Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yaitu 15,95 juta melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 15,20 juta atau dikategorikan **SANGAT BERHASIL**.

**3.3. Pengeluaran per kapita;** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota

rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan varitas daya beli atau keseimbangan daya belanja. Capaian realisasi pengeluaran per kapita Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yaitu 5,256 mendekati target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 5,641 atau dikategorikan **BERHASIL**.

**C. Tujuan Misi III yaitu : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik dan Birokrasi dengan indicator :**

❖ **Indeks kepuasan masyarakat;** merupakan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari unit penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kenyataan. Pengukuran dilakukan menggunakan kuesioner dengan sample dan responden dipilih secara acak, memperhatikan profil responden yang dapat mewakili keragaman usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan serta persyaratan bahwa responden pernah memiliki pengalaman secara langsung memperoleh jasa pelayanan publik. Obyek penilaian dilakukan pada 14 bidang pelayanan dengan nilai indeks tahun 2022 yang diperoleh mencapai rata-rata 91,39% atau mendapat nilai A (Sangat Baik). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan yakni mendapat nilai B (Baik). Namun demikian jika disandingkan dengan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 yang dilakukan oleh Ombudsman, Kabupaten Sabu Raijua mendapat nilai 44,46 dengan predikat D (Kualitas Rendah). Dan juga disandingkan dengan Indeks pelayanan publik tahun 2022 yang dilakukan oleh Kemenpan RB dengan hasil 2.28 dengan predikat C (Cukup dengan catatan), menunjukkan bahwa hasil capaian IKM yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat baik terhadap pelayanan publik tidak berbanding lurus dengan nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dan indeks pelayanan publik. Sehingga capaian IKM yang sudah diperoleh perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap prosedur dan tata cara perhitungan dalam pelaksanaan survei IKM kedepan.

**1. Sasaran I dari Misi III ini Meningkatnya integritas aparatur dalam pelayanan pemerintahan menuju SARAI JUJUR dengan Indikator :**

**1.1. Indeks Reformasi Birokrasi;** mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang kemudian di tuangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nnomor 20 Tahun 2010. Tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakter adaptif, berintegrasi, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur nagara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi aspek manajemen perubahan , deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Indikator ini diukur oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan menggunakan metode penilaian mandiri (PMPRB). Capaian realisasi indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yang dinilai oleh Kemenpan RB dengan indeks 41,68 atau predikat **C (Kurang)**, belum mencapai target yang

ditetapkan sebesar 61,00 atau tingkat pencapaiannya dikategorikan **SEDANG**. Perlu upaya dan kerja keras dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam meningkatkan reformasi birokrasi di tahun selanjutnya melalui perbaikan tata kelola reformasi birokrasi yang masif.

**2. Sasaran II dari Misi III ini Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah menuju SARAI TRANSPARAN dengan Indikator :**

**2.1. Opini BPK teradap Laporan Keuangan;** merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* artinya Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yg berlaku. Opini BPK teradap Laporan Keuangan tahun 2022 masih dalam proses pemeriksaan dan diharapkan tetap mendapat WTP sebagaimana tahun sebelumnya.

**2.2. Indeks pengelola keuangan daerah;** satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten sabu Raijua pada tahun 2022 telah dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai. Adapun enam indikator yang digunakan sebagai alat ukur yaitu : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kualitas anggaran belanja dalam APBD. Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat

bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan manfaat yang baik, sementara output yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan, Transparansi pengelolaan keuangan daerah, Penyerapan anggaran, Penyerapan anggaran merupakan suatu realisasi dari anggaran yang telah diagendakan pada satu tahun periode. Pada tahun 2022 realisasi penyerapan APBD Kabupaten Sabu Raijua diatas 85%, dengan capaian indeks pengelola keuangan daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 adalah 75, sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau dikategorikan **SANGAT TINGGI**

**3. Sasaran III dari Misi III ini Menciptakan Budaya kerja ASN dalam pelayanan menuju SARAI RAMAH dengan Indikator sebagai berikut**

**3.1. Persentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;**

upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat mencakup Penertiban Ternak dan Penertiban PKL, Kegiatan Operasi PEKAT, Kegiatan Monitoring Trantibum dan Patroli Wilayah, kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan PERDA dan PERKADA serta Penanggulangan dan Pengendalian kebakaran yang kesemuanya terlaksana dan terlayani secara baik di tahun 2022 dengan tingkat pencapaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, atau dikategorikan **TINGGI**.

**3.2. Presentasi aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat;**

upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam aksi tanggap darurat dan bencana bagi masyarakat mencakup Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Penanganan Pascabencana, Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana dan Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang kesemuanya terlaksana dan terlayani secara baik di tahun 2022 dengan tingkat pencapaian 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, atau dikategorikan **TINGGI**.

**D. Tujuan Misi IV yaitu : Meningkatnya Akses Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan dengan indikatornya sebagai berikut**

- ❖ **Rata-rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah kabupaten;** dalam rangka percepatan perkembangan wilayah didukung oleh indikator jalan Kabupaten dalam kondisi baik, jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, cakupan layanan persampahan, cakupan layanan air limbah , cakupan layanan air bersih. Perangkat daerah yang berkolaborasi dengan sasaran ini Dinas pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan hidup dan Dinas perumahan

rakyat. Capaian Rata-rata persentase jangkauan infrastruktur wilayah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 yaitu 75% sesuai target yang ditetapkan atau dikategorikan **TINGGI**.

**1. Sasaran I dari Misi IV ini Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Infrastuktur dengan Indikator:**

**1.1 Pertumbuhan sub sektor jasa konstruksi (pertumbuhan PDRB ADHK);** kategori konstruksi adalah kegiatan dibidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan pembangunan sipil. Baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan dengan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. Kontribusi sektor jasa konstruksi terhadap pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2022 adalah 7,53% melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,33% atau dikategori **SANGAT TINGGI**.

**2. Sasaran II dari Misi IV ini Terwujudnya Transportasi Lancar dengan Indikator :**

**2.1 Pertumbuhan sub sektor transportasi dan pergudangan (pertumbuhan PDRB ADHK);** Peran transportasi dan pergudangan sangat penting dan menjadi indikator dalam melihat kemajuan ekonomi suatu wilayah sub sektor trasportasi mempunyai peran penting dalam mobilitas perekonomian. Akan tetapi sektor ini khususnya sub sektor trasportasi sangat rentan terhadap tekanan yang berasal dari gejolak BBM. Selain itu kondisi jalan juga memiliki peranan yang penting dalam mobilitas perekonomian. Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2022 adalah 0,74% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,67% atau dikategori **SANGAT RENDAH**. Perlu upaya peningkatan sub sector ini dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB ADHK.

**3. Sasaran III dari Misi IV ini Meluasnya pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Indikator :**

**3.1 Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);** Dalam pengukuran indeks SPBE terdapat 34 indikator yang menjadi bahan evaluasi, indikator-indikator dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022 indeks SPBE Kabupaten Sabu Raijua sebesar 2,6, melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 1,56 atau dikategorikan **SANGAT TINGGI**.

**4. Sasaran IV dari Misi IV ini Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan Indikator :**

**4.1 Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);** Berdasarkan hasil pemantauan terhadap Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sabu Raijua, didapatkan hasil akhir perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan Point 70,79. Point tersebut merupakan capaian IKLH untuk tahun 2022, melampaui target yang ditetapkan yaitu 69 Point atau di kategorikan **SANGAT TINGGI**. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sabu Raijua tersebut dapat dikatakan berada pada kondisi baik berdasarkan penilaian sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021.

**5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin.

**A. Sumber Daya Manusia**

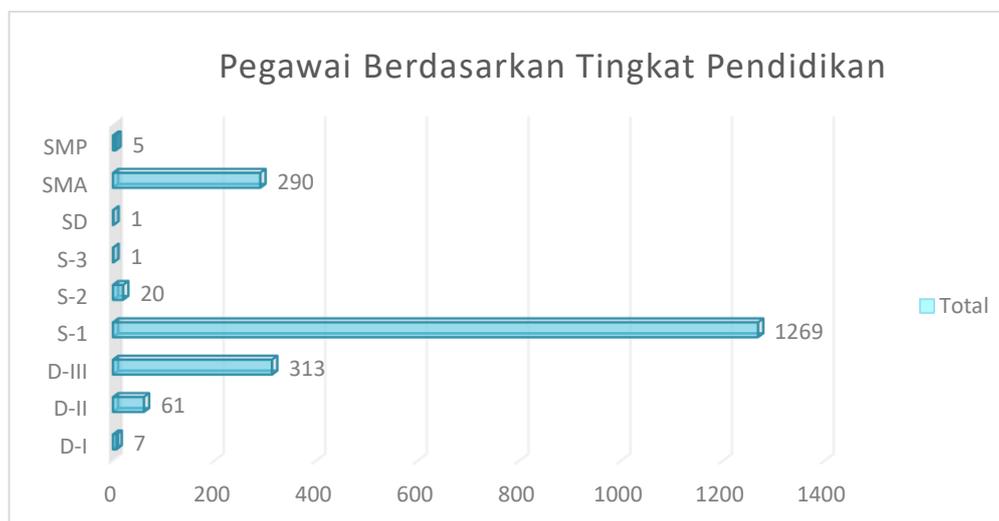
Salah satu sumber daya yang sangat besar perannya dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM PNS Kabupaten Sabu Raijua berjumlah 1.968 orang dengan komposisi menurut golongan didominasi golongan III sejumlah 1.371 orang (69,66%), golongan II sejumlah 385 orang (19,56%), golongan IV sejumlah 207 orang (10,52%) dan golongan I sejumlah 4 orang (0,20%).

**Diagram 3.2** Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, 2022



Selanjutnya untuk tingkat pendidikan Pegawai Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 di dominasi oleh pegawai yang berpendidikan DIV/S1 sebanyak 1.269 orang (64,48%) yang dapat dilihat pada diagram berikut:

**Diagram 3.3** Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, 2022



## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan sasaran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

### 1) Meningkatkan Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR

**Tabel 3.5** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Pengelolaan Pendidikan	1.1	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	86,94	86,94	Dinas PKKO
2	Pengembangan Kurikulum	1.2	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan local	%	100	100	100	Dinas PKKO
3	Pengendalian Perizinan Pendidikan	1.3	Persentase satuan pendidikan anak	%	30	45	150	Dinas PKKO

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
			usia dini yang terakreditasi					
4.	Pembinaan Perpustakaan		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	70,00	99,00	141,4	Dinas Perpus
5	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	60	10	16,66	Dinas PKKO
6	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.5	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	%	50	42	84	Dinas PKKO
7	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	%	45	22	48,88	Dinas PKKO

Tabel diatas menunjukkan dari 7 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Peningkatan Layanan Pendidikan Menuju SARAI PINTAR, terdapat 2 program yang tidak secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud yakni Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang hanya mencapai 16,66% dari target yang ditetapkan dan program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang hanya mencapai 48,88% dari target yang ditetapkan.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dengan Indikator Presentase Capaian SPM Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga berperan penting sebagai pembentukan kepribadian manusia. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan yaitu melalui kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SD, SMP dan PAUD kesetaraan, Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun, Pengembangan kurikulum pendidikan, Peningkatan akses dan mutu pendidikan non formal, peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan, Pengembangan sistem informasi dan

manajemen pendidikan, Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin, Pencapaian SPM Pendidikan dasar, peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2022 yaitu Kegiatan Pelatihan Kurikulum Merdeka yang diikuti oleh 101 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, Kegiatan Pektiohan Proktor dan Teknisi ANBK, Kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi, kegiatan pelatihan pendidik dan pengeola PAUD dan peningkatan penyediaan sarana prasarana penambahan ruang kelas baru, pembangunan ruang unit kesehatan sekolah, pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah, pembangunan rumah dinas kepala sekolah dan pengadaan mebel sekolah. Pada tahun 2022 capaian indikator persentase SPM Pendidikan mencapai target 86,94%.



**Gambar 3.1** Pelatihan Kurikulum Merdeka



**Gambar 3.2** Pelatihan Proktor dan Teknisi ANBK



**Gambar 3.3** Kegiatan Sosialisai Pendidikan Anti Korupsi



**Gambar 3.4** Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD



**Gambar 3.5** Pembangunan Fisik

**B. Analisis Program/Kegiatan Satuan Pendidikan yang telah menerapkan Kurikulum Muatan Lokal**

Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantab tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Keterampilan dalam konteks pembelajaran mata pelajaran di sekolah adalah usaha untuk memiliki keahlian yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Keahlian yang dimaksud juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang harus diasah melalui berbagai cara, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pembelajaran keterampilan. Secara khusus pendidikan berbasis kurikulum muatan lokal bertujuan agar peserta didik mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya daerah dimana siswa berada, memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan mengenai lingkungan daerah yang berguna bagi dirinya, masyarakat dan Negara, memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerah, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya daerah dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat

dan pemerintah daerah. Berdasarkan indikator persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum muatan local terdapat 77 Sekolah Dasar dan 24 Sekolah Mengengah Pertama yang sudah menerapkan kurikulum muatan local dalam pembelajaran di sekolah.



**Gambar 3.6** Kegiatan Proses Kegiatan Belajar Mengajar

### **C. Analisis Program/Kegiatan satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi**

Akreditasi sangat penting dilakukan untuk menilai kelayakan satuan pendidikan. Program akreditasi pada semua satuan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal (PNF), harus dipersiapkan dengan baik agar hasil akreditasinya dapat menjadi rujukan sebagai penyedia layanan pendidikan yang bermutu dan kedudukannya dapat dijadikan sebagai alat regulasi diri (*self-regulation*) agar satuan dapat mengenal dan memahami kekuatan dan kelemahannya. Juga sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan refleksi dan evaluasi bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Mengingat pentingnya akreditasi sebagai upaya menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, pada 2022, BAN PAUD dan PNF Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan akreditasi PAUD 77 Satuan pendidikan PAUD. Sementara satuan pendidikan PAUD 94 lembaga satuan PAUD. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan bahwa capaian akreditasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 45 persen di mana pada tahun 2021 mencapai 21 persen. Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga tetap diperlukannya koordinasi dan kolaborasi BAN PAUD dengan *stakeholder* termasuk organisasi mitra PAUD dan PNF dalam pendampingan kepada satuan PAUD, sehubungan satuan PAUD dan PNF memerlukan penguatan dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen terutama yang terkait dengan proses akreditasi satuan PAUD dan PNF di Kabupaten Sabu Raijua.



**Gambar 3.7** Kegiatan Monitoring Kelayakan dan Perizinan PAUD

**D. Analisis Program/Kegiatan Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

Pembangunan Literasi dalam Masyarakat Sabu Raijua berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya Kegiatan Perpustakaan Keliling di lokasi di kantor desa, Kecamatan , Sekolah dan tempat strategis lainnya masih banyak anak anak sekolah / masyarakat yang antusias untuk membaca buku buku yang ada pada mobil perpustakaan keliling guna menambak pengetahuan dan wawasan baru.

Ada juga Penambahan Buku Buku Baru tiap tahunnya sehingga bisa menambah pengetahuan baru dan menjawab kebutuhan / informasi baru yang anak anak sekolah / masyarakat , untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju sarai pintar.



**Gambar 3.8** Kegiatan hibah buku di perpustakaan kelurahan bolou

**E. Analisis Program/Kegiatan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**

Peran pemuda dalam pembangunan memiliki peran strategis sehingga perlu adanya pengembangan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kabupaten Sabu Raijua salah satunya memiliki potensi jumlah pemuda pada rentang usia 16-30 tahun pada tahun 2022 sebanyak 25.899 orang, atau sekitar 10,45% dari total jumlah penduduk sebanyak 247.741 orang di Sabu Raijua. Adanya potensi tersebut, menjadi salah satu kunci pembangunan yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Kabupaten Sabu Raijua dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. Upaya partisipasi yang dilakukan pemuda di Kabupaten Sabu Raijua saat ini hanya pada organisasi kepemudaan sebanyak 12 organisasi kepemudaan di Kabupaten Sabu Raijua. Pada skala Desa/Kelurahan peran pemuda juga masih dianggap minim, hal ini dikarenakan banyaknya anggapan dari masyarakat tentang peran pemuda yang masih belum banyak memberikan pendapat dalam kegiatan di desa/kelurahan sehingga kesempatan dalam partisipasi di kegiatan pembangunan masih sangat minim. Partisipasi pemuda dalam kegiatan masyarakat yang ada di Kabupaten Sabu Raijua yaitu 10%. Bentuk aktivitas partisipasi pemuda dalam kegiatan masyarakat yang biasa dilakukan oleh pemuda di Kabupaten Sabu Raijua yaitu berupa kegiatan bersih-bersih desa, berperan aktif dalam persiapan lomba tujuh belas agustus, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Biasanya dalam peran pemuda dalam kegiatan masyarakat banyak melibatkan organisasi pemuda terutama organisasi karang taruna di Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

**F. Analisis Program/Kegiatan kelompok olahraga masyarakat yang aktif**

Olahraga adalah kegiatan jasmani yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Olahraga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan manfaat berupa kesehatan dan kebugaran jasmani. Olahraga merupakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pembangunan olahraga di suatu daerah tentunya memiliki peran penting dalam kemajuan olahraga secara umum di Indonesia. Di Kabupaten Sabu Raijua kegiatan olahraga masih sangat kurang terutama olahraga yang berkaitan dengan permainan tradisional atau yang terkait dengan budaya lokal. Perlunya kerjasama antara Pemerintah Daerah, Dinas, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, KONI juga dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat Kabupaten Sabu Raijua sebagai salah satu upaya untuk mendorong perkembangan olahraga yang lebih baik.



**Gambar 3.9** Kegiatan Lomba Sepak Bola Pelajar

**G. Analisis Program/Kegiatan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan**

Praja Muda Karana yang lebih dikenal dengan Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Salah satu fungsi gerakan Pramuka adalah sebagai wadah untuk pembinaan kepada para siswa sebagai generasi penerus bangsa supaya memiliki karakter kuat serta memiliki jiwa kepemimpinan. Pramuka menjadi kegiatan menarik yang penuh dengan hal-hal positif. Bagi para siswa sekolah, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai sebuah kegiatan menarik dan menyenangkan. Beda halnya untuk orang dewasa, yang menjadi sarana pengabdian, begitu juga dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Lalu juga menjadi wadah untuk ikhlas mengabdikan diri tanpa pamrih. Setiap anggota merupakan alat bagi organisasi dan masyarakat, dimana setiap anggota Pramuka haruslah mempunyai andil dan peranan dalam setiap proses pembangunan serta manfaat untuk lingkungan sekitarnya maupun organisasi dimana mereka ikut terlibat didalamnya.



**Gambar 3.10** Kegiatan Pramuka

## 2) Meningkatkan Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT

**Tabel 3.6** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.1	Presentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM tingkat Kabupaten/Kota	%	100	100	100	Dinkes PP&KB
		1.12	Presentasi penduduk yang memanfaatkan layanan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	%	100	90	90	RSUD
2	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	2.1	Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik Pemerintah yang memiliki Tenang Kesehatan sesuai standar	%	100	28,57	28,57	Dinkes PP&KB
3	Sediaan Informasi, alat kesehatan dan makan minum	3.1	Presentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	%	100	100	100	Dinkes PP&KB
		3.2	Presentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang Bebas Dari Cemaran	%	100	92,30	92,30	Dinkes PP&KB
4	Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	4.1	Presentase Rumah Tangga Sehat	%	100	70,17	70,17	Dinkes PP&KB
5	Program pengendalian penduduk	5.1	Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,43	2,26	65,88	Dinkes PP&KB
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.1	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	46,98	47,50	101,11	Dinkes PP&KB
7	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	7.1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun	Umur / Tahun	23,0	23,0	100	Dinkes PP&KB

Tabel diatas menunjukkan dari 7 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Layanan Kesehatan Menuju SARAI SEHAT, terdapat 1 program yang tidak secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud yaitu program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan yang hanya mencapai 28,57% dari target yang ditetapkan.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapai sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis program/kegiatan Penduduk Yang memanfaatkan Layanan UKM Tingkat Kabupaten/Kota**

Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial meliputi 5 jenis pelayanan, yaitu promosi kesehatan; kesehatan lingkungan; kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; pelayanan gizi; dan pencegahan dan pengendalian penyakit. Dari target presentase 100% penduduk yang memanfaatkan layanan UKM, terealisasi sebesar 100 % dengan atribut berhasil.

Realisasi tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan program kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan diantaranya:

1. Jumlah kegiatan pelayanan promosi kesehatan yang dilaksanakan yakni kegiatan gerakan masyarakat dan kampanye makan sayur dan buah di tingkat sekolah dasar dengan capaian 100%.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan diantaranya kegiatan Deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), evaluasi pengelolaan limbah medis/LIMBAH MEDIS COVID-19 DI FASYANKES dan di masyarakat, inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) depot air minum di Kecamatan Raijua, monev program unit kesehatan kerja pos UKK Tk. Puskesmas, Monev Program Kesling Tk. Puskesmas dengan capaian realisasi 73%. Pengelolaan layanan kesehatan bagi ibu hamil dengan capaian presentasi sebesar 87,13% dengan sasaran 1.934 orang, sejumlah 1.685 orang yang mendapatkan layanan kesehatan. Sementara presentasi ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan sesuai standar memperoleh capaian 77,25 % dengan rincian target 1.846, jumlah yang mendapatkan pelayanan sebesar 1.426 orang. Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil diantaranya kegiatan Bimtek program kesehatan Reproduksi dan KB termasuk pencatatan dan pelaporan (BOK Kabupaten), orientasi kelas ibu (ibu hamil dan ibu balita) bagi tenaga kesehatan tingkat kabupaten (BOK KAB), Orientasi petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan reproduksi

bagi pasangan usia subur/calon pengantin tingkat kabupaten, penyediaan media cetak terkait upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), Pertemuan lintas sector pelayanan kesehatan peduli remaja tingkat kabupaten, kegiatan operasi timbang, pertemuan rutin bidang koordinator puskesmas, pengambilan vaksin TT dari Provinsi, Rapat Kerja Program Pelayanan Kesehatan (KIA-GIZI, Kesehatan Dasar dan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Khusus) di Provinsi, Monitoring dan evaluasi pemberian Tablet tambah darah pada remaja putri, pelaksanaan penyeliaan fasilitatif KIA bagi puskesmas TPMB dan Klinik, Pembinaan pelayanan *Antenatal Care*, Persalinan, *postnatal care* (PNC) dan bayi di Puskesmas, verifikasi pencatatan dan pelaporan komdat, simatneo dan MPDN Tingkat kabupaten/kota, belanja modal alat kesehatan berupa USG 2D Digital Telekonsultasi Puskesmas Ledebu dan Puskesmas Seba, Belanja Modal Laptop dan Belanja Modal Software Sistem Informasi Telekonsultasi Puskesmas Ledebu dan Puskesmas Seba. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dari target 1.758 bayi, yang mendapatkan pelayanan berjumlah 1.612 orang atau 91,70%. Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan target 18.227 anak, yang mendapatkan pelayanan sejumlah 17.230 orang atau mencapai 94,53%.

3. Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar, dari target capaian 8.645 terealisasi sebesar 7.354 orang yang mendapatkan pelayanan gizi atau mencapai 85,1 %.
4. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) berjumlah 543 orang dari target sebanyak 1.277 orang. Sementara Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana sejumlah 16 Kampung KB dari target 17 Kampung KB atau sebesar 94,1 %.
5. Persentase yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun target 100% dengan jumlah 8.645 balita, terealisasi 7.354 balita yang mendapatkan pelayanan gizi dengan capaian 85,1 %, meliputi kegiatan pelayanan gizi yang bersumber dari Dak Non fisik selama 12 bulan untuk 6 puskesmas dan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga dengan target 1 kegiatan, terealisasi 1 kegiatan, dengan capaian 100 %, meliputi kegiatan pertemuan orientasi kesehatan kerja dan olah raga sebanyak 1 kali kegiatan.

7. Persentase orang Usia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar dengan target 100% dan sasaran orang Usia 15-59 tahun 56.893 orang, terealisasi 40.042 orang Usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 70,38 % terdiri dari kegiatan pelayanan kesehatan terhadap orang usia produktif untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai target nasional, yaitu kegiatan deteksi dini factor PTM pada usia 15 tahun s.d 59 tahun sebanyak 1 kali di 10 desa.
8. Persentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar target 100% dan sasaran Warga Negara Usia 60 tahun ke atas 9289 orang, terealisasi 10511 Warga Usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 113,16 % terdiri dari kegiatan pelayanan kesehatan terhadap orang lanjut usia untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai target nasional, yaitu kegiatan deteksi dini factor PTM pada usia 60 tahun ke atas sebanyak 1 kali di 10 desa.
9. Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar target 100% dan sasaran Penderita Hipertensi 16.346 orang, terealisasi 2.953 Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 18,07 % terdiri dari kegiatan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan hipertensi untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai target nasional, meliputi kegiatan monev pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi di 6 puskesmas sebanyak 1 kali.
10. Persentase Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar target 100% dan sasaran Penderita Diabetes Melitus 199 orang, terealisasi 402 Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 202,01 % terdiri dari kegiatan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan DM untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai target nasional, meliputi kegiatan monev pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penderita DM di 6 puskesmas sebanyak 1 kali dan pengadaan stik pemeriksaan gula darah sebanyak 250 boks.
11. Persentase orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan layanan Kesehatan jiwa sesuai standar target 100% dan sasaran orang dengan Gangguan Jiwa Berat 76 orang, terealisasi 66 orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 86,84 % terdiri dari kegiatan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ untuk pencapaian target Standar Pelayanan

Minimal bidang Kesehatan sesuai target nasional, meliputi kegiatan pengambilan obat bagi orang dengan gangguan jiwa berat sebanyak 2 kali di Kupang.

12. Persentase orang Terduga TBC yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar target 100% dan sasaran orang Terduga TBC 158 orang, terealisasi 419 orang Terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 265,19 % terdiri dari kegiatan pelayanan kesehatan terhadap penderita TBC untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai target nasional, meliputi kegiatan pengadaan reagen TBC sebanyak 12 paket, kegiatan pertemuan Penguatan peran kader peduli TBC dalam Penemuan kasus TBC di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 1 kali di 6 kecamatan, pengadaan susu bagi penderita TBC sebanyak 540 dos, jasa petugas pengawas minum obat pada penderita TBC selama 6 bulan.
13. Persentase orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar target 100% dan sasaran orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) 2231 orang, terealisasi 1545 orang Terduga HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dengan capaian 69,25 % terdiri dari kegiatan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan resiko HIV untuk pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai target nasional, meliputi kegiatan pengadaan RDT tes HIV sebanyak 20 paket, kegiatan menev pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebanyak 1 kali di 6 Kecamatan, belanja hibah bagi komisi penanggulangan HIV/AIDS selama 12 bulan.
14. Persentase orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun target 100%, terealisasi 100 %, dengan capaian 61,56 %, terdiri dari kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang bersumber dari dana BOK Covid-19 selama 12 bulan untuk 6 puskesmas dan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB.
15. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular target 33 kegiatan, terealisasi 31 kegiatan dengan capaian 93,94 %, meliputi kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular yang bersumber dari Dak Non fisik selama 12 bulan untuk 6 puskesmas dan Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB

16. Jumlah masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun target 93.000, terealisasi 94.290 orang dengan capaian 100 %, meliputi honor pengelola keuangan JKN di 6 puskesmas selama 12 bulan, kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di 6 puskesmas selama 12 bulan, jasa pelayanan kesehatan bagi nakes di 6 puskesmas selama 1 tahun.

**B. Analisis Program/Kegiatan Penduduk yang memanfaatkan layanan UKP Rujukan Tingkat Lanjut**



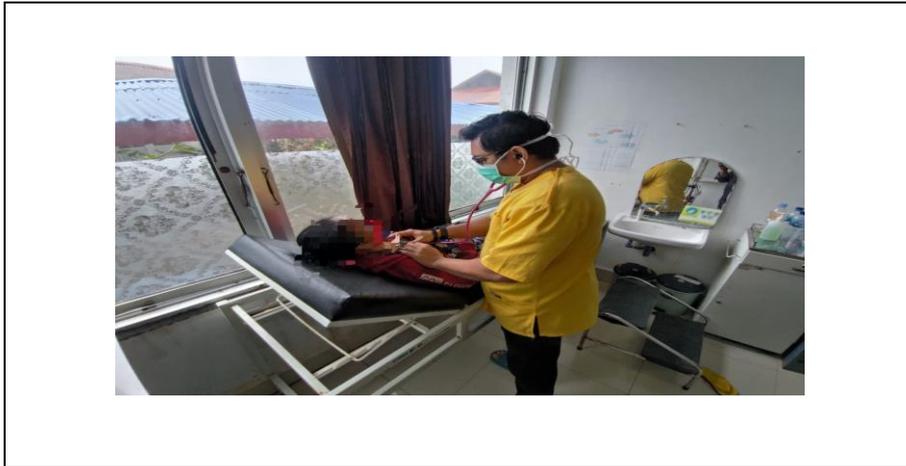
**Gambar 3.11** Pelayanan Dokter Spesialis Obgyn (Kandungan)



**Gambar 3.12** Pelayanan Dokter Spesialis Bedah



**Gambar 3.13** Pelayanan Dokter Spesialis Anak



**Gambar 3.14** Pelayanan Dokter Spesialis Penyakit dalam

**C. Analisis Program/Kegiatan Cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas Milik Pemerintah yang memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014, Ketenagaan Rumah Sakit Kelas D Pratama paling sedikit terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang kesehatan, dan tenaga non kesehatan. Dokter atau dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit Kelas D Pratama diantaranya harus menjadi Pimpinan Rumah Sakit Kelas D Pratama. Kebutuhan minimal ketenagaan baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Kelas D Pratama sebagai berikut:

**Tabel 3.7** Tenaga Pada Rumah Sakit Kelas D Pratama

No.	Jenis Tenaga	Jumlah Tenaga
<b>1</b>	Tenaga medis	
	Dokter/ Dokter dengan Kewenangan Tambahan	4
	Dokter Gigi	1
<b>2</b>	Tenaga Keperawatan	
	Perawat	2:3 Tempat tidur
	Bidan	2
<b>3</b>	Tenaga Kesehatan lain	
	Apoteker	1
	Tenaga Teknis Kefarmasian	2
	Radiografer	1
	Analisis Kesehatan	1
<b>4</b>	Tenaga Gizi	1
	Tenaga Penunjang Non Kesehatan	Sesuai Kebutuhan
<b>5</b>	Administrasi dan manajemen	Sesuai Kebutuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 pasal 21 bahwa dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi

masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan. Dari karakteristik wilayah kerjanya, Puskesmas di Sabu Raijua dikategorikan sebagai puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau, atau pesisir;
- b. akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam, dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca; dan
- c. kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak stabil.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan;
- b. Dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan;
- c. Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal;
- d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil;
- e. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas.

Standar Ketenagaan Puskesmas di kawasan terpencil dan sangat terpencil dengan kemampuan penyelenggaraan Rawat Inap, terdiri dari:

**Tabel 3.8** Standar Ketenagaan Puskesmas

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
1	Dokter atau dokter layanan primer	2
2	Dokter gigi	1
3	Perawat	8
4	Bidan	7
5	Tenaga Kesehatan Masyarakat	1
6	Tenaga Kesehatan Lingkungan	1

No.	Jenis Tenaga	Jumlah
7	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1
8	Tenaga Gizi	2
9	Tenaga Kefarmasian	1
10	Tenaga Administrasi	2
11	Pekarya	1
	Jumlah	27

Standar Kesehatan sebagaimana tersebut di atas merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik dan belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

Presentase cakupan Rumah Sakit dan Puskesmas milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang memiliki tenaga kesehatan sesuai Standar memperoleh capaian 28,57 % dari target 100 % atau dengan predikat kurang berhasil. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 rumah sakit dan 6 puskesmas yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, hanya RSUD dan Puskesmas Seba yang memiliki tenaga Dokter Gigi. Sementara tenaga kesehatan lainnya sudah terpenuhi sesuai standar kriteria ketenagaan tersebut di atas.

Ketenagaan di daerah tertinggal dan terpencil ditandai dengan rasio tenaga kesehatan per puskesmas yang lebih kecil, jangkauan desa terpencil yang lebih luas, dan proporsi pegawai PNS yang lebih sedikit, dukungan pustu yang lebih sedikit, harapan terhadap insentif yang sangat tinggi, serta rencana kepindahan yang lebih tinggi. Indikator ini dapat digunakan sebagai landasan perencanaan untuk pengembangan dan pemetaan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil. Hal yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada yakni dengan membuat perencanaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan Analisis Beban Kerja, pengangkatan/perekrutan PNS dan PPPK yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan di daerah.

#### **D. Analisis Program/Kegiatan Sarana Farmasi yang memenuhi standar**

Sarana Farmasi dapat diartikan sebagai sarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang memiliki fungsi: Ruang penerimaan/penyerahan resep, Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas, Ruang konseling, Ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis Pakai, serta Ruang arsip.

Presentase sarana farmasi yang memenuhi standar memiliki capaian 100 % atau dengan predikat berhasil dimana selain gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD dan 6 puskesmas juga telah memenuhi standar sarana pelayanan farmasi yang sesuai dengan ketentuan.

**E. Analisis Program/Kegiatan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang Bebas Dari Cemarkan**

Dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan melalui Pasal 46, ayat (3) diamanatkan bahwa Bupati/Walikota berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan siap saji dan pangan olahan hasil industri rumah tangga. Terkait dengan Pembinaan, PP No. 28/2004 Pasal 51, ayat (4) menyatakan bahwa Pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, maka Pemerintahan Daerah melalui Dinas Kesehatan memiliki peran melakukan perlindungan dan peningkatan kesehatan masyarakat dalam kegiatannya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pengawasan maupun pembinaan terhadap industri rumah tangga telah disusun dalam pedoman pelaksanaan Higiene Sanitasi industri rumah tangga. Pengawasan izin usaha dan hygiene sanitasi meliputi pemeriksaan kelayakan lingkungan tempat usaha, kelayakan alat untuk proses pengolahan makanan, bahan baku yang digunakan, serta izin dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang dimiliki oleh pelaku usaha berupa penerbitan sertifikat P-IRT.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 menargetkan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat tinggi dan hasil yang dicapai sebesar 92,3 % dengan predikat berhasil. Dari Target Pengawasan terhadap 13 Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga ditemukan bahwa terdapat 12 Produk Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemarkan sementara 1 Produk pangan olahan tercemar mengandung Bakteri E-Coli yang dapat menyebabkan kasus diare berat.

**F. Analisis Program/Kegiatan Rumah Tangga Sehat**

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam rangka pelaksanaan Program Indonesia

Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Kedua belas indikator utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator, mencerminkan kondisi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dari keluarga yang bersangkutan.

Peran Dinas Kesehatan sebagai pemilik Unit Pelaksana Teknis/Puskesmas adalah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 terpenuhi untuk semua Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam rangka pelaksanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki tiga peran utama, yakni: pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian. Peran Puskesmas dalam Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Melakukan pendataan kesehatan keluarga menggunakan Prokesga oleh Pembina Keluarga/ kader kesehatan; Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas; Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan; dan menyusun rencana Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas; Melaksanakan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah oleh Pembina Keluarga; Melaksanakan pelayanan profesional (dalam gedung dan luar gedung) oleh tenaga teknis/profesional Puskesmas; Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas. Kegiatan-kegiatan tersebut diintegrasikan ke dalam langkah-langkah manajemen Puskesmas yang mencakup P1

(Perencanaan), P2 (Penggerakan-Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan-Pengendalian-Penilaian).

Dari indikator kinerja pada tahun 2022, ditargetkan presentase Rumah Tangga Sehat sebesar 100 % dengan capaian realisasi sebesar 70,17 % atau dengan predikat cukup berhasil. Capaian tersebut ditunjukkan dari total 25.596 Rumah Tangga, terdapat 17.960 yang dikategorikan sebagai Rumah Tangga Sehat.

Keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga diukur dengan Indeks Keluarga Sehat, yang merupakan komposit dari 12 indikator. Semakin banyak indikator yang dapat dipenuhi oleh suatu keluarga, maka status keluarga tersebut akan mengarah kepada Keluarga Sehat. Sementara itu, semakin banyak keluarga yang mencapai status Keluarga Sehat, maka akan semakin dekat tercapainya Indonesia Sehat.

Belum maksimalnya capaian kegiatan dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan terus berupaya melalui kegiatan promosi kesehatan dengan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat menuju keluarga sehat.



**Gambar 3.15** Kegiatan Penyuluhan KHIBA (Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan anak)



**Gambar 3.16** Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

### **G. Analisis Program/Kegiatan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Peningkatan derajat kesehatan memiliki kaitan dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pemerintah memfasilitasi faktor kesehatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan jumlah penduduk Sabu Raijua kembali meningkat, dimana dari jumlah 89.320 jiwa pada Tahun 2020 menjadi 90.837 jiwa pada Tahun 2021. Sementara itu dari target capaian 3,41 %, laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2021 memperoleh capaian 2,04 %. Sedangkan target laju pertumbuhan penduduk pada Tahun 2022 sebesar 3,43 % dengan capaian 2,26 %. Meski demikian, angka ini juga berarti telah melewati batas ideal yang ditargetkan, sebanyak 1,1 persen per tahun. Berkenaan dengan angka pertumbuhan penduduk, kriteria laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: Laju pertumbuhan cepat, apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya.; Laju pertumbuhan sedang, apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1% – 2% setiap tahunnya; Laju pertumbuhan lambat, apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1% setiap tahunnya.

Dengan angka sebesar itu, semakin tinggi pula beban pemerintah dalam memfasilitasi hak kesehatannya. Untuk membantu mengurangi beban tersebut yakni dengan membatasi kelahiran. Pemerintah memiliki beberapa program untuk menekan tingkat kelahiran, salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB).



**Gambar 3.17** Kegiatan Orientasi Tim Pendamping Keluarga

### **H. Analisis Program/Kegiatan Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**

KB (Keluarga Berencana) adalah program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk,

membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena kehamilan yang tidak diinginkan ataupun jarak kelahiran yang terlalu dekat. Upaya dalam mendukung program tersebut yakni dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan menjarangkan atau mengatur jarak kelahiran.

Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi adalah untuk menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan, membantu tumbuh kembang anak, dan meningkatkan kualitas keluarga. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan terhadap peserta aktif KB agar tidak putus pakai. Selain itu, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga terus berupaya untuk meningkatkan presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR). Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan dana berupa biaya operasional program keluarga berencana untuk biaya distribusi alat kontrasepsi, biaya pergerakan serta visitasi fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan. Selain itu juga dijalankan program Gerakan Rumah Sakit Layanan Keluarga berencana (GEMA KENCANA) pada rumah sakit untuk dapat membantu masyarakat mengakses edukasi dan layanan program KB.

Target pemakaian Kontrasepsi Modern pada Tahun 2021 sebesar 56,44 % dengan realisasi 44,68%. Target di Tahun 2022 sebesar 56,79 persen mengalami peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 47,50% dengan capaian kinerja 102,75 %. Sementara capaian target jangka menengah adalah sebesar 104,46 dengan kategori keberhasilan sangat tinggi.

#### **I. Analisis Program/Kegiatan Median Usia Kawin Pertama Perempuan Seluruh Wanita Usia 25-49 Tahun**

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Metode Perhitungannya adalah Nilai tengah dari urutan usia kawin pertama pada perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun pada periode tertentu. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang penting.

Target median usia kawin pertama perempuan usia 25-49 Tahun adalah 23 Tahun dengan capaian pada tahun 2022 adalah 100%.

### 3) Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU

**Tabel 3.9** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1.	Pemberdayaan Sosial	1.1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	%	100	100	100	Dinsos P3A
2	Rehabilitasi Sosial	2.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	%	100	100	100	Dinsos P3A
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.1	Persentase Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	%	70,13	70,13	100	Dinsos P3A
4	Penanganan Bencana	4.1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan social (SPM)	%	100	100	100	Dinsos P3A
5	Pengurusan Keutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	5.1	Partisipasi Angkatan kerja perempuan	%	88,14	88,14	100	Dinsos P3A
6	Perlindungan Perempuan	6.1	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	Dinsos P3A
		6.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	1,34	1,34	100	Dinsos P3A

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
			(per 100.000 penduduk perempuan)					
7	Peningkatan Kualitas Keluarga	7.1	Persentase penduduk miskin	%	100	100	100	Dinsos P3A
8	Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	8.1	Pemenuhan Data SIGA OPD	%	100	100	100	Dinsos P3A
9	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	9.1	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak (PHA)	%	100	100	100	Dinsos P3A
10	Perlindungan Khusus Anak	10.1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	Dinsos P3A
11	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	11.1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,4	1,27	317,5	Dinas Nakertrans
12	Penempatan Tenaga Kerja	12.1	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab./kota	Persen	2,5	6,36	254,4	Dinas Nakertrans
13	Hubungan Industrial	13.1	Persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	Persen	5	19	380	Dinas Nakertrans
14	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	14.1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Kopera si	0,05	0,05	100	Dinas Nakertrans
		14.2	Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi	Persen	26	22,2	84,61	Dinas Nakertrans
15	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	15.1	Persentase Pemberdayaan UMKM	Persen	1,3	1,9	146,15	Dinas Nakertrans
16	Pemberdayaan Lembaga	19.1	Terwujudnya pemberdayaan	%	100	100	100	Dinas PMD

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
	Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat					

Tabel diatas menunjukkan dari 16 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Menuju SARAI MAMPU yang dilaksanakan secara lintas OPD (Dinas Sosial P3A, Dinas Transmigrasi KopUMKM dan Naker, Dinas PMD), semua program secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud dengan tingkat pencapaian paling rendah 84,61%.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapai sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**

Capaian pada indicator ini sebesar 100% dimana meningkatnya kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang diberdayakan guna mendukung program pemberdayaan sosial guna penyiapan data Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS).

**B. Analisis Program/Kegiatan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**

dengan capaian sebesar 100%, dilihat dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu tersalurkannya bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar dan disabilitas terlantar di 6 Kecamatan dan juga adanya kegiatan pendampingan bagi klien PMKS baik dalam daerah maupun untuk dirujuk ke Kupang.



**Gambar 3.18** Foto Penyaluran Bantuan Bagi Lansia dan Disabilitas Terlantar

**C. Analisis Program/Kegiatan Keluarga Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial**

dengan realisasi sebesar 100% yaitu dengan terlaksananya kegiatan pengentasan kemiskinan bagi keluarga lewat Program Keluarga Harapan untuk 10.021 KK dengan memanfaatkan Tenaga Penanganan Sosial yang ada (Pendamping dan Operator PKH, Pendamping TKSK, Operator SIKS-NG Kelurahan/Desa/Kabupaten) dan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga lewat kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan BBM bagi 749 KK.



**Gambar 3.19** Foto Penyaluran BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM

**D. Analisis Program/Kegiatan Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial**

dengan capaian sebesar 100% dimana disediakannya bantuan logistik berupa permakanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial (gula pasir, mie, ikan kaleng, minyak goreng) serta barang habis pakai lainnya (sabun, bantal, beras, selimut, spon, dan terpal) yang mana pada tahun 2022 semua korban bencana alam dan bencana sosial yang dilaporkan dapat terlayani dengan memanfaatkan SDM yang ada dan juga didukung TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA).



**Gambar 3.20** Foto penyerahan bantuan

**E. Analisis Program/Kegiatan Partisipasi Angkatan kerja perempuan**

dengan capaian realisasi sebesar 100% dimana pada tahun 2022 telah dilaksanakannya kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG bagi 45 Perangkat Daerah dengan melibatkan Narasumber dari Propinsi yang mana spesifik kegiatannya yaitu Sosialisasi dan Pelatihan PUG melalui PPRG, dan Pelatihan Teknis Implementasi PPRG bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan guna peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan.



**Gambar 3.21** Foto kegiatan sosialisasi dan pelatihan PUG

**F. Analisis Program/Kegiatan korban kekerasan perempuan yang terlayani**

dengan realisasi sebesar 100% dimana pada tahun 2022 semua kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk anak yang dilaporkan telah dilayani dan ditangani. Selain itu juga dilakukannya kegiatan Bimtek bagi Aktivistis PATBM Desa, Penyuluhan tentang melindungi anak dari kekerasan seksual, dan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).



**Gambar 3.22** Foto Kegiatan Bimtek Bagi Aktivistis PATBM



**Gambar 3.23** Foto Penjangkauan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

**G. Analisis Program/Kegiatan Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

dengan realisasi sebesar 100% yaitu dilaksanakannya kegiatan pertemuan koordinasi dan kerjasama lintas sector dalam upaya pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan juga pembuatan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) berupa leaflet, roll banner dan spanduk sebagai upaya menekan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.



**Gambar 3.24** Foto Kegiatan Pelatihan Manajemen Kasus

**H. Analisis Program/Kegiatan penduduk miskin**

dengan realisasi sebesar 100% dengan kegiatannya berupa kegiatan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak dan monitoring kelompok perempuan di 6 Kecamatan sebagai bentuk komunikasi informasi dan edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak .



**Gambar 3.25** Foto Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak

**I. Analisis Program/Kegiatan Pemenuhan Data SIGA OPD**

dengan realisasi sebesar 100% yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan data profil gender dan anak Kabupaten Sabu Raijua sebagai upaya pemenuhan data SIGA OPD.

**J. Analisis Program/Kegiatan Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

dengan realisasi sebesar 100% yaitu dilaksanakannya kegiatan penyusunan, konsultasi dan koordinasi, serta sosialisasi Ranperda Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan melibatkan organisasi pemerintah, non pemerintah, media, dan dunia usaha sebagai bentuk advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Selain itu juga dilakukan sosialisasi dan pembentukan forum anak Tingkat Desa/Kelurahan dan Sosialisasi Desa Layak Anak sebagai upaya komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak serta penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.



**Gambar 3.26** Foto Kegiatan Harmonisasi Ranperda KLA di Kanwil KEMENKUMHAM Propinsi



**Gambar 3.27** Foto Kegiatan Public Hearing Ranperda KLA



**Gambar 3.28** Foto Kegiatan Sosialisasi KLA/DLA

**K. Analisis Program/Kegiatan Anak Korban Kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**

dengan realisasi sebesar 100% dengan dilaksanakannya kegiatan pergerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTPA dan TPPO melalui penyuluhan ke Desa/Kelurahan, pembuatan leaflet dan roll banner sebagai bentuk promosi dan KIE, kegiatan pengembangan jejaring dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan KTPA dan TPPO, kegiatan Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO yang melibatkan organisasi keagamaan, lembaga profesi, dunia usaha, media dan lembaga masyarakat. Selain itu, juga dilakukan layanan tindak lanjut pengaduan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mana pada tahun 2022 semua laporan kasus kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti dengan dilakukan pendampingan dan penjangkauan korban baik dalam daerah maupun pendampingan rujukan ke luar daerah. Selain itu, guna meningkatkan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagai upaya penguatan dan pengembangan lembaga maka dilakukan juga kegiatan pelatihan manajemen dan penanganan kasus. Semua kegiatan tersebut merupakan upaya peningkatan persentase penanganan anak korban kekerasan sebagai bentuk perlindungan anak.



**Gambar 3.29** Foto kegiatan Sosialisasi Pencegahan KTP, KTA, dan TPPO



**Gambar 3.30** Foto Penjangkuan dan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

**L. Analisis Program/Kegiatan Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**

berjumlah 30 orang, Kegiatan Pelatihan ini terdiri dari Pelatihan Ketrampilan Meubeler berjumlah 15 orang dan Pelatihan Kecantikan 15 orang dengan total jumlah peserta pelatihan untuk tahun 2022 adalah 30 orang. Kegiatan pelatihan meubeler dilaksanakan di Art Meubel desa Tulaika Kec. Sabu Barat dan Pelatihan Kecantikan dilaksanakan di Jimmy Salon Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat. Capaian Kinerja tahun 2022 adalah 3,2%. Rendahnya capaian kinerja karena tidak berimbang antara jumlah tenaga kerja dan jumlah peserta pelatihan, hal ini disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.

**PELATIHAN MEUBELER  
TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**Gambar 3.31** Pelatihan Meubeler

**PELATIHAN KECANTIKAN  
TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**Gambar 3.32** Pelatihan Kecantikan

**M. Analisis Program/Kegiatan Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota**

Capaian Kinerja untuk Indikator ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Perluasan kesempatan kerja bagi 248 orang dilaksanakan dalam rangka Penanganan Inflasi (PMK 134 tahun 2022). Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pedesaan Pembuatan Parit Jebakan Air yang berlokasi di 8 titik yaitu desa Keduru, Eimadake, Tada, Raeloro, Raenyale, Eilogo, Tanajawa dan Pedarro dengan melibatkan 248 orang untuk 8 titik dimaksud.
- b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online. Tersedianya Informasi Pasar Kerja Online sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan kemampuan.
- c. Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri berjumlah 201 orang dari total pendaftar 316 orang.

Capaian Kinerja untuk indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan tahun 2022 adalah 25,4%.

Terjadinya ketimpangan disebabkan karena belum tersedianya pasar kerja dalam daerah Kabupaten Sabu Raijua dan kurangnya pemahaman penggunaan Kartu AK 1 (kartu kuning) bagi pencari kerja baik oleh pihak yang melaksanakan seleksi pencari kerja maupun para pencari kerja.

**KEGIATAN PADAT KARYA INFRASTRUKTUR PEDESAAN  
PEMBUATAN PARIT JEBAKAN AIR  
TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUATAHUN ANGGARAN 2022**



**Gambar 3.33** Kegiatan Padat Karya

**N. Analisis Program/Kegiatan Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan/PKB**

Capaian Indikator dilaksanakan melalui :

- a. Kegiatan Sosialisasi tentang pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial yang dilaksanakan di Gedung Gereja GBI Bukit Sion Seba Kota dengan peserta 40 orang berasal dari pengusaha dan pekerja.

**FOTO SOSIALISASI PENCEGAHAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL  
TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**Gambar 3.34** Sosialisasi Pencegahan Perselisihan

- b. Penyelesaian 2 kasus yang terjadi yaitu CV Ana Do Hawu Papua yaitu pengaduan oleh 4 orang pekerja karena upah pekerja tidak dibayar penuh, dan PT Trisna Karya yaitu pengaduan oleh 1 orang pekerja karena sisa upah pekerja yang belum dibayar.

Capaian Indikator kedua kegiatan adalah 38%.

**O. Analisis Program/Kegiatan koperasi yang berkualitas**

Penilaian Kesehatan Koperasi dilaksanakan untuk 5 Koperasi yang melaksanakan RAT, realisasi capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah 100%.

Kalau melihat jumlah koperasi secara keseluruhan yaitu 90, dengan jumlah koperasi aktif 22 dan tidak aktif 68, hal ini menggambarkan kurangnya keberhasilan / kegagalan. Ini disebabkan karena kepengurusan yang pasif dan tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi. Solusi yang dilakukan adalah pendampingan penyusunan laporan dan pembinaan kepada pengurus koperasi.

**P. Analisis Program/Kegiatan KSP/USP Koperasi yang diawasi**

Pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan bagi 20 Koperasi yang tersebar di 6 Kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua. Dengan realisasi capaian kinerja 8,7% . Namun ini masih kurang berhasil jika dibandingkan dengan total koperasi seluruh yaitu 90.

**Q. Analisis Program/Kegiatan Koperasi yang mengikuti Pelatihan untuk Koperasi.**

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Pengurus sebanyak 30 Orang dilaksanakan di Gereja Pniel Menia Kecamatan Sabu Barat, realisasi capaian kegiatan ini adalah 0,4%. Kurang berhasilnya indicator ini karena masih banyak koperasi tidak aktif disebabkan karena pengurus yang mengabaikan dan sama sekali tidak aktif lagi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh dinas yaitu melalui rapat teknis gerakan koperasi, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pelatihan manajemen koperasi.

**FOTO KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI**

**TAHUN 2022**



**Gambar 3.35** Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi

**R. Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja Persentase Pemberdayaan UMKM**

Capaian Indikator Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan bagi Pelaku UMKM terdiri dari 89 Individu dan 23 kelompok, kegiatan pameran UKM dan dekranasda, realisasi kegiatan ini adalah 1,9%.

**FOTO-FOTO PENYERAHAN DANA BANTUAN SOSIAL TAHUN 2022**



**Gambar 3.36** Penyerahan Bansos

**FOTO KEGIATAN PAMERAN UMKM**



**Gambar 3.37** Pameran UMKM

**S. Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil/ Menengah**

Capaian Indikator Kegiatan melalui pemberian bantuan alat dan bahan untuk kelompok UKM berjumlah 14 kelompok (48 orang) guna pengembangan usaha bidang perbengkelan motor, cetak batako, dan menjahit. Capaian Indikator kegiatan ini adalah 1,1%.

**T. Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya**

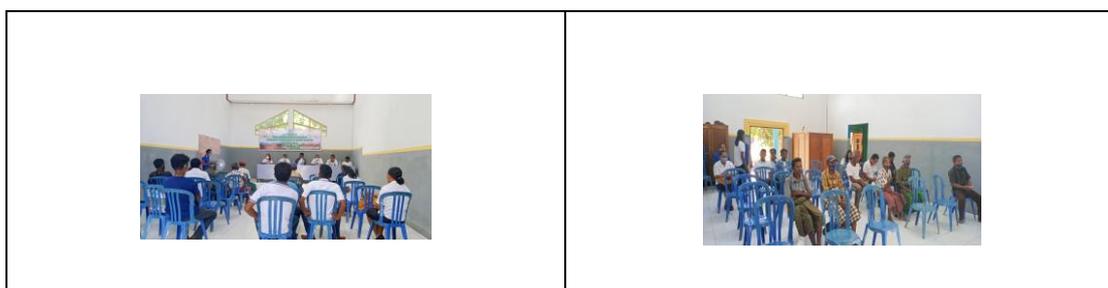
Capaian Indikator melalui pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Program Transmigrasi di desa Ledeke dan Waduwalla Kecamatan Sabu Liae dengan jumlah peserta masing-masing 25 orang. Capaian indikator kegiatan adalah 1 lokasi.

**“SOSIALISASI PROGRAM TRANSMIGRASI TINGKAT KAB. SABU RAIJUA TAHUN 2022 DESA  
LEDEKE – KECAMATAN SABU LIAE, 5 APRIL 2022”**



**Gambar 3.38** Kegiatan Sosialisasi Program Transmigrasi

**“SOSIALISASI PROGRAM TRANSMIGRASI TINGKAT KAB. SABU RAIJUA TAHUN 2022 DESA  
WADUWALLA – KECAMATAN SABU LIAE, 6 APRIL 2022”**



**Gambar 3.39** Sosialisasi Program Transmigrasi

**U. Analisis Program/Kegiatan pencapaian Kinerja Jumlah Satuan Pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya**

Capaian Indikator melalui Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta, Provinsi dan monitoring kawasan transmigrasi desa Loboaju. Capaian Indikator kegiatan ini adalah 1 lokasi yaitu desa Loboaju.

**V. Analisis Program/Kegiatan Mewujudkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan lembaga masyarakat hukum adat**

adalah Sebuah Organisasi kemasyarakatan , baik yang sengaja di bentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat dengan wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat.

Hukum adat adalah hukum adat di wilayah masyarakat adat yang masih benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan mereka sehari-hari, namun tidak bertentangan dengan hukum Nasional.

#### 4) Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP

**Tabel 3.10** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.1	Skor Pola Pangan Harapan	skor	65,18	65,20	100,03	Dinas Pertanian dan Pangan
2	Penanganan Kerawanan Pangan	2.1	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	5	0	500	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.1	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	%	71	67,12	94,53	Dinas Pertanian dan Pangan
5	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4.1	Presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	78	195,2	250	Dinas Pertanian dan Pangan
6	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	5.1	Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertanian	%	96	99,6	103,75	Dinas Pertanian dan Pangan
7	Penyuluhan Pertanian	6.1	Presentase Pertumbuhan kelompok tani	%	89	110	123,59	Dinas Pertanian dan Pangan
8	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	7.1	Produksi pertanian per hektar per tahun	%	86	130	151,16	Dinas Pertanian dan Pangan
9	Pengelolaan Perikanan Tangkap	10.1	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.596,16	1.781,38	111,60	Dinas Kelautan dan Perikanan
10	Pengelolaan Perikanan Budidaya	11.1	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	12.223,18	6.486,22	53,06	Dinas Kelautan dan Perikanan
11	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	71	132,3	186,33	Dinas Pertanian dan Pangan

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
12	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	13.1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	58,93	59,00	100,12	Dinas PUPR
13	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.1	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan Perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah Rumah Tangga	Persen	70,85	66,73	94,18	Dinas PUPR
14	Perekonomian dan Pembangunan	15.1	Terwujudnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	100	100%	Bagian Perekonomian
		15.2	Persentase Penyangangan SIRUP	%	100	100	100	Bagian Pembangunan

Data diatas menunjukkan dari 14 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Menjamin Ketercukupan Pangan, Air dan Energi Menuju SARAI CUKUP yang dilaksanakan secara lintas OPD (Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kelauran dan Perikanan, Dinas PUPR, Bagian Perekonomian dan Bagian Pembangunan), hampir semua program secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud dengan tingkat pencapaian rata-rata diatas 94%, hanya 1 program saja yang pencapaiannya dibawah target yang diharapkan yakni sebesar 53,06% yaitu program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikatornya Jumlah produksi perikanan budidaya.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapai sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Analisis Program/Kegiatan Skor Pola Pangan Harapan**

Indikator skor PPH tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target capaian skor PPH ketersediaan tahun 2022 sebesar 65,18 terealisasi 65,20 (100,03%)

- Dibandingkan terhadap capaian skor PPH ketersediaan tahun 2021, dari target 63,90 realisasi dengan score 63,90 (100%) menunjukkan capaian tahun 2022 lebih baik 0,03 % dari capaian tahun 2021.
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022, dari target skor PPH ketersediaan tahun 2022 sebesar 65,18 terealisasi 65,20 (100,03%).  
Bahwa capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan tahun 2022 yang mencapai target, juga berdampak terhadap capaian skor PPH konsumsi yang dihitung berdasarkan data susenas tahun 2022 mencapai 79,4%.

#### **B. Analisis Program/Kegiatan Desa Rawan Pangan**

Indikator desa rawan pangan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tahun 2022 desa rawan pangan diharapkan berkurang menjadi 5 desa, namun berdasarkan pemetaan daerah rawan pangan dengan instrumen peta kerentanan dan ketahanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA) terukur bahwa tahun 2022 disabu rajua tidak ada desa yang mengalami rawan pangan.
- Dibandingkan terhadap jumlah desa rawan pangantahun 2021, dari target 7 desa teridentifikasi 3 desa rawan pangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam upaya menekan desa rawan pangan tahun 2022 jauh lebih baik dari tahun 2021.
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022, diharapkan berkurang menjadi 5 desa. Berdasarkan pemetaan daerah rawan pangan dengan instrumen peta kerentanan dan ketahanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/ FSVA) terukur bahwa tahun 2022 disabu rajua tidak ada desa yang mengalami rawan pangan.

Bahwa berdasarkan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) terpetakan status krtahanan dan kerentanan pangan 63 desa/kelurahanebagai berikut :

- Status sangat tahan : 11 desa/keluran
- Status tahan : 40 desa/kelurahan
- Status agak tahan : 12 desa/kelurahan
- Status agak rentan/rawan :-
- Status rentan/rawan :-
- Status sangat rentan/rawan :-

#### **C. Analisis Program/Kegiatan Pangan Segar yang ditemukan dari Pengawasan Keamanan Pangan**

Indikator presentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target presentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan tahun 2022 sebesar 84%, namun tidak dilakukan pengawasan.
- Dibandingkan terhadap presentase pangan segar yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan tahun 2021 sebesar 82% yang juga tidak dilakukan pengawasan menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021 yaitu pengawasan pangan segar belum diberi perhatian.  
Pengawasan pangan segar asal tumbuhan pada tahun 2021 tidak dilaksanakan karena anggarannya mengalami refocusing sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sedangkan tahun 2022 anggaran terbatas sehingga tidak teranggarkan.

**D. Analisis Program/Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**

Indikator pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target pembangunan prasarana pertanian tahun 2022 yaitu 7 unit, terealisasi 9 unit (128,57%)
- Dibandingkan terhadap capaian pembangunan prasarana pertanian tahun 2021, dari target 17 unit terbangun 6 unit (35,29%) menunjukkan capaian tahun 2022 lebih baik dari capaian tahun 2021
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022 yaitu terbangunnya prasarana pertanian 107 unit, telah terealisasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 98 unit atau 97,03%.

Adapun 9 unit prasarana pertanian yang dibangun tahun 2022 terbangun dengan pembiayaan APBD Kabupaten Sabu Raijua 6 unit dan dukungan APBN (melalui kementerian pertanian) 3 unit; yaitu irigasi tanah dangkal 4 unit (lokasi desa Ledean, desa Nadawawi, desa Limaggu dan desa Menia), pembangunan Bank Pakan 1 unit di desa Raeloro, jaringan irigasi tersier 1 unit di desa Delo, UPPO 1 unit di desa Matei sertairigasi perpompaan 2 unit (desa Raekore dan desa Tada).

**E. Analisis Program/Kegiatan Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**

Indikator presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular tahun 2022 sebesar 33,16%, terrealisasi -83%.

- Dibandingkan terhadap presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menulartahun 2021 sebesar -93,9% menunjukkan bahwa capaian tahun 2022 lebih baik 10,9% dari capaian tahun 2021.
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022 yaitu presentase Penurunan Kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 33,16%, menunjukkan bahwa target tersebut tidak tercapai bahkan terjadi lonjakan kejadian dan kasus penyakit hewan menular.

Pada tahun 2022 terdapat 1.240 kasus penyakit hewan menular, didominasi oleh penyakit helminthiasis (cacingan pada ternak sapi, babi dan kambing), penyakit ORF (inveksi mulut pada ternak kambing, domba dan kuda), penyakit scabies (penyakit kulit pada ternak kambing) dan penyakit CRD (ngorok pada unggas).

Dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan penyakit menular ternak dari 2.137 kasus menjadi 1.240 kasus atau berkurang 897 kasus. Tingginya kasus penyakit menular ternak pada tahun 2021 dominan karena penyakit African Swine Fever (ASF).

#### **F. Analisis Program/Kegiatan Lahan Pertanian bebas bencana pertanian**

Indikator Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertaniantahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertanian tahun 2022 yaitu 60 %, terealisasi 99,6%
- Dibandingkan terhadap capaian Presentase Lahan Pertanian bebas bencana pertaniantahun 2021, dari target 50%, terealisasi 76,9% menunjukkan capaian tahun 2022 lebih baik 22,7% dari capaian tahun 2021
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022 yaitu Lahan bebas bencana pertanian60%, telah terealisasi 99,6%.

Bahwa luas lahan yang mengalami bencana pertanian (puso/gagal panen) sebesar 0,4% tahun 2022 adalah seluas 22 Ha dari total luas tanam 5.966 Ha pertanaman padi, jagung, kacang tanah dan kacang hijau.

#### **G. Analisis Program/Kegiatan Pertumbuhan kelompok tani**

Capain kinerja Indikator Presentase Pertumbuhan kelompok tani tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target PresentasePertumbuhan kelompok tanitahun 2022 yaitu 89%, terealisasi 110,2%

- Dibandingkan terhadap capaian Presentase Pertumbuhan kelompok tanitahun 2021, dari target 87%, terrealisasi 110,0% menunjukkan capaian tahun 2022 lebih baik 0,2% dari capaian tahun 2021
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022 yaitu Presentase Pertumbuhan kelompok tani 89% (671 kelompok tani), telah terealisasi738 kelompok (110,2%).

Bahwa pertumbuhan jumlah kelompok tani 110,2% tahun 2022 adalah meliputi 67 kelompok tani baru.

#### **H. Analisis Program/Kegiatan Produksi pertanian (padi, jagung, kacang hijau dan kacang tanah)**

Capain kinerja Indikator persentase produksi pertanian tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Target PresentaseProduksi pertanian pada tahun 2022 yaitu 100%, terealisasi 130,4%
- Dibandingkan terhadap capaian persentase produksi pertanian tahun 2021, dari target 100%, terrealisasi 90,9% menunjukkan capaian tahun 2022 lebih baik 39,5% dari capaian tahun 2021.
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022 yaitu persentase produksi pertanian 100%, terealisasi 130,4%.

Bahwa capaian persentase produksi pertanian pada tahun 2022 sebesar 130,4% merupakan akumulasi dari produksi komoditi padi, jagung, kacang hijau dan kacang sebesar 21.083,83 ton dari target 16.169 ton.

#### **I. Analisis Program/Kegiatan Produktivitas pertanian per hektar per tahun (padi, jagung, kacang hijau dan kacang tanah)**

Capain kinerja Indikator persentaseProduktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Target Presentase Produktivitas pertanian per hektartahun 2022 yaitu 100%, terealisasi 132,3%
- Dibandingkan terhadap capaian persentase Produktivitas pertanian pada tahun 2021, dari target 100%, terrealisasi 125,2% menunjukkan capaian tahun 2022 lebih baik 7,1% dari capaian tahun 2021.
- Dibandingkan terhadap target RPJMD sampai dengan tahun 2022 yaitu persentase produktivitas pertanian 100%, terealisasi 132,3%.

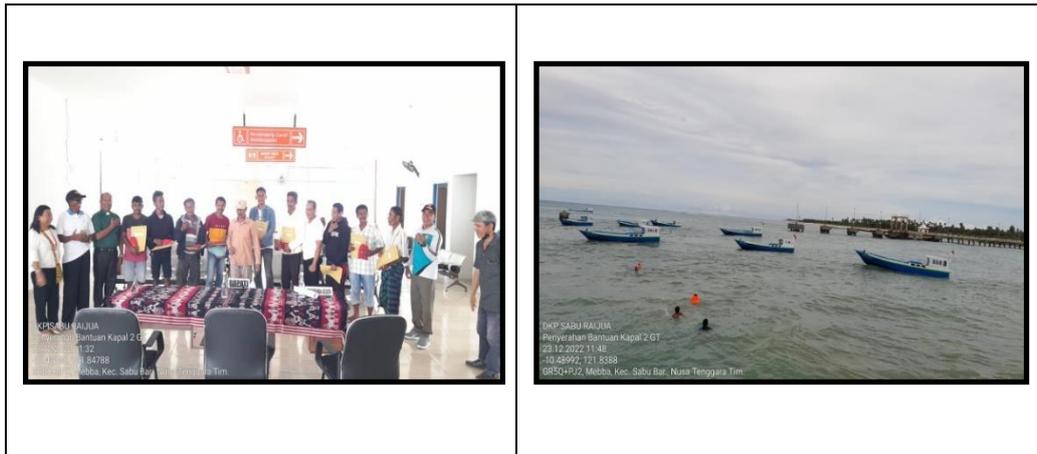
Bahwa capaian persentase Produktivitas pertanian pada tahun 2022 sebesar 132,3% merupakan persentase akumulasi dari Produktivitas komoditi padi, jagung, kacang hijau dan kacang sebesar 2,96 ton/ha dari target 2,47 ton/ha.

**J. Analisis Program/Kegiatan produksi perikanan tangkap**

Batas wilayah pesisir menurut keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2002 adalah wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi. Bahwa Sabu Raijua merupakan pulau kecil (luas  $460,845 \text{ km}^2 < 2.000 \text{ km}^2$ ) maka penduduknya hidup di wilayah pesisir.

Sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dapat dijelaskan pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Tolak ukur keberhasilan didasarkan pada 2 indikator yaitu (1) indikator peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap; dan (2) indikator peningkatan jumlah nelayan/kelompok.
- b. Indikator peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap terukur bahwa pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap meningkat menjadi 1.781,38 Ton, atau jika dibandingkan terhadap sasaran (target) produksi tahun 2022 sebesar 1.596,16 ton berarti terealisasi 111,60% sesuai tabel diatas.
- c. Bahwa untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :
  - 1) Bantuan fasilitas kapal penangkap ikan (kapal rawai 2 GT) sebanyak 11 Unit  
Bantuan fasilitas kapal penangkap ikan (kapal rawai 2 GT) sebanyak 11 Unit dengan presentase fisik dicapai 100%. Kapal yang diadakan didistribusikan untuk 11 kelompok di 5 Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Sabu Timur: Kelompok Satu Hati di Desa Bodae, Kelompok Pela'a Rui di Desa Bodae, Kelompok Helama Tona le II di Desa Eiada dan Kelompok Due Dahi di Desa Keliha 2) Kecamatan Hawu Mehara: Kelompok Tahe wene di Desa Lederaga, 3) Kecamatan Sabu Barat: Kelompok Helama Tona le di Kelurahan Mebba dan Kelompok Helama Tona le di Desa Delo, 4) Kecamatan Sabu Tengah: Kelompok Nedohevene di Desa Eimau dan Kelompok Hero Ngatta di Desa Jiwuwu, 5) Kecamatan Raijua: Kelompok Danniwalu di Desa Kolorae dan Kelompok Selat Raijua di Kelurahan Ledeke.



**Gambar 3.40** Bantuan Kapal Ikan 2 GT Fiber Glass Tahun 2022

- 2) Bantuan fasilitas kapal penangkap ikan (kapal rawai 1 GT DAK) sebanyak 24 Unit  
 Bantuan fasilitas kapal penangkap ikan (kapal rawai 1 GT DAK) sebanyak 24 Unit dengan presentase fisik dicapai 100%. Kapal yang diadakan didistribusikan untuk 24 kelompok di 6 Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Sabu Liae: Kelompok Muri Mada di Desa Waduwalla, Kelompok Berjuang di Desa Ledetalo, Kelompok Berkat di Desa Hallapaji dan Kelompok Putera Eilogo di Desa Eilogo, 2) Kecamatan Hawu Mehara: Kelompok Mira Pake di Desa Daieko, Kelompok Ami Tulu di Desa Ledea, Kelompok Cinta Damai di Desa Molie, Kelompok Helama Tona le di Desa Lohohede dan Kelompok Dohe Wene di Desa Lederaga, 3) Kecamatan Sabu Barat: Kelompok Tangguh di Desa Raemadia, Kelompok Lobo Kepaho di Desa Menia, Kelompok Ruba Deo di Kelurahan Mebba, Kelompok Unupala Mone Dahi di Desa Ledea, Kelompok Tunas Bahari di Desa Raeloro, 4) Kecamatan Sabu Timur: Kelompok Mira Kaddi di Kelurahan Limaggu, Kelompok Hemole di Kelurahan Bolou, Kelompok Mata Kera di Kelurahan Bolou dan Kelompok Loborahi di Desa Lobodei, 5) Kecamatan Sabu Tengah: Kelompok Cinta Kasih di Desa Bebae dan Kelompok Mata Miha di Desa Eimau, 6) Kecamatan Raijua: Kelompok Leokabi di Kelurahan Ledeu, Kelompok Uba Namu di Kelurahan Ledeke, Kelompok Ruba Muri di Desa Ballu dan Kelompok Eibego di Desa Kolorae.



**Gambar 3.41** Bantuan Kapal 1 GT DAK Tahun 2022

- 3) Kegiatan bantuan pukat monofilamen sebanyak 30 piece dengan presentasi realisasi fisik pengadaan sebesar 100 %. Sedangkan untuk pembagian ke kelompok masyarakat / nelayan dilaporkan sebagai berikut yang telah memasukan permohonan bantuan adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi penyaluran bantuan pukat monofilamen tahun 2022 sebanyak 17 piece.
  - b. Sisa stok pukat monofilamen yang akan didistribusi tahun 2023 sebanyak 13 piece.



**Gambar 3.42** Bantuan Pukat Monofilamen Tahun 2022

- 4) Kegiatan bantuan ketinting sebanyak 32 unit dengan persentase realisasi fisik pengadaan dicapai 100%. Sedangkan untuk pembagian ke kelompok masyarakat/nelayan dilaporkan sebagai berikut yang telah memasukan permohonan bantuan adalah sebagai berikut:
- a. Realisasi penyaluran bantuan ketinting tahun 2022 sebanyak 15 unit
  - b. Sisa stok ketinting yang akan didistribusi tahun 2023 sebanyak 17 unit
- Bantuan ketinting yang diadakan didistribusikan untuk 15 orang nelayan di 6 Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Hawu Mehara: Lazarus Hina Noy di Desa Wadumaddi, Darius Dona Hipa di Desa Daieko, Bernabas Hina di Desa Lederaga, 2) Kecamatan Sabu Timur: Djami Labba Gewe di Desa Kujiratu, Daud Lobo Rohi di Desa Bodae, Pape Mangngi di Desa Keliha, Aprianus Mengngi Wedjo di Kelurahan Bolou, 3) Kecamatan Raijua: Bernabas Pedu Tede di Kelurahan Ledeeunu, 4) Kecamatan Sabu Liae: Para Nada di Desa Deme, Yohanis Ratu Ke di Desa Raerobo, 5) Kecamatan Sabu Barat: Donsius Hina di Desa Raedewa, Bernad Aprilyadi Lari Manu di Desa Raemadia, 6)

Kecamatan Sabu Tengah: Februce Dubu di Desa Eimau, Lukas Luwu di Desa Bebae, Sem Wila di Desa Jiwuwu.



**Gambar 3.43** Bantuan Mesin Ketinting Tahun 2022

- 5) Kegiatan bantuan Fish Finder sebanyak 1 unit dengan persentase realisasi fisik pengadaan dicapai 100%, Fish Finder yang diadakan didistribusikan untuk 1 kelompok, yaitu Kelompok Asmara di Desa Bodae Kecamatan Sabu Timur.



**Gambar 3.44** Bantuan Fish Finder Tahun 2022

- d. Indikator peningkatan jumlah nelayan/kelompok tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran akibat keterbatasan anggaran.
- e. Bantuan provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 bidang perikanan tangkap adalah sebagai berikut: perahu motor ketinting sebanyak 2 unit nama penerima bantuan: Martinus Lodo Tarri Tido dan Melkianus Do Lalu di Desa Matei Kecamatan Sabu Tengah, Gill Net sebanyak 2 unit nama penerima: Ridolof Rohi Ke dan Heri Oktavianus Rade Heba di Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat, Cool box 100 Ltr sebanyak 7 unit nama penerima Thibutius Rohi Bengngu, Rendy Robert Puru, Melkianus Mengngi, Thobias Rohi Ke, Marince Bunga Alu, Adelita F. Kadja Ludji, Yunus Rade Heba.

- f. Bahwa dengan pencapaian indikator jumlah produksi perikanan tangkap yang diadakan 111,60 % (> 80 %) sebagaimana dijelaskan diatas, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) produksi perikanan tangkap dikategorikan BERHASIL.

**K. Analisis Program/Kegiatan produksi perikanan budidaya**

Sasaran meningkatkan produksi budidaya rumput laut dapat dijelaskan pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Tolak ukur keberhasilan didasarkan pada 2 indikator yaitu (1) indikator peningkatan jumlah produksi budidaya rumput laut; (2) indikator peningkatan jumlah pembudidaya rumput laut/kelompok.
- b. Indikator peningkatan jumlah produksi budidaya rumput laut terukur bahwa pada tahun 2021 produksi budidaya rumput laut 7.869,25 Ton dan pada Tahun 2022 menurun menjadi 6.486,22 Ton (53,06%) hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu sebagai berikut:
- Badai siklon tropis seroja tahun 2021 mengakibatkan produksi rumput laut menurun drastis;
  - Kondisi gagal panen terus-menerus dan harga bibit yang sangat mahal membuat sebagian besar petani rumput laut lebih memilih untuk tidak lagi aktif dalam kegiatan produksi;
- c. Bahwa untuk meningkatkan jumlah produksi budidaya rumput laut dan perbaikan pasca panen untuk perbaikan mutu produksi rumput laut maka pada tahun 2022 dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:
- 1) Bantuan pengadaan bibit rumput laut sebanyak 19.750 kg dengan persentase realisasi fisik pengadaan dicapai 100%. Bantuan bibit rumput laut yang diadakan didistribusikan untuk 25 kelompok di 5 Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Hawu Mehara: Kelompok Sari Laut di Desa Lohohede, Kelompok Lahai Ae di Desa Lohohede, Kelompok Hewene di Desa Lohohede, 2) Kecamatan Sabu Tengah: Kelompok Ana Rai di Desa Bebae, Kelompok Kale Mangngi di Desa Bebae, Kelompok Kale Muri Mada di Desa Bebae, 3) Kecamatan Raijua: Kelompok

Menanga Juli dan Kelompok Menanga Wara di Desa Bolua, Kelompok Dou Aga dan Kelompok Ruba Dara di Kelurahan Ledunu, 4) Kecamatan Sabu Liae: Kelompok Ruba Dara dan Kelompok Waji Wohe di Desa Waduwalla, Kelompok Ruba Dara Ama Dopereda dan Kelompok Dai le di Desa Ledeke, Kelompok Dahi Ae dan Kelompok Harapan Sama di Desa Hallapaji, Kelompok Mekar dan Kelompok Haba Dahi Hari di Desa Eilogo, 5) Kecamatan Sabu Timur: Kelompok Kamboja dan Kelompok Melati di Desa Keduru, Kelompok Wini Ray dan Kelompok Mara Dahi di Desa Bodae, Kelompok Dahi Dimu I, Kelompok Dahi Dimu II dan Kelompok Dahi Dimu III di Desa Huwaga.



**Gambar 3.45** Pengadaan Bibit Rumput Laut Tahun 2022

- 2) Bantuan pengadaan budidaya ikan lele sebanyak 6 unit dengan persentase realisasi fisik pengadaan dicapai 100%. Bantuan budidaya ikan lele yang diadakan didistribusikan untuk 6 kelompok di 5 Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Sabu Barat: Kelompok Banni Lowe di Desa Ledekpakka, 2) Kecamatan Sabu Timur: Kelompok Kasih Hidup di Desa Kujiratu, 3) Kecamatan Sabu Tengah: Kelompok Titu Hari di Desa Eimau, 4) Kecamatan Hawu Mehara: Kelompok Kasih Bunda di Desa Wadumaddi, 5) Kelompok Edelweis di Desa Molie, 6) Kecamatan Sabu Liae: Kelompok Mone Hab'ba di Desa Ledetalo



**Gambar 3.46** Pengadaan Budidaya Ikan Lele Tahun 2022

- 3) Bantuan pengadaan para – para penjemuran rumput laut sebanyak 10 unit dengan persentase realisasi fisik pengadaan dicapai 100%. Bantuan para-para penjemuran rumput laut yang diadakan didistribusikan untuk 10 kelompok di 4 Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Hawu Mehara: Kelompok Ana Pesisir di Desa Lohohede, 2) Kecamatan Sabu Liae: Kelompok Dai le di Desa Ledeke, dan Kelompok Jaga Hari di Desa Eilogo, 3) Kecamatan Raijua: Kelompok Kejobbo Huri di Kelurahan Ledeunu, Kelompok Lede Robuki di Desa Bolua, 4) Kecamatan Sabu Timur: Kelompok Neta Ruba di Desa Bodae, Kelompok Matiki I dan Kelompok Raemea di Desa Loborai, Kelompok Harapan Bolou di Kelurahan Bolou, Kelompok Kelokko Mahera di Desa Huwaga



**Gambar 3.47** Pengadaan Para-para Penejemuran Rumput Laut Tahun 2022

- 4) Bantuan pengadaan tali rumput laut 2 mm sebanyak 234 kg dengan presentasi realisasi fisiknya pengadaan sebesar 100%.

Sebaran distribusi tali ikat rumput laut adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Raijua:
  - Desa Bolua : Kelompok Jagga le
  - Kel. Ledeunu : Kelompok le Hari
- b. Kecamatan Sabu Liae:
  - Desa Waduwalla : Kelompok Rowi Muri
  - Desa Ledeke : Kelompok Ruba Dara Ama Dopereda
  - Desa Eilogo : Kelompok Mira Li
- c. Kecamatan Sabu Tengah:
  - Desa Bebae : Kelompok Penau Hari
- d. Kecamatan Sabu Timur:
  - Kel. Bolou : Kelompok Bolou Indah
  - Desa Keduru : Kelompok Mawar
  - Desa Bodae : Kelompok Wie Rono
  - Desa Lobodei : Kelompok Cinta Bahari

- Desa Huwaga : Kelompok Hadi Wie



**Gambar 3.48** Pengadaan Tali 2 mm dan 6 mm Tahun 2022

- 5) Bantuan pengadaan tali rumput laut 6 mm sebanyak 546 kg dengan presentasi realisasi fisiknya pengadaan sebesar 100%. Sebaran distribusi tali ikat rumput laut 6 mm sama dengan pembagian tali 2 mm.
- 6) Bantuan pengadaan bibit ikan lele sebanyak 10.000 ekor dengan presentasi realisasi fisiknya pengadaan sebesar 100%. Sebaran distribusi bibit ikan lele adalah sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Sabu Tengah:
    - Desa Eimadake : Kelompok Rae Hawu sebanyak 750 ekor dan Kelompok Bersatu Untuk Maju sebanyak 750 ekor
  - b. Kecamatan Sabu Timur:
    - Kel. Bolou : Kelompok Lileo sebanyak 500 ekor
    - Kel. Bolou : Kelompok Mandiri Sebanyak 500 ekor
    - Kel. Bolou : Kelompok Karang II Sebanyak 500 ekor
    - Kel. Bolou : Kelompok Ruba Muri sebanyak 500 ekor
    - Kel. Bolou : Kelompok Karang I sebanyak 500 ekor
    - Kel. Bolou : Kelompok Mangngi Helau sebanyak 500 ekor
    - Desa Lobodei : Kelompok Ruba Muri sebanyak 1.000 ekor
  - c. Kecamatan Hawu Mehara:
    - Desa Lobohede : Kelompok Fatule'u sebanyak 1.000 ekor
  - d. Kecamatan Sabu Barat:
    - Desa Roboaba : Kelompok Daigama sebanyak 500 ekor
    - Desa Roboaba : Kelompok Kololie sebanyak 1.000 ekor
    - Desa Menia : Kelompok Ei Mada Mali'a sebanyak 1.000 ekor
    - Desa Menia : Kelompok Bole Ballo sebanyak 1.000 ekor



**Gambar 3.49** Bantuan Pengadaan Bibit Ikan Lele Tahun 2022

7) Bantuan pengadaan paket budidaya ikan nila sebanyak 10.000 ekor dengan presentasi realisasi fisiknya pengadaan sebesar 100%. Sebaran distribusi paket budidaya ikan nila untuk 1 kelompok yaitu kelompok Mata Liya di Desa Loboaju Kecamatan Sabu Tengah.



**Gambar 3.50** Bantuan Pengadaan Budidaya Ikan Nila Tahun 2022

d. Indikator Kinerja Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten / kota dapat dijelaskan pencapaiannya sebagai berikut:

1. Jumlah data perikanan yang tersedia target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%, yaitu data base budidaya rumput laut untuk Kecamatan Sabu Tengah dan Kecamatan Sabu Liae.
2. Indikator Kinerja Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten / kota merupakan indikator yang dipengaruhi oleh Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai RPJMD 2021 – 2026.
3. Tolok ukur keberhasilan didasarkan pada indikator jumlah data perikanan yang tersedia.

Bahwa dengan pencapaian indikator jumlah data perikanan yang tersedia adalah 100 % (> 80 %) sebagaimana dijelaskan diatas, maka capaian Indikator dikategorikan BERHASIL.

- e. Bahwa dengan pencapaian sasaran peningkatan produksi perikanan budidaya 53,06% sebagaimana dijelaskan diatas, maka capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) produksi perikanan budidaya dikategorikan KURANG BERHASIL.

**L. Analisis Program/Kegiatan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain : Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang disusun direalisasikan sebanyak 4 dokumen perencanaan Pekerjaan Embung Tahun 2022 di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Hawu Mehara dan 3 dokumen pengawasan pekerjaan embung tahun 2022 dikecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Barat.
- b. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun direalisasikan sebanyak 1 dokumen perencanaan pekerjaan bangunan tembok pengaman pantai tahun 2022 di Kecamatan Sabu Liae.
- c. Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun dengan target 3 unit dapat direalisasikan sebanyak 3 unit embung dikecamatan Raijua, Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Barat.
- d. Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun dengan panjang target 190 meter dapat direalisasikan sebanyak 185 Meter di desa menia kecamatan sabu barat
- e. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun terdiri dari Dokumen perencanaan irigasi sebanyak 5 dokumen dilokasi Kecamatan Sabu Barat, 3 dokumen pengawasan pembangunan bendung dan jaringan irigasi dilokasi kecamatan sabu barat, 1 dokumen Reviu Data Base jaringan irigasi di Kabupaten Sabu Raijua, 1 dokumen Perencanaan Epaksi di Kabupaten Sabu Raijua.

- f. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun dengan target 1000 Meter dapat direalisasikan sebanyak 977 Meter di 3 daerah irigasi Kecamatan Sabu Barat.
- g. Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi dengan target 16 unit dapat direalisasikan sebanyak 16 unit jaringan irigasi di Kabupaten Sabu Raijua dalam kondisi baik.

**M. Analisis Program/Kegiatan Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap air minum melalui SPAM**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun dapat direalisasikan sebanyak 2 dokumen yaitu reuiu rispam sabu raijua tahun 2022 s/d 2027 dan dokumen perencanaan pembangunan air bersih di 6 lokasi yaitu Pengembangan SPAM Delo, Pengembangan SPAM Wadumedi, Pengembangan SPAM Raekore, Pembangunan SPAM Tada dan Perluasan Jaringan SPAM Eimadakaba, Perluasan Jaringan SPAM Tanajawa.
- b. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan monitoring dan pengawasan pembangunan jaringan Air Bersih Tahun 2022. Capaian indikator kinerja sebesar 35,65% disebabkan karena Penyedia terlambat mengajukan permohonan pencairan namun pekerjaan telah selesai dan dilakukan PHO oleh PPK.
- c. Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Pembangunan SPAM dikawasan perdesaan dengan target 124 Sambungan Rumah dapat direalisasikan sebanyak 124 Sambungan Rumah berlokasi di Desa Roboaba dan Desa Eilode.
- d. Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu dapat direalisasikan sebanyak 11 SR di Desa Jiwuwu Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena Penyedia terlambat mengajukan permohonan pencairan namun pekerjaan telah selesai dan dilakukan PHO oleh PPK.
- e. Jumlah unit SPAM yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan dapat direalisasikan sebanyak 6 SPAM terdiri dari SPAM Lokoeimada, SPAM Bebae, SPAM keduru, SPAM Jiwuwu SPAM Menia dan SPAM Depe. Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai

100% disebabkan karena adanya perubahan harga satuan barang asesoris perpipaan

- f. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dapat direalisasikan sebanyak 2 lokasi yaitu Desa Pedaro, Desa Eiada dengan jumlah rumah tangga terlayani sebanyak 50 Rumah tangga.

**N. Analisis Program/Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian**

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian meliputi beberapa Sub Kegiatan antara lain:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang terserap sebesar **100%** sehingga dikategorikan dalam kriteria **BERHASIL**, dimana pada target capaian kinerja menghasilkan 2 (dua) dokumen yaitu Laporan Audit Keuangan PD Rai Hawu Tahun Anggaran 2022. Dan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang terserap sebesar **100%** sehingga dikategorikan dalam kriteria **BERHASIL**. Kegiatan-kegiatan yang menggambarkan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD antara lain :



**Gambar 3.51** Penyerahan dan Pemeriksaan Dokumen

**Keterangan :** Penyerahan dan Pemeriksaan Dokumen Hasil Audit Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Rai Hawu Per 31 Desember 2021, yang dilaksanakan oleh Pak I Gede Oka, SE, Ak, MM, CPA, CA kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua.

- b. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian untuk Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian terserap **100%** sehingga dikategorikan **BERHASIL**.

Kegiatan-kegiatan yang menggambarkan Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian antara lain :



**Gambar 3.52** Kegiatan Monitoring

**Keterangan foto :** *Kegiatan Monitoring Distribusi BBM dari Kapal tanker Inneke 01 ke Mobil Tanki untuk Penyaluran ke APMS dan SPBU Kompak Seba di Pelabuhan Seba Kecamatan Sabu Barat yang dilakukan oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Kabupaten Sabu Raijua.*



**Gambar 3.53** Rapat Koordinasi

**Keterangan Foto :** *Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Dalwas BBM dengan Pengelola SPBU di Kabupaten Sabu Raijua (kiri) dan Rapat Koordinasi Tim Dalwas BBM dengan sub penyalur BBM subsidi di Kabupaten Sabu Raijua (kanan).*



**Gambar 3.54** Monitoring Distribusi

**Keterangan foto :** Kegiatan Monitoring Distribusi BBM di SPBU Roboaba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua.



**Gambar 3.55** Monitoring Pengisian

**Keterangan foto :** Kegiatan monitoring pengisian BBM Bersubsidi dari SPBU ke Sub Penyalur yang lokasinya belum terdapat Penyalur BBM (SPBU)



**Gambar 3.56** Monitoring Pelayanan

**Keterangan foto :** Kegiatan Monitoring Pelayanan BBM ditingkat sub penyalur di Desa Bodae, Kecamatan Sabu Timur.



**Gambar 3.57** Kegiatan Tim Pengendalian dan Pengawasan

**Keterangan foto :** Kegiatan Tim Pengendalian Dan Pengawasan BBM Kab. Sabu Raijua dalam upaya penertiban penggunaan BBM bersubsidi (operasi penertiban penimbun BBM bersubsidi di desa Raemadia dan Roboaba).

- c. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan realisasi capaian kinerja mencapai **100%** yang digambarkan dengan kegiatan-kegiatan antara lain :



**Gambar 3.58** Rapat Pleno

**Keterangan Foto1 :** Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan High

*Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab. Sabu Raijua Kerjasama Bagian Perekonomian Daerah dengan Bank Indonesia Kupang, Otoritas Jasa Keuangan NTT dan Biro Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT*



**Gambar 3.59** Kegiatan Literasi dan Edukasi

**Keterangan foto 2 :** Literasi dan Edukasi Keuangan Kepada Masy. Desa Eilode, Kec. Sabu Tengah, kerjasama Bag. Perekonomian Dan SDA Kab. Sabu Raijua dengan BI Perwakilan Nusa Tenggara Timur, OJK Provinsi NTT dan Bank NTT Cabang Sabu Raijua

**O. Analisis Program/Kegiatan Penyanggahan SIRUP**

Indikator Persentase Penyanggahan SIRUP bertujuan untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif sesuai kebijakan pengadaan barang/jasa yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pada tahun 2022 realisasi penyanggahan RUP sebesar 100% artinya 39 Perangkat Daerah di Kabupaten Sabu Raijua

seluruhnya mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Data rincian penayangan RUP dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.11** Rincian penayangan RUP pada aplikasi SIRUP Tahun 2022

NO	OPD	PENYEDIA		SWAKELOLA		TOTAL	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU
1	Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan	30	467	39	6.466	69	6.934
2	Badan Keuangan Daerah	97	1.014	89	109.044	186	110.059
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17	575	7	356	24	931
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	332	25	3.697	36	4.029
5	Bagian Administrasi Pembangunan	15	247	10	845	25	1.092
6	Bagian Hukum	16	179	15	571	31	750
7	Bagian Kesejahteraan Rakyat	15	855	12	1.695	27	2.550
8	Bagian Organisasi	13	109	10	377	23	487
9	Bagian Pemerintahan	19	356	13	583	32	940
10	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	23	187	16	424	39	611
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15	463	4	279	19	742
12	Bagian Umum	49	2.436	32	17.973	81	20.409
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	23	2.898	47	2.014	70	4.912
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	1.091	5	1.865	25	2.957
15	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	130	9.960	136	47.938	266	57.898
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	1.406	77	2.988	84	4.394
17	Dinas Lingkungan Hidup	16	158	26	1.836	42	1.994
18	Dinas Pariwisata	41	2.944	21	2.080	62	5.025
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	142	123.710	103	8.217	245	131.927
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	20	392	27	3.581	47	3.973
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Perindustrian dan Perdagangan	22	1.362	41	2.827	94	6.188
22	Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	184	14.390	77	134.015	261	148.406
23	Dinas Perhubungan	25	1.162	22	2.125	47	3.288
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	270	19	1.600	36	1.870
25	Dinas Pertanian dan Pangan	66	2.712	35	6.615	101	9.327
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19	257	22	4.896	41	5.154
27	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	67	1.218	70	4.631	137	5.850
28	Dinas Transmigrasi Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	26	717	19	4.132	45	4.850
29	Inspektorat Daerah	21	261	20	2.824	41	3.085
30	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	24	161	29	1.828	53	1.989
31	Kecamatan Hawu Mehara	21	343	11	1.547	32	1.890

NO	OPD	PENYEDIA		SWAKELOLA		TOTAL	
		PAKET	PAGU	PAKET	PAGU	PAKET	PAGU
32	Kecamatan Raijua	24	489	7	2.738	31	3.227
33	Kecamatan Sabu Barat	27	209	7	2.587	34	2.797
34	Kecamatan Sabu Liae	3	38	25	1.498	28	1.536
35	Kecamatan Sabu Tengah	23	240	12	1.529	35	1.769
36	Kecamatan Sabu Timur	22	287	23	3.222	45	3.509
37	Rumah Sakit Umum Daerah	87	10.969	39	10.852	126	21.822
38	Satuan Polisi Pamong Praja	13	494	15	4.097	27	4.591
39	Sekretariat DPRD	26	4.383	58	17.176	84	21.559
<b>TOTAL</b>		<b>1.436</b>	<b>189.741</b>	<b>1.265</b>	<b>423.568</b>	<b>2.731</b>	<b>615.321</b>

**Keterangan : Data pagu ditampilkan dalam satuan juta rupiah**

Data penyedia berdasarkan metode pengadaan sebagai berikut :

- Pengadaan Langsung : 1.290 Paket
- Epruchasing : 53 Paket
- Tender : 93 Paket
- Total : 1.436 Paket

a. Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimuat dalam RUP akan diproses oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen berdasarkan metode pengadaan. Pencapaian terhadap pelayanan pengadaan barang/jasa dengan metode tender/seleksi yang dilakukan oleh kelompok pemilihan (Pokmil) dapat dirinci sebagai berikut :

- Jasa Konstruksi terdapat 71 Paket (DAK 26 Paket dan DAU 45 Paket )
- Jasa Konsultasi terdapat 15 Paket (DAU)
- Jasa Lainnya terdapat 2 Paket (DAU)
- Pengadaan Barang terdapat 5 Paket (DAK 2 Paket dan DAU 3 Paket )

#### **KEGIATAN PENYANGGAN RUP PADA APLIKASI SIRUP TA.2022**



**Gambar 3.60** Penyanggan SIRUP

## KEGIATAN POKJA PEMILIHAN



**Gambar 3.61** Kegiatan Pokja Pemilihan

- b. Hasil pemilihan paket pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pokja Pemilihan dilanjutkan monitoring oleh Bagian Administrasi Pembangunan agar menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku baik itu dari OPD pelaksana maupun terhadap pihak ketiga

## KEGIATAN MONITORING PEMBANGUNAN



**Gambar 3.62** Kegiatan Monitoring Pembangunan

- c. Pelaksanaan Program/Kegiatan setiap OPD selama tahun 2022 dievaluasi kinerjanya setiap triwulan baik itu yang bersumber dari DAK maupun DAU

## RAPAT EVALUASI REALISASI ANGGARAN



**Gambar 3.63** Rapat Evaluasi Realisasi Anggaran

## 5) Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL

**Tabel 3.12** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.1	Persentase Obyek desetinasi wisata yang dikembangkan	%	54,39	40,79	75,00	Dinas Pariwisata
2	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Jumlah Total PDRB	%	5,55	11,6	209,01	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindung Hak Kekayaan Intelektual	3.1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD ( IKK Outcome )	%	0,01	0,0047	4,7	Dinas Pariwisata
4	Pemasaran Pariwisata	4.1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara perkebangsaan	%	100	100	100	Dinas Pariwisata
5	Pengembangan Kebudayaan	5.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Keg	12	3	25	Dinas PKKO
6	Pengembangan Kesenian Tradisional	6.1	Cakupan gelar seni budaya	%	35	75	214	Dinas PKKO
7	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	7.1	Terlestarikannya cagar budaya	%	45	95	211	Dinas PKKO

Data diatas menunjukkan dari 7 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Berkembangnya Sektor Pariwisata Menuju SARAI BEAUTIFULL yang dilaksanakan secara lintas OPD (Dinas Pariwisata, Dinas PKKO), terdapat 2 program yang tidak secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud yaitu program Pengembangan Kebudayaan dengan capaian 25% dan program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindung Hak Kekayaan Intelektual dengan capaian hanya sebesar 4,7%.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan Obyek destinasi wisata yang dikembangkan**

Capaian indikator obyek destinasi wisata yang dikembangkan sebagai berikut:

- Terhadap target 2022, dari target 54,39% ( 12 obyek ) terealisasi 40,79 % (9 obyek) atau 75%;
- Terhadap capaian 2021, menunjukkan bahwa capain tahun 2022 sebesar 75% lebih rendah dari capaian 2021 sebesar 100%.
- Terhadap capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2022, dari target 84,21 terealisasi 73,68 % atau 87,49 %.

Bahwa capaian target 2022 hanya sebesar 75%, karena anggaran yang tersedia dalam DPA untuk Pengembangan 9 Obyek Wisata atau 75% dari target 12 Obyek Wisata.

Adapun obyek – obyek destinasi yang dikembangkan tahun 2022, sesuai dukungan anggaran yaitu:

- Pekerjaan penyelesaian Taman Doa
- Pekerjaan Pembangunan Lopo Beton di Obyek Wisata Pantai Kepo
- Penataan Obyek – obyek yang menjadi titik kunjungan Festival Kelabba Madja yaitu Kelaba Madja, Kampung Adat Namata, Pantai Hewau, Gua Mabala, Kampung Adat Kudji Ratu, Pantai Nyiwudu, dan Pantai Raemea.

**B. Analisis Program/Kegiatan Kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK**

Lapangan Usaha Sektor Pariwisata yang menjadi alat ukur dalam PDRB yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Serta Sektor Informasi dan Komunikasi.

Capaian indikator Persentase Kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK sebagai berikut;

- Terhadap target 2022, dari target 5,55% terealisasi 11,6% atau tercapai 189,23 %;
- Terhadap capaian 2021, menunjukkan bahwa capain tahun 2022 lebih baik secara signifikan yaitu tercapai 11,6 % dibanding tahun 2021 sebesar (-19,55%) atau 209,01%.
- Terhadap capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2022, terealisasi 183,23%
- Capaian kinerja indicator kontribusi lapangan usaha sektor pariwisata yang mendukung PDRB ADHK 189,23 % adalah berhasil.

**C. Analisis Program/Kegiatan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD ( IKK Outcome )**

Capaian indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD sebagai berikut;

- Terhadap target 2022 dari target 0,01 % terealisasi 0,0047 % atau tercapai 4,7 %;

- Terhadap capaian 2021, menunjukkan bahwa capain tahun 2022 lebih tinggi.
- Terhadap capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2022, dari target 0,10 % hanya dapat direalisasikan 0,0047 %.

Adapun Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,25% dari adanya pendapatan penggunaan aula/homestay/lopo pada Lokasi obyek wisata pantai Napae sebesar Rp. 2.500.000.

Bahwa sesuai skala pengukuran ordinal penilaian capaian kinerja pada 3.4, dapat dinyatakan bahwa pencapaian indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kurang berhasil .

#### **D. Analisis Program/Kegiatan Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara**

Capaian indikator Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara sebagai berikut;

- Terhadap target 2022, tercapai 100 %;
- Terhadap capaian 2021, menunjukkan bahwa capain tahun 2022 lebih tinggi.
- Terhadap capaian target RPJMD sampai dengan tahun 2022, terealisasi 100%.

Bahwa pada tahun 2021 sebagai akibat adanya bencana non alam pandemic covid 19 maka tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara, dan terjadi penurunan kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata. Pada tahun 2022 terdapat 11 kunjungan wisatawan mancanegara yaitu dari Negara Italia 2 orang, Negara Australia 8 orang dan Belanda 1 orang.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik pada tahun 2022 adalah 68.524 orang, jumlah kunjungan ini meningkat jauh dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2021 yaitu berjumlah 37.574 orang. Peningkatan Kunjungan wisatawan yang terjadi pada tahun 2022 terutama dipengaruhi oleh adanya event Festival Kelabba Madja II.

Bahwa sesuai skala pengukuran ordinal penilaian capaian kinerja pada Tabel 3.4, dapat dinyatakan bahwa pencapaian indicator Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara adalah **berhasil** .

#### **E. Analisis Program/Kegiatan Penyelenggaraan festival seni dan budaya**

Festival seni dan budaya merupakan rangkaian festival atau pertunjukan seni budaya di daerah yang menyajikan berbagai bentuk karya seni dan budaya berskala lokal, nasional, atau internasional dengan kekhasan masing-masing. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan tradisi khususnya di Kabupaten Sabu

Raijua dan merupakan ajang melestarikan dan mengenalkan seni dan budaya khususnya pada generasi muda sebagai pewaris dan penerus seni dan budaya daerah.

**F. Analisis Program/Kegiatan Cakupan gelar seni budaya**

Gelar seni budaya merupakan salah satu sarana yang baik dalam melestarikan dan memperkenalkan potensi budaya yang dimiliki oleh daerah. Pada tahun 2022 kegiatan gelar seni budaya yang dilaksanakan yaitu lomba sejumlah tarian seni budaya dan permainan rakyat. Kegiatan gelar seni budaya juga sebagai wujud nyata dan upaya pelestarian, pengembangan dan sekaligus mempromosikan seni dan budaya serta mendorong peran pelaku seni, sanggar budaya untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitasnya dalam meningkatkan kualitas seni budaya.



**Gambar 3.64** Lomba Tarian Seni Budaya dan Permainan Rakyat.

**G. Analisis Program/Kegiatan Melestariakan cagar budaya**

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Mengingat adanya perubahan paradigma cagar budaya, diperlukan aspek keseimbangan ideologis, akademisi, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada Tahun 2022 capaian indikator terlestarikannya cagar budaya mencapai 211 pesen. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan

monitoring dan pendokumentasian ritual adat dan kegiatan rutin pembayaran insentif kepada 47 orang Dewan Mone Ama dan 9 Orang Juru Pelihara Situs.



**Gambar 3.65** Kegiatan Pembayaran Insentif Dewan Mone Ama, Juru Pelihara Situs dan Ritual Adat.

## 6) Meningkatkan Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU

**Tabel 3.13** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.1	Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten	%	100	391	391	Dinas PMPTSP, PERINDAG
2	Promosi Penanaman Modal	2.1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	%	10,50	16,67	159	Dinas PMPTSP, PERINDAG
3	Pelayanan Penanaman Modal	3.1	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	%	100	151	151	Dinas PMPTSP, PERINDAG
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	4.1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian	%	100	106	106	Dinas PMPTSP, PERINDAG

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
			Penanaman Modal					
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten	%	78	108	138	Dinas PMPTSP, PERINDAG
6	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.1	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya	%	100	97,22	97,22	Dinas PMPTSP, PERINDAG
7	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	7.1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya	%	100	100	100	Dinas PMPTSP, PERINDAG
		7.2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	20	29,04	145	Dinas PMPTSP, PERINDAG
8	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	8.1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	1,54	1,11	72,08	Dinas PMPTSP, PERINDAG

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
9	Perencanaan dan Pembangunan Industri	9.1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	%	7,86	8,56	109	Dinas PMPTSP, PERINDAG

Data diatas menunjukkan dari 9 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran peningkatan Perekonomian Daerah Menuju SARAI MAJU yang dilaksanakan oleh Dinas PM-PTSP Perindag, hampir semua program secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud dengan tingkat pencapaian paling rendah 72,08% yakni pada program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapai sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Analisis Program/Kegiatan peningkatan Investasi di Kabupaten

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja diatas menjelaskan bahwa indikator presentase peningkatan investasi di Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 terealisasi sebesar 391% dari target 100% atau mengalami peningkatan sebesar 327,9% dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan usahanya sehingga terdata setiap usaha dan menunjukkan peningkatan investasi di Kabupaten Sabu Raijua.



**Gambar 3.66** Kegiatan Bimtek LKPM 2022

**B. Analisis Program/Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**

Pada tahun 2022, indikator ini terealisasi 16,50% dari target 10,50% atau mengalami penurunan tahun sebesar 16,63% dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya beberapa promosi yang tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dan sebagai usaha Pemerintah akan melakukan promosi baik itu melalui pameran maupaun secara online dan juga dalam bentuk buku atau media lain yang bisa digunakan dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal pada Kabupaten Sabu Raijua.

**C. Analisis Program/Kegiatan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal**

Indikator ini terealisasi 151% dari target 100%, atau mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 101,7% dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin usaha.

**D. Analisis Program/Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengendalian**

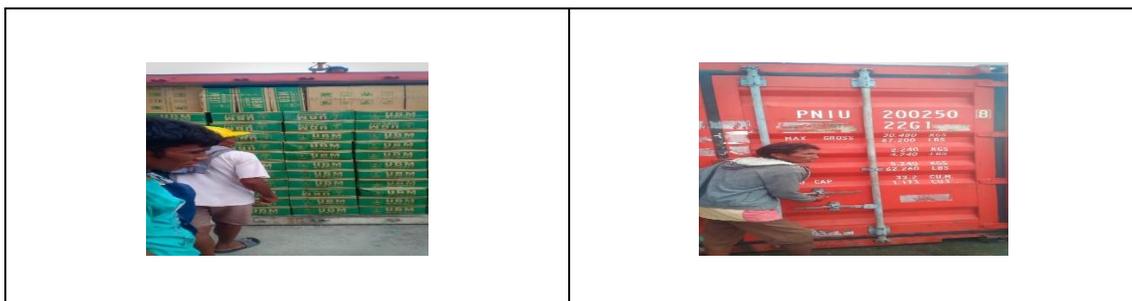
Indikator ini terealisasi sebesar 106 % dari target 100% dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 3 % dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya upaya pemerintah dnegan memantau, membina dan mengawasi setiap kegiatan pelaku usaha dalam secara terintegrasi melalui sosialisasi/ bimtek OSS maupun LKPM dalam rangkah peningkatan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengendalian Penanaman modal.

**E. Analisis Program/Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Kabupaten**

Indikator ini terealisasi sebesar 108% dari target 78%, atau mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 3% dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin usaha.

**F. Analisis Program/Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan di wilayah Kerjanya**

Indikator ini terealisasi sebesar 97,22% dari target 100% dan mengalami penurunan di Tahun 2022 sebesar 1,67%. Hal ini disebabkan karena ada salah satu pasar yang mengalami kerusakan oleh karena seroja sehingga sarana dan prasarana pasar berkurang.



**Gambar 3.67** Kegiatan Tol Laut

**G. Analisis Program/Kegiatan obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya**

Indikator ini terealisasi sebesar 100% dari target 100% atau persentasenya sama dengan tahun 2021, karena kegiatan pengawasan untuk barang beredar dan pemantauan harga dilaksanakan sesuai target.



**Gambar 3.68** Kegiatan Pasar Murah 2022

**H. Analisis Program/Kegiatan Kinerja Realisasi Pupuk**

Indikator ini terealisasi sebesar 29,04% dari target 20% dan mengalami penurunan sebesar 70% dari tahun 2021, hal ini disebabkan adanya alokasi kuota pupuk bersubsidi ke masyarakat mengalami pengurangan kuota.

**I. Analisis Program/Kegiatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**

Indikator ini terealisasi sebesar 1,11% dari target 1,54% dan mengalami peningkatan sebesar 0,57% dari tahun 2021, karena pendataan UTTP dari jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang pada tahun 2022 sebanyak 360 unit dan terealisasi sebanyak 4 unit. Sedangkan pada tahun 2021 hanya sebanyak 2 unit.

**J. Analisis Program/Kegiatan pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)**

Indikator ini terealisasi sebesar 8,56% dari target 7,86% dan mengalami peningkatan sebesar 1,2% dari tahun 2021, karena tercapainya sasaran pembangunan industri rumah tangga dan pembangunan lainnya dalam kabupaten.



**Gambar 3.69** Pembangunan Industri

## 7) Meningkatkan Integritas Aparatur Dalam Pelayanan Pemerintah Menuju SARAI JUJUR

**Tabel 3.14** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Integritas Aparatur Dalam Pelayanan Pemerintahan Menuju SARAI JUJUR

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.1	Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ tepat waktu	Kategori	Tinggi	Tinggi	100	Bagian Pemerintahan
		1.2	Terwujudnya Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	Bagian Kesra
		1.3	Presentase Produk Hukum Daerah yang difasilitasi.	%	100	100	100	Bagian Hukum
2	Dukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	2.1	Presentase Aspirasi Masyarakat dalam pokok – pokok pikiran DPRD yang selaras dengan sasaran RPJMD	%	25,53	25,31	99,14	SETWAN
		2.2	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP	Kategori	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	SETWAN
3	Program Kepegawaian Daerah	3.1	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	%	100	100	100	BKDPP
		3.2	Presentase Keterisian Jabatan	%	100	100	100	BKDPP
		3.3	Presentase keterpenuhan Formasi ASN	%	100	100	100	BKDPP
		3.4	Penetapan Perkada Manajemen ASN	%	100	100	100	BKDPP
4	Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.1	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	100	100	100	BKDPP
		4.2	Presentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan	%	100	0	0	BKDPP

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
			Pelatihan Struktural					
5	Penyelenggaraan Pengawasan	5.1	Presentasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	100	100	100	IRDA
		5.2	Cakupan Perangkat Daerah yang di audit	%	100	100	100	IRDA
6	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6.1	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	IRDA
7	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.1	Tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	Kecamatan Sabu Liae, Sabu Timur, dan Sabu Barat
8	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.1	Persentase Tk Desa/ Kelurahan berkembang	%	100	100	100	Kecamatan Sabu Liae, Sabu Timur, dan Sabu Barat
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9.1	Terwujudnya program penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	%	100	100	100	Kecamatan
10	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.1	Terwujudnya program-program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	Kecamatan
11	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	11.1	Presentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	Kantor Kesbangpol
12	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Lembaga Politik dan Pengembangan	12.1	Presentase Pemilih Pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	100	100	100	Kantor Kesbangpol

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
	Etika serta Budaya Politik							
13	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	13.1	Presentase organisasi kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	100	100	Kantor Kesbangpol
14	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	14.1	Presentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	Kantor Kesbangpol
15	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	15.1	Presentase konflik sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi yang ditangani	%	100	100	100	Kantor Kesbangpol
16	Pengelolaan Arsip	16.1	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban	Persen	80,00	74,00	92,5	Dinas Perpus&Ke arsipan
17	Pendataan Desa	17.1	Presentase usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa yang disetujui	%	100	100	100	Dinas PMD
18	Administrasi Pemerintahan Desa	18.1	Presentase desa dengan kriteria (cepat berkembang)	%	24,14	24,14	100	Dinas PMD
		18.2	Presentase desa yang menetapkan perdes tentang Keudes	%	100	100	100	Dinas PMD

Data diatas menunjukkan dari 19 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Peningkatan Integritas Aparatur Dalam Pelayanan Pemerintah Menuju SARAI JUJUR yang dilaksanakan secara lintas OPD (Bagian Prokopim, Bagian Pemerintahan, Bagian Kesra, Bagian

Hukum, Setwan, BKDPP, IRDA, Kecamatan, Kantor Kesbangpol, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas PMD), hampir semua program secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud dengan tingkat pencapaian diatas 92,5%. Namun terdapat 1 program yang kegiatannya tidak terlaksana atau dengan pencapaian 0% yakni program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi ASN.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapai sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan Penyusunan Dokumen LPPD, LKPJ tepat waktu**

Sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Publik yang profesional dan mewujudkan Birokrasi yang bersih efisien, efektif dan akuntabel, dapat dijelaskan pencapaiannya sebagai berikut: Tolak ukur keberhasilan didasarkan pada indikator terkait prosentase meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang profesional dan mewujudkan Birokrasi yang bersih efisien, efektif dan akuntabel dalam hal ini di fokuskan pada pengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan mengukur kinerja pemerintahan daerah meliputi program/kegiatan sebagai berikut :

- Laporan Capaian Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dengan target 3 Dokumen dan tersealisasi 3 Dokumen kegiatan ini adalah:



Gambar 3.70 Penyusunan Dokumen

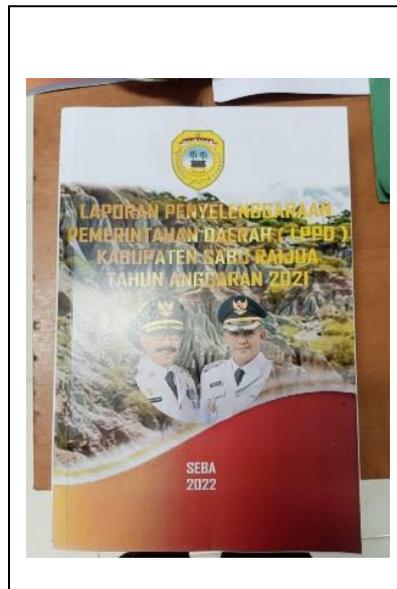
Koordinasi penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2021

- ✓ Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 :



Gambar 3.71 Dokumen LKPJ

- ✓ Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Bupati Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 :



**Gambar 3.72** Dokumen LPPD

#### **B. Analisis Program/Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

1. Jumlah kegiatan pengelolaan Bina Mental Spritual dengan target kegiatan 6 (enam), semua kegiatan yang teralisasi dengan capaian sebesar 99,71% yakni kegiatan Natal Korpri Tahun 2022, Pemberian Dana Hiba Kepada Lembaga Penerima Bantuan yakin, Kegiatan Pesparawi ( LPPD), Kegiatan Musa Batilawatil Qur'an (MTQ), Kegiatan Pesparani ( LP3K ), pemberian bantuan sapi qurban dari Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua untuk masyarakat Muslim dalam rangka perayaan Idhul Adha 1442 H, dan Kegiatan Dana Hiba Kepada Panitia Sidang SINODE GMIT XXXV.

#### **Perayaan Natal Korpri**



**Gambar 3.73** Perayaan Nata Korpri

**Foto Penyerahan Bantuan Sapi Qurban dari Sekretaris Daerah Kab. Sabu Raijua  
Kepada Ketua MUI Kabupaten Sabu Raijua.**



**Gambar 3.74** Penyerahan Bantuan Sapi Qurban

2. Jumlah lembaga penerima bantuan dana hibah adalah sebanyak 4 (empat) lembaga yakni Lembaga Pengembangan Tilawil Quran ( LPTQ), Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (LPPD), Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik ( LP3K), dan Pemberian Hibah kepada Panitia Penyelenggara Sidang Sinode GMIT XXXV Tahun 2023, 4 (empat ) lembaga ini dapat realisasikan sebesar 100 %.

**Foto Kegiatan Lembaga Penerima Dana Hibah  
Perparawi Tk Nasional (LPPD)**



**Gambar 3.75** Kegiatan Lembaga Dana Hibah

**MusaBakti Qur'an (MTQ)**



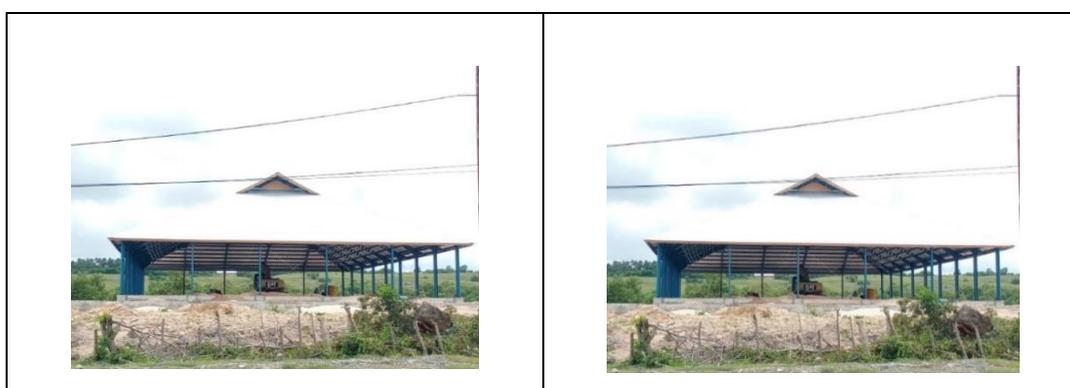
**Gambar 3.76** MusaBakti Qur'an

**Foto Kegiatan Pesparani Tk Provinsi di Kupang ( LP3K)**



**Gambar 3.77** Kegiatan Pesparani

**Sinode GMIT XXXV**



**Gambar 3.78** Pembangunan Gedung Sinode

3. Jumlah kegiatan evaluasi kebijakan terkait kesejahteraan sosial dengan target kegiatan 5 (lima), dapat direalisasikan sejumlah 5 (lima) kegiatan, dengan capaian 81,70% yakni kegiatan Pendataan Dharma Wanita Persatsuan Kabupaten Sabu Raijua, Pendataan Monitoring Lansia, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Gerekana Nasiona Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak ( GN-AKSA ) Tk Sekolah SLTA/SMK, Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat kurang mampu dan bantuan dana untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi.

**Foto Kegiatan GN-AKSA Tk SMA/SMK se- Kabupaten Sabu Raijua**



**Gambar 3.79** Kegiatan GN-AKSA

4. Bahwa jumlah penerima bantuan sosial terkait dengan kesejahteraan sosial dengan target 24 (dua puluh empat) orang penerima, namun yang dapat direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) penerima bantuan uang non tunai dengan jumlah realisasi sebesar 41%.

**Tabel 3.15** Nama – Nama Penerima Bantuan Sosial Perguruan Tinggi

No	Nama Penerima	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Dana Yang Diterim (Rp)	Keterangan
1	Ledy Zebrieniska Bengu	Desa Menia Rt/Rw 003/002	Mahasiswa	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
2	Frengki Roynaldo Yohanis	Desa Raenyale Rt/Rw 014/007	Mahasiswa	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
3	Elson Uly Dikson Toda	Menia Rt/Rw 018/009	Mahasiswa	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
4	Desinta Toda	Menia Rt/Rw 018/009	Mahasiswa	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
5	Adjeng Anjarwati Haba	Menia Rt/Rw 018/009	Mahasiswa	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
6	Asri Marliyani Putri Mola	Desa Roboaba	Mahasiswa	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
7	Melkianus Djami	Lederaga Rt/Rw 005/003	Petani	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
8	Soleman Djami Dara	Lederaga Rt/Rw 006/003	Petani	5.000.000,-	Pendidikan Perguruan Tinggi ( PT)
<b>Total</b>				Rp.40.000.000,-	
1	Domikianus Rehe	Raedewa Rt/Rw 020/010	Petani	5.000.000,-	Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH)
2	Dorkas Uly	Raedewa Rt/Rw 007/004	Petani	7.500.000,-	Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH)
<b>Total</b>				<b>12.500.000,-</b>	

**Foto Verifikasi Bansos yang direncanakan  
Rumah Tidak Layak Huni**



**Gambar 3.80** Verifikasi Bansos

5. Jumlah lembaga penerima bantuan sosial terkait dengan kesejahteraan sosial dengan target 1 (satu) lembaga sosial dengan capaian sebesar 100% yakni lembaga penerima Dharma Wanita Pesatuan Kabupaten Sabu Raijua.

**Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kab. Sabu Raijua  
Pemberian Makanan Tambahan  
Berbahan Daun Kelor**



**Gambar 3.81** Kegiatan Dharma Wanita

**Kegiatan Sosialisasi AD- ART,P3K, PPTK Pengenalan E-Reporting  
Anggota Dharma Wanita Pesatuan Kab. Sabu Raijua**



**Gambar 3.82** Sosialisasi E-Reporting

6. Jumlah kegiatan Pelaksanaan kebijakan Pelaksanaan Kesejahteraan Masyarakat dengan target 2 (dua) kegiatan dengan capaian realisasi 100%

7. Bahwa jumlah mahasiswa kedokteran yang mendapat Beasiswa sebanyak 3 (tiga) orang, dengan target 3 (tiga) orang dengan capaian realisasi 100% yang sementara kuliah di Universitas Kristen Jakarta dan Universitas Nusa Cendana di Kupang.

**Tabel 3.16** Penerima Beasiswa

NO	NAMA	ALAMAT	NO. HP
1	MEGA PUTRI Y. RATU EDO	Kupang	082144947594
2	WEHELMINA B. LOBO	Kel. Mautapaga Kab. Ende	081380109102
3	CHARLOS ROHY	Rt.007/Rw.004 Desa Bodae, Kec. Sabu Timur Kab. Sabu Raijua.	081310593919

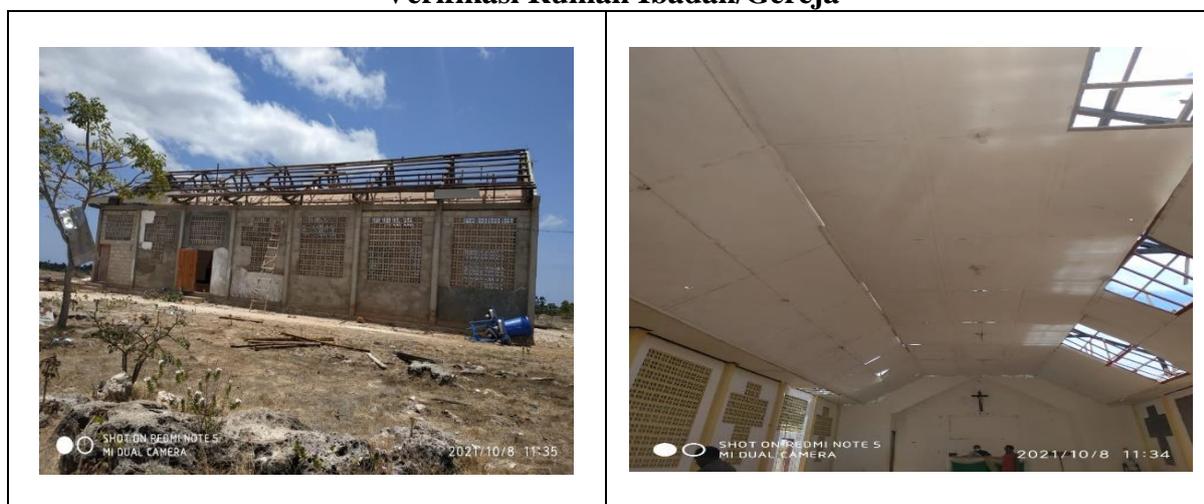
8. Jumlah masyarakat penerima kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat dengan target 57 (lima puluh tujuh) orang dan lembaga keagamaan dengan target 22 ( dua puluh dua) Rumah Ibadah teralisasi 100% yang merupakan penerima manfaat bahan baku bangunan berupa semen, seng dan triplex dan total keseluruhan sebanyak 79 ( tujuh puluh sembilan ) penerima di 6 ( enam ) kecamatan.

**Rumah Yohana Kele  
Desa Djadu**



**Gambar 3.83** Rumah Yohana Kele

**Verifikasi Rumah Ibadah/Gereja**



**Gambar 3.84** Rumah Ibadah

9. Jumlah lembaga penerima kebijakan terkait kesejahteraan masyarakat dengan target 3 (tiga) lembaga/ gereja dengan capaian 100% yang tersebar di Kecamatan Raijua

**Verifikasi Rumah Masyarakat  
Di Kec. Raijua**



**Gambar 3.85** Rumah Masyarakat

**C. Analisis Program/Kegiatan Produk Hukum Daerah yang di fasilitasi**

Pada tahun 2022, capaian produk hukum daerah yang difasilitasi oleh Bagian hukum mencapai 100% dengan rincian 11 buah Peraturan Daerah (PERDA), 35 buah Peraturan Bupati (PERBUP) dan 426 buah Keputusan Bupati.

Adapun Kegiatan Kerjasama Permasalahan Hukum tidak dapat terealisasi karena Kabupaten Sabu Raijua tidak memiliki kasus/masalah hukum selama tahun 2022. Sedangkan Kegiatan Publikasi terealisasi 100% dengan mempublikasi Peraturan Daerah (PERDA) dalam bentuk Himpunan Lembaran Daerah sebanyak 43 buku dan Peraturan Bupati (PERBUP) dalam bentuk Himpunan Berita Daerah sebanyak 43 buku dan disampaikan ke semua Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua.

**D. Analisis Program/Kegiatan Aspirasi Masyarakat dalam pokok – pokok pikiran DPRD**

yang selaras dengan sasaran RPJMD mencapai 99,14 %,keadaan ini ditunjang oleh pelaksanaan sub kegiatan kunjungan kerja DPRD di seluruh Kabupaten Sabu Raijua yaitu di 6 Kecamatan ( Sabu Barat, Sabu Timur, Sabu Tengah, Sabu Liae, Hawu Mehara, dan Raijua), untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sekaligus menjangring aspirasi langsung dari masyarakat. Kegiatan kunjungan kerja DPRD di 6 Kecamatan dengan realisasi 99,96% selain itu terlaksananya sub kegiatan reses DPRD sebanyak 3 (tiga kali) dimana setiap kali pelaksanaan reses dilakukan selama 6 (enam) hari oleh setiap anggota DPRD di 6 (enam) lokasi berbeda di semua kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua. Untuk sub kegiatan Reses sendiri, mencapai

realisasi 99,07%. Dengan demikian total realisasi kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat mencapai 99,13% dengan atribut sangat berhasil.



**Gambar 3.86** Penghimpunan Aspirasi

**E. Analisis Program/Kegiatan layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi sesuai SOP**

tahun 2022 dilaksanakan tepat waktu dengan capaian 100%. Keberhasilan ini didukung oleh kesuksesan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah melalui sub kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah dari 3 (tiga) buah Ranperda inisiatif DPRD yaitu Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa, Ranperda Sistem Kepariwisata Daerah, dan Ranperda Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Yang berhasil disusun dan disosialisasikan mencapai realisasi 92.,79%, sehingga termasuk dalam kategori sangat berhasil.



**Gambar 3.87** Kegiatan Uji Publik

**F. Analisis Program/Kegiatan pelaporan kinerja ASN**

Pada Tahun 2022 Jumlah ASN yang menuampaikan pelaporan kinerja sebanyak 1.632 orang atau 82% dari jumlah ASN. Hal ini disebabkan karena adanya kemajuan tingkat kepatuhan ASN dalam menyampaikan Pelaporan Kinerja.

**G. Analisis Program/Kegiatan keterisian jabatan**

Pada keterisian jabatan belum sepenuhnya memenuhi syarat kompetensi kepegawaian (kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultur) untuk pengisian jabatan lowong.

**H. Analisis Program/Kegiatan keterpenuhan formasi ASN**

Pengusulan Kebutuhan ASN yang diusulkan berdasarkan ANJAB dan ABK yang telah ditetapkan serta penyampaian usulan formasi terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kemntrian PAN RB dan BKN sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran berjalan sesuai yang dianggarkan.

**I. Analisis Program/Kegiatan keterpenuhan formasi ASN**

Pengusulan Kebutuhan ASN yang diusulkan berdasarkan ANJAB dan ABK yang telah ditetapkan serta penyampaian usulan formasi terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan oleh kemntrian PAN RB dan BKN sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan penganggaran berjalan sesuai yang dianggarkan.

**J. Analisis Program/Kegiatan Penetapan Perkada Manajemen ASN**

Peraturan tentang Manajemen ASN yang mewajibkan daerah untuk menerbitkan perkara belum sepenuhnya ditindaklanjuti, karena daerah belum memiliki beberapa unsure wajib dalam Manajemen ASN sesuai aturan pelaksanaannya.

Peraturan tentang Manajemen ASN yang saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pengesahan adalah Perkada tentang Sistem Merit.

Peraturan tentang MASN yang tidak perlu diterbitkan perkara telah diterapkan dan disesuaikan pelaksanaannya (Peraturan Disiplin ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengangkatan dan Pemberhentian ASN, Kesejahteraan ASN).

**K. Analisis Program/Kegiatan ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal**

Jadwal pelaksanaan pelatihan formal dalam hal ini Diklat Latsar bagi CPNS sudah ditetapkan oleh BPSDM Propinsi dan sesuai regulasi yang ada maka CPNS wajib mengikuti Diklat Dasar dan diangkat menjadi PNS tidak boleh lebih dari satu tahun.

**L. Analisis Program/Kegiatan ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural**

Permasalahan :

Tidak terlaksana sepenuhnya, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk kontribusi dan pembiayaan peserta. Hal ini disebabkan naiknya biaya kontribusi sejak pelaksanaan diklat struktural menggunakan sistem pola baru sesuai Perkal 5 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

Solusi :

Tetap mengupayakan untuk menyesuaikan pengembangan ASN melalui jenis pengembangan lain yang memiliki kualitas setara pelaksanaan Diklat Struktural sesuai Perkal No 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

**M. Analisis Program/Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

adalah Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Temuan APIP dan BPK RI Perwakilan Provinsi NTT dari target 8 dan realisasi 3 kegiatan dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang membutuhkan kerjasama APIP dengan Pengawas Internal yaitu BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam hal permintaan untuk melakukan Reviu P3DN dan Reviu PABPBJ (Triwulan III dan Triwulan IV) dan juga adanya Permintaan dari Pengawas Eskternal yaitu Pihak Kejaksaan Negeri Sabu Raijua untuk melakukan Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara pada 3 Desa Sasaran, yaitu :

1. Desa Teriwu untuk Pembangunan Kolam Resapan di Dusun I, Dusun II dan Dusun III.
2. Desa Mehona untuk Rumah Pande Besi; dan
3. Desa Raedewa untuk perhitungan Silpa.

**N. Analisis Program/Kegiatan Perangkat Daerah yang di audit**

Dari target 3 OPD dan realisasi 0 dapat dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang membutuhkan kerjasama APIP dengan Pengawas Internal yaitu BPKP Perwakilan Provinsi NTT dalam hal permintaan untuk melakukan Reviu P3DN dan Reviu PABPBJ (Triwulan III dan Triwulan IV) dan juga adanya Permintaan dari Pengawas Eskternal yaitu Pihak Kejaksaan Negeri Sabu Raijua untuk melakukan Audit Perhitungan kerugian Keuangan Negara pada 3 Desa Sasaran, yaitu :

1. Desa Teriwu untuk Pembangunan Kolam Resapan di Dusun I, Dusun II dan Dusun III.
2. Desa Mehona untuk Rumah Pande Besi; dan
3. Desa Raedewa untuk perhitungan Silpa.

**O. Analisis Program/Kegiatan meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi**

dengan realisasi 100% dapat dilihat dari tercapainya beberapa kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi antara lain kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) pada 6 Kecamatan, Pembayaran honorarium Saber Pungli, Pembayaran Honorarium Tim Monitoring Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemda Sabu Raijua (Aplikasi Jaga.id dan STRANAS PK), Honorarium Tim Unit Pengelola Gratifikasi.

**P. Analisis Program/Kegiatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sabu Liae**

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah Kecamatan kepada masyarakat, suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh stakeholder yang membutuhkannya. Disisi lain masyarakat masyarakat sebagai unsur yang dilayani harus memberikan kontrol yang positif dan efektif guna mendorong pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai strategi ataupun cara untuk meningkatkan kualitas layanan publik sehingga pada akhirnya tujuan dari pelaksanaan peayanan publik dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya. Adapun indikator sasaran tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan target 3 kegiatan, terealisasi kegiatan dengan capaian 76,33%. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya : koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, kegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, koordinasi kegiatan pemerintahan umum di tingkat desa, pembinaan Perangkat Desa, Musdes Perencanaan dan koordinasi/konsultasi terkait persoalan pertanahan/sertifikat tanah bangunan milik pemerintah kabupaten di desa dengan Instansi Vertikal di Kantor Pertanahan dengan jumlah peserta yang beragam dari setiap jenis kegiatan.



**Gambar 3.88** Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Desa

2. Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan target 1 kegiatan, terealisasi kegiatan dengan capaian 100%. Adapun kegiatan tersebut yakni : sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan.



**Gambar 3.89** Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kegiatan pemberdayaan Tk. Desa

**Q. Analisis Program/Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan Sabu Timur**

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Koordinasi/sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait yang terrealisasi melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Sabu Timur, Tingkat Kecamatan hingga tingkat kabupaten, dengan sub kegiatan berupa belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja makan minum rapat, belanja Jasa penyelenggaraan acara, dan belanja perjalanan dinas dengan capaian indikator kinerja sebesar 100%, atau dapat disimpulkan sangat berhasil dengan berhasilnya kegiatan ini diharapkan dapat mendorong sinergitas dalam proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sabu Raijua dari tingkat paling bawah (desa) hingga tingkat kabupaten.

**R. Analisis Program/Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Sabu Barat**

Terlaksananya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kec dengan target 2 Kegiatan terealisasi 1 kegiatan dengan capaian 100%. Dengan rincian kegiatan :

- Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Administrasi. Dengan sasaran 28 Orang RT, RW dan LPM Kelurahan Mebba.
  1. Kegiatan pemberdayaan kelurahan
    - Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kecamatan dengan target 1 Kegiatan terealisasi 1 kegiatan dengan capaian 100%. Dengan rincian kegiatan :
      - Kegiatan Belanja makan Minum Rapat Musrenbang Kelurahan. Target sasaran Kegiatan ini adalah Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan dengan target peserta sebanyak 116 Orang.



**Gambar 3.90** Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kelurahan di Kel.

Mebba

**S. Analisis Program/Kegiatan Tingkat Desa/Kelurahan berkembang Kecamatan Sabu Liae**

Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan target 1 kegiatan, terealisasi kegiatan dengan capaian 100%. Adapun kegiatan tersebut yakni : sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di wilayah kerja Kecamatan.



**Gambar 3.91** Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kegiatan pemberdayaan Tk. Desa

**T. Analisis Program/Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan**

Terlaksananya jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan target 6 Kegiatan terealisasi 6 kegiatan dengan capaian 100%. Dengan rincian kegiatan :

- Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan. Sasaran Kegiatan ini adalah Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan dengan target peserta sebanyak 300 Orang.



**Gambar 3.92** Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan

- Kegiatan Perjalanan Dinas Musrenbang TK. RT (Kel. Mebba). Sasaran Kegiatan ini adalah ASN pada Kantor Lurah Mebba sebanyak 10 Orang ASN;
- Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Ke Tingkat Kecamatan dan Kab. (Kel. Mebba). Sasaran Kegiatan ini adalah 5 Orang ASN Pada Kantor Lurah Mebba;
- Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi Renja. Target Kegiatan ini adalah sebanyak 4 Orang ASN Pada Kantor Camat Sabu Barat;
- Kegiatan Perjalanan Dinas D di 18 Desa/Kelurahan. Kegiatan ini diperuntukan bagi 17 Orang perwakilan kecamatan yang disepakati dalam musyawarah pembangunan tingkat kecamatan Tahun Anggaran 2022;
- Kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka Musrenbangdes/kel 18 Desa/Kelurahan. Sasaran kegiatan ini adalah sebanyak 17 Orang ASN Kecamatan Sabu Barat dengan Locus 17 Desa 1 Kelurahan;



**Gambar 3.93** Kegiatan Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa/Kel

#### **U. Analisis Program/Kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum**

Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan target 4 orang, terealisasi 1 kegiatan dengan capaian 89,06%. Adapun kegiatan tersebut berupa pelatihan anggota Paskibra Tk. Kecamatan dengan pelatih anggota Polri yang kepersertaannya diambil dan diseleksi dari siswa/I SMA 1 Sabu Liae oleh anggota Polri. Ini dalam rangka pelaksanaan upacara HUT Plokramasi Kemerdekaan RI tahun 2022 Tk. Kecamatan Sabu Liae. Kegiatan ini difokuskan di Kantor Camat Sabu Liae.



**Gambar 3.94** Kegiatan latihan Paskibra Tk. Kecamatan Sabu Liae

## V. Analisis Program/Kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan rincian kegiatan :

- Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dengan target 74 kali, terealisasi 73 kali kegiatan dengan capaian 99,55%. Adapun jenis kegiatan dimaksud berupa monitoring dana pemberdayaan yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di 12 desa dengan jumlah kepersetaan yang beragam.



**Gambar 3.95** Rapat koordinasi pengawasan dan pembinaan tingkat pemerintah desa

- Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan target 84 kali, terealisasi 83 kali dengan capaian 99,29%. Adapun jenis kegiatan dimaksud berupa perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum di masyarakat, pemberdayaan Linmas di setiap desa, pengaktifan/berlaku Siskamling, sosialisasi kamtibmas bersama TNI/Polri di desa dan pasar-pasar desa serta melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian terkait sengketa tanah suku. Kegiatan ini dilaksanakan di 12 desa dengan jumlah kepersetaan yang beragam.



**Gambar 3.96** Rapat koordinasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban Tk. Kecamatan

- Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dengan target 80 kali, terealisasi 80 kali dengan capaian 100%. Adapun jenis kegiatan dimaksud berupa perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa lewat kegiatan fasilitasi dana pemberdayaan dana desa, pembinaan pelatihan kegiatan

pemberdayaan desa dan pengawasan usaha kelompok pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di 12 desa dengan jumlah kepersetaan yang beragam.



**Gambar 3.97** Monitoring kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat desa

**W. Analisis Program/Kegiatan kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan**

Terlaksananya sosialisasi bidang kerja ideologi wawasan kebangsaan bela Negara, karakter kebangsaan, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di 3 ( tiga ) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua yaitu Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, dan Kecamatan Hawu Mehara dengan presentase mencapai 100% dengan predikat **Berhasil**, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideology wawasan kebangsaan bela Negara, karakter kebangsaan, pembaharuan kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Keberhasilan:

- Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik dan sukses
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelajar/generasi muda tentang 4 konsesus bangsa ( Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI) dalam kehidupan sehari-hari

Kegagalan:

- Tidak/belum semua pelajar SLTA/generasi muda di Sabu Raijua yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini, karena keterbatasan Anggaran pada OPD.
- Hanya sebagian kecil pelajar yang mengikuti kegiatan ini

Solusi :

- Agar diberikan Anggaran yang memadai untuk kegiatan dimaksud
- Bekerjasama dengan stake holder terkait untuk kegiatan dimaksud



Gambar 3.98 Wawasan Kebangsaan

#### X. Analisis Program/Kegiatan pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik

Tersusunnya program di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah di tiga (3) kecamatan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua yaitu Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, dan Kecamatan Hawu Mehara yang terdiri dari 3 kegiatan dan capaian 3 kegiatan dengan persentasenya 100%. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, yang ada di Kabupaten Sabu Raijua dengan predikat **Berhasil**, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan:

- Kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada pemilih pemula berjalan dengan baik dan sukses
- Meningkatkan pemahaman/pengetahuan para pemilih pemula tentang politik di daerah
- Meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dan pilukada serentak Tahun 2024

Kegagalan:

- Belum semua pemilih pemula yang ada di Sabu Raijua yang mengikuti Sosialisasi dimaksud
- Keterbatasan Anggaran untuk kegiatan dimaksud

Solusi :

- Agar diberikan Anggaran yang memadai untuk kegiatan dimaksud
- Bekerjasama dengan stake holder terkait untuk kegiatan dimaksud



**Gambar 3.99** Pemilih Pemula yang mendapatkan Pendidikan Politik

**Y. Analisis Program/Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan**

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah, Kantor Kesbangpol melakukan monitoring kegiatan Organisasi Politik di tiga (3) kecamatan yang ada di Kabupaten Sabu raijua yaitu Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, dan Kecamatan Hawu Mehara yang ada di Kabupaten Sabu raijua dengan persentasenya 100% dengan predikat **Berhasil**. Hasil yang dicapai dari monitoring organisasi politik yaitu memperoleh data-data dan informasi mengenai organisasi politik yang ada di Kabupaten Sabu Raijua, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan:

- Pemantauan dan pengawasan tetap dilaksanakan secara rutin/berkala
- Setiap Ormas yang terdaftar dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu Kamtibmas
- Tetap melaporkan kegiatan yang dilaksanakan

Kegagalan:

- Belum semua Ormas yang ada di Sabu Raijua melaporkan/mendaftarkan di Kesbangpol Sabu Raijua

Solusi :

- Tetap melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, kecamatan, untuk melaporkan keberadaan Ormas di wilayah masing-masing



**Gambar 3.100** Organisasi Kemasyarakatan yang dibina dan mendapatkan pengawasan

**Z. Analisis Program/Kegiatan etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatan kepercayaan di daerah, kantor Kesbangpol melakukan Monitoring kerukunan umat beragama di tiga (3) kecamatan yang ada di kabupaten Sabu Raijua yaitu Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, dan Kecamatan Hawu Mehara dengan persentase 100% dengan predikat **Berhasil**, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil dari kegiatan ini yaitu memperoleh data dan informasi bahwa tetap terjaganya kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama.

Keberhasilan:

- Tetap melakukan monev/memantau terkait toleransi kerukunan umat beragama secara rutin/berkala di Sabu Raijua

Kegagalan:

- Belum semua Etnis,suku, LSM yang ada di Sabu Raijua yang melaporkan keberadaannya.

Solusi :

- Tetap melakukan koordinasi dengan instansi terkait, suku/etnis untuk melaporkan keberadaannya
- Melakukan pemantauan keberadaan etnis,suku, LSM



**Gambar 3.101** Etnis/Suku/Agama/Ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

**AA. Analisis Program/Kegiatan konflik sosial, budaya, ideology, politik, ekonomi yang ditangani**

Tersusunnya program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah, kantor Kesbangpol melakukan sosialisasi bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah di 3 (tiga) Kecamatan yang ada di Kabupaten Sabu Raijua yaitu Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Timur, Kecamatan Sabu Liae, dan Kecamatan Hawu Mehara dengan persentase 100% dengan predikat **Berhasil**, hal ini

menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kewaspadaan dini, kerja sama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

Keberhasilan:

- Upaya pencegahan dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan pihak TNI/POLRI dan Instansi terkait untuk mencegah/menyelesaikan berkembangnya konflik di masyarakat

Kegagalan:

- Belum maksimalnya penanganan konflik di daerah

Solusi :

- Koordinasi/kerjasama rutin dilakukan bersama TNI/POLRI, unsur Forkopimda, FPK, FKUB dan FKPM



**Gambar 3.102** Konflik Sosial, Budaya, Ideology, Politik, Ekonomi yang ditangani

#### **BB. Analisis Program/Kegiatan Ketersediaan Arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban**

Dalam rangka mencapai misi yang dimaksud, maka pada tahun 2022 ini telah dilakukan kegiatan:

1. Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
  - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Statis terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Pemberian Insentif bagi 33 tenaga pengelola arsip.
2. Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
  - Jumlah ASN yang Hak-hak Keuangannya teradministrasi sesuai tugas terdiri dari 33 pengelola arsip dari tiap-tiap OPD dengan Sistem Pembayaran honor pengelola arsip dilakukan dengan sistem transfer ke rekening masing-masing pengelola.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bukti yang sah dan pertanggungjawaban Nasional pasal 40 dan pasal 59 undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

Capaian Kinerja tingkat ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban adalah 75 % yang meliputi :

- a) Prosentase arsip aktif dibuatkan daftar arsip dengan capaian 100 % (hasil pengelolaan surat masuk dan surat keluar dengan jumlah 21.287 dokumen yang tersebar pada 33 OPD.
- b) Prosentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dengan capaian 100 % ( hasil penataan pada Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan dengan jumlah arsip 1542 Dokumen.
- c) Prosentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dengan capaian 100 % (hasil penataan arsip pada Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas PTSP, Perindustrian dan Perdagangan berupa Dokumen SK dan Perbup sebanyak 108 Dokumen.
- d) Presentasi Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN dan JIKN yang belum dibuatkan daftar arsip dengan capaian 0% (sampai saat ini Kabupaten Sabu Raijua) belum mendaftar sebagai anggota Simpul Jaringan SIKN dan JIKN karena terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

**CC. Analisis Program/Kegiatan usulan pembentukan, penghapusan , penggabungan dan perubahan status desa yang disetujui**

Desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua desa atau lebih.

**DD. Analisis Program/Kegiatan Desa dengan kreteria (cepat berkembang)**

Desa cepat berkembang adalah desa yang mempunyai perubahan dari berbagai sisi seperti ada peningkatan kualitas pelayanan publik, desa berkembang tidak terlepas juga dari program yang di gagas oleh Presiden R.I Joko Widodo yang mana salah satunya yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**EE. Analisis Program/Kegiatan Desa yang menetapkan Perdes tentang Keudes**

Aplikasi siskeudes di tujukan kepada Aparat Pemerintah Desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan di Desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan /pertanggungjawaban.

**8) Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN**

**Tabel 3.17** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Program RPJMD yang diintegrasikan ke Dalam RKPD	%	100 (127 Program)	94,49 (120 Program)	94,49	BAPPEDA
2	Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks/ Skor	20	33,98	169,9	BAPPEDA
3	Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.1	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	BAPPEDA
		4.2	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	BAPPEDA
		4.3	Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	BAPPEDA
4	Pengelolaan Keuangan Daerah	5.1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	%	100	100	100	BAKEUDA
5	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.2	Persentase Rekonsiliasi BMD dengan OPD	%	100	100	100	BAKEUDA
		6.4	Persentase Capaian Pajak Daerah	%	100	125,63	125,63	BAKEUDA

Data diatas menunjukkan dari 5 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Menuju SARAI TRANSPARAN yang dilaksanakan secara lintas OPD (Bappeda dan Bakeuda),

hampir semua program secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud dengan tingkat pencapaian diatas 94,49%.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan RPJMD yang diintegrasikan ke Dalam RKPD**

- Presentase Program RPJMD yang diintegrasikan ke dalam RKPD mencapai 94,49 % sehingga dikategorikan BERHASIL. Program RPJMD sebanyak 127 Program dan Untuk Tahun 2022 RKPD Kabupaten Sabu Raijua melaksanakan 120 Program RPJMD yang dilaksanakan oleh 36 OPD (3 OPD :Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Bagian Organisasi hanya melaksanakan Program Penunjang). Program OPD sudah berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026 sehingga Program RKPD adalah program yang ditetapkan pada RPJMD.

- **Dokumen RPJMD**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah dimasa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Dokumen RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

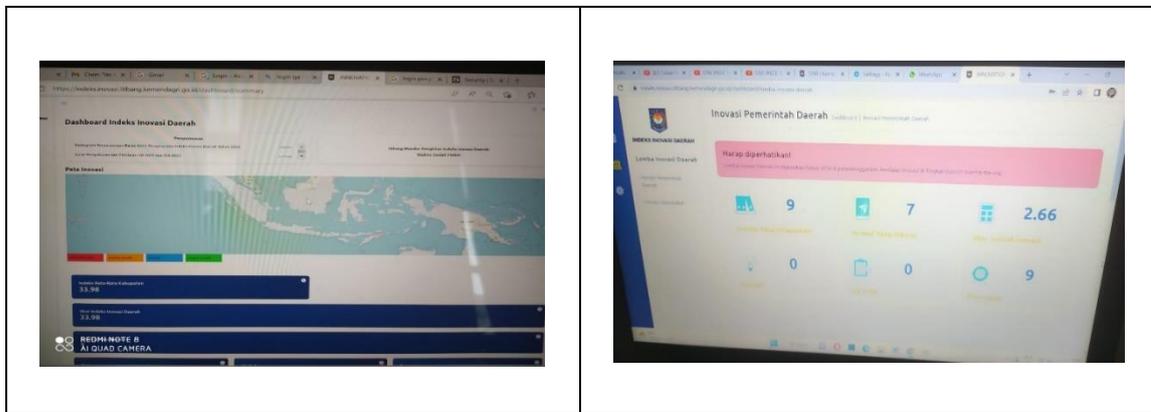
Dengan tersedianya Dokumen RPJMD tahun 2021-2026 selanjutnya sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD, RKPD Perubahan.

- **Dokumen RKPD**

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## B. Analisis Program/Kegiatan Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Dearah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendorong kompetisi positif antar Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pada Tahun 2022 Skor indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sabu Raijua mencapai 33,98 dibandingkan dari skor pada target RPJMD sebesar 20 yang artinya realisasi/capaiannya sebesar 169,9 % yang dapat dikategorikan Berhasil.



Gambar 3.103 Indeks Inovasi Daerah

## C. Analisis Program/Kegiatan Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mencapai 100 % sehingga dikategorikan dalam kriteria BERHASIL. Dalam indikator ini dilaksanakan Kegiatan koordinasi dan monitoring untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan untuk mewujudkan konsistensi, keselarasan dan ketercapaian Perencanaan (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

## D. Analisis Program/Kegiatan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA

Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA mencapai 100 % sehingga dikategorikan dalam kriteria BERHASIL. Dalam indikator ini dilaksanakan Kegiatan koordinasi dan monitoring untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan untuk mewujudkan konsistensi, keselarasan dan

ketercapaian Perencanaan (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Bidang Bidang Perekonomian dan SDA.

**E. Analisis Program/Kegiatan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah**

Persentase Capaian Kinerja RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah mencapai 100 % sehingga dikategorikan dalam kriteria **BERHASIL**. Dalam indikator ini dilaksanakan Kegiatan koordinasi dan monitoring untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan untuk mewujudkan konsistensi, keselarasan dan ketercapaian Perencanaan (RPJPD,RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Wilayah.

Faktor Pendorong keberhasilan pencapaian sasaran lainnya adalah :

- a. Tersedianya sistem aplikasi SIPD Perencanaan yang terintegrasi dengan SIPD Penganggaran untuk menjamin konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan seluruh program kegiatan di Kabupaten Sabu Raijua.
- b. Telah dilakukan sinkronisasi dan evaluasi sasaran pada Dokumen RPJMD dan RKPD sejak saat dokumen masi berupa rancangan, supaya dapat diketahui jika terjadi inkonsistensi atau ketidakselarasan.

Catatan Penting dalam Pencapaian Sasaran adalah:

- a. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan untuk keselarasan sasaran tetap dijaga sampai akhir periode RPJMD.
- b. Menjalankan Fungsi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi secara maksimal terhadap rencana program sejak penyusunan rancangan renja.

Upaya Perbaikan :

- a. Melakukan tahapan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan dokumen perencanaan dengan memverifikasi konsistensi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infastuktur dan Wilayah), Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b. Mensosialisasikan pentingnya konsistensi dalam perencanaan dan penganggaran dan perlunya proses pengendalian dan evalausi dalam setiap pelaksanaan rencana kegiatan OPD.

**F. Analisis Program/Kegiatan Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya**

SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Jika angka SILPA-nya negatif berarti bahwa pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

**G. Analisis Program/Kegiatan Rekonsiliasi BMD dengan OPD**

Rekonsiliasi BMD merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencocokkan data aset pada tiap OPD yang menjadi dasar penyusunan laporan BMD dan dituangkan dalam laporan keuangan. Berdasarkan target anggaran perubahan APBD, presentase rekonsiliasi BMD telah sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

**H. Analisis Program/Kegiatan Capaian Pajak Daerah**

Persentase Capaian Pajak Daerah belum melampaui target yang ditetapkan yaitu Rp. 5.646.817.784,- (125,63%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 4.494.780.442,-

Pada tahun 2022, Badan Keuangan Daerah Kab. Sabu Raijua menjalankan beberapa program dan kegiatan/sub.kegiatan yang menunjang tercapainya Sasaran “Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah menuju SARAI TRANSPARAN” dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun adalah jumlah dokumen pada tahun 2022 sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang tersusun adalah jumlah dokumen pada tahun 2022 sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%
- RKA SKPD yang disusun dan di reviu sebanyak 1 kegiatan berupa RKA SKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKA SKPD Tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%.
- Perubahan RKA SKPD yang disusun dan di reviu sebanyak 1 kegiatan berupa Perubahan RKA SKPD Tahun 2022 dengan capaian kinerja 100%
- DPA SKPD yang disusun dan di reviu sebanyak 1 kegiatan berupa DPA SKPD Tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%.
- Perubahan DPA SKPD yang disusun dan di reviu sebanyak 1 kegiatan berupa DPA SKPD Tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%.

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD yang tersusun sebanyak 2 dokumen merupakan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja 100%.
- Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 doku
- men berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2022 dengan capaian kinerja 100%
- Regulasi bidang anggaran yang tersusun sebanyak 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%.
- Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan berupa koordinasi terkait perencanaan anggaran pendapatan di Kemendagri dan koordinasi di Provinsi NTT, dengan capaian kinerja 100%.
- Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan berupa koordinasi terkait perencanaan anggaran belanja daerah di Kemendagri dan di Provinsi NTT dari 2 kegiatan yang rencanakan dengan capaian kinerja 100%
- Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan berupa koordinasi terkait perencanaan anggaran pembiayaan dengan capaian kinerja 100 %.
- Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah yang dilaksanakan sebanyak 3889 dengan capaian indikator kinerja 102,34%
- Dokumen hasil penataan pembiayaan daerah yang dilaksanakan sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%
- Dokumen koordinasi, fasilitasi asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana transfer lainnya sebanyak 6 dokumen dengan capaian kinerja 100%
- Kegiatan Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan palaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan dengan capaian indikator 100%

- Dokumen hasil rekon penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D sebanyak 3889 dengan capaian indikator kinerja 102,34%
- Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran sebanyak 17 laporan dengan capaian indikator 100%.
- Laporan keuangan Pemda yang terkonsolidasi sebanyak 1 laporan dengan capaian indikator 100%
- Dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penjabaran sebanyak 2 dokumen berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Sabu Raijua Tahun Anggaran 2021 dengan capaian kinerja 100%.
- Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan pertanggungjawaban APBD yang disusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian indikator kinerja 100%
- Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang tersusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian indikator kinerja 100%
- Desa penerima bantuan keuangan yang tersalurkan sebanyak 58 desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa dengan capaian indikator kinerja 100%
- Alokasi dana darurat dan mendesak yang tersalurkan sebanyak Rp. 153.400.000,- (1,39%). Anggaran tersebut disalurkan untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan.
- Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota yang disalurkan sebanyak 48 desa dari 58 desa yang dialokasikan dengan capaian realisasi kinerja 82,76%. Tidak tersalurnya dana bagi hasil untuk 10 desa dikarenakan surat permohonan pencairan dana yang diajukan dari OPD teknis ke Badan Keuangan Daerah Kab. Sabu Raijua hanya sebanyak 48 desa dari 58 desa yang dianggarkan, sehingga dalam proses pencairannya hanya diajukan sebanyak 48 desa berdasarkan surat permohonan pencairan yang diajukan.
- Standar harga barang milik daerah merupakan dokumen yang menyajikan data harga satuan barang/jasa yang ditetapkan sebagai acuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah. Dokumen standar harga BMD yang tersusun pada tahun 2022 berupa Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2023 Harga BMD yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022.
- Penyusunan Dokumen RKBMD dan RKPMD yang terlaksana pada tahun 2022 sebanyak 1 dokumen dengan capaian indikator kinerja 100%

- Dokumen RKBMD dan RKPBMMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang terdiri dari perencanaan pengadaan BMD, perencanaan pemeliharaan BMD, perencanaan pemanfaatan BMD, perencanaan pemindahtanganan BMD serta perencanaan penghapusan BMD. Dokumen RKBMD dan RKPBMMD yang tersusun pada tahun 2022 sebanyak 2 dokumen.
- Kegiatan penatausahaan BMD yang dilakukan meliputi pencatatan, pembukuan dan pelaporan aset. Dengan adanya penatausahaan aset diharapkan dapat mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan penatausahaan BMD pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 1 kegiatan dengan capaian indikator kinerja 100%
- Inventarisasi data aset merupakan kegiatan pengecekan antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang ada. Inventarisasi data aset dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya. Kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 berlokasi di 5 kecamatan Kabupaten Sabu Raijua dengan capaian indikator kinerja 100%
- Pengamanan aset yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 1 kegiatan dengan capaian indikator kinerja 100%
- Kegiatan penilaian aset yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan berupa koordinasi terkait pelelangan BMD dengan capaian indikator kinerja 100%.
- Terciptanya pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD yang dimaksud adalah dengan dibentuknya Tim Pemusnahan BMD dan Tim Penghapusan BMD. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD dengan capaian indikator 100%.
- Konsolidasi penyusunan laporan BMD dari SKPD yang dimaksud adalah pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi aset bersama seluruh SKPD. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencocokkan data aset tetap pada SIMDA BMD pada tiap-tiap Perangkat Daerah dengan data base pada Simda BMD pada Bidang Pengelolaan Aset Badan Keuangan Daerah Kab. Sabu Raijua. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat diketahui data terbaru barang milik daerah pada tiap SKPD sehingga dapat dilakukan penyusunan Laporan BMD.
- Koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMD yang dilaksanakan adalah koordinasi terkait regulasi pengelolaan BMD dengan capaian indikator 100%.
- Tersusunnya kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 2 dokumen dengan capaian indikator 100%.

- Kegiatan pendaftaran dan penagihan objek pajak dan retribusi daerah yang dilakukan sebanyak 6 kegiatan dengan capaian indikator 100%.

### 9) Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH

**Tabel 3.18** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.1	Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	Satpol PP
2	Pendaftaran Penduduk	2.1	Presentase Perekaman KTP Elektronik	%	90,07	89,32	99,16	Dinas Capilduk
3	Pencatatan Sipil	3.1	Presentase penduduk usia 0 – 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran	%	89,52	94,62	105,69	Dinas Capilduk
		3.2	Presentase anak usia 0 – 17 kurang satu hari yang memiliki KIA	%	37,28	56,01	150,24	Dinas Capilduk
4	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4.1	Presentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100	100	100	Dinas Capilduk
5	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.1	Presentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	Satpol PP
6	Penanggulangan Bencana	6.1	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	BPBD

Data diatas menunjukkan dari 6 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Menciptakan Budaya Kerja ASN Dalam Pelayanan Menuju SARAI RAMAH yang dilaksanakan

secara lintas OPD (Satpol PP, Dinas Capilduk dan BPBD), hampir semua program secara signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud dengan tingkat pencapaian diatas 99,16%.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Pada tahun 2022 capaian kinerja mencapai 100%, berarti sesuai dengan target yang direncanakan sebesar 100%. Keberhasilan tersebut di dukung oleh berbagai faktor sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum yaitu :

- Penertiban Ternak dan Penertiban PKL di Wilayah Kab. Sabu Raijua



**Gambar 3.104** Pelaksanaan Penertiban Ternak yang berkeliaran di Kelurahan Limaggu Kec. Sabu Timur dan Desa Menia Kec. Sabu Barat



**Gambar 3.105** Penertiban PKL yang berjualan di atas trotoar

- Kegiatan Operasi PEKAT



**Gambar 3.106** Operasi PEKAT pada Kegiatan Ritual Adat di Kec. Sabu Timur dan Kec. Hawu Mehara

- Kegiatan Monitoring Trantibum dan Patroli Wilayah



**Gambar 3.107** Pengamanan dan Monitoring Trantibum Pada Kebaktian Natal dan Tahun Baru

2. Jumlah kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan PERDA dan PERKADA Kegiatan pengawasan BBM Bersubsidi.



**Gambar 3.108** Pengawasan terhadap penjualan BBM Bersubsidi

**B. Analisis Program/Kegiatan Perekaman KTP Elektronik**

Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan diperoleh dari perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik di Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah penduduk wajib KTP Elektronik Kabupaten Sabu Raijua berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dimana pada akhir tahun 2022 hasil pengolahan data base kependudukan jumlah kepemilikan KTP elektronik sebanyak 63.954 orang sedangkan jumlah wajib KTP Elektronik di Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 56.475 sehingga diperoleh realisasi indikatornya sebesar 88,31 %.

**C. Analisis Program/Kegiatan penduduk usia 0 – 18 tahun yang mempunyai akte kelahiran**

Cakupan kepemilikan akte kelahiran diperoleh dari perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang sudah memiliki akte kelahiran di Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah penduduk berdasarkan data konsolidasi bersih tahun 2022. Dimana pada akhir tahun 2022, berdasarkan hasil pengolahan database kependudukan, jumlah kepemilikan akte kelahiran terhitung sebanyak 33.004 orang sedangkan jumlah penduduk

wajib Kepemilikan akte kelahiran Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 31.586 sehingga diperoleh realisasi indikatornya sebesar 95,70%.

**D. Analisis Program/Kegiatan anak usia 0 – 17 kurang satu hari yang mempunyai Kartu Identitas Anak (KIA)**

Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) diperoleh dari perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Sabu Raijua dengan jumlah penduduk berdasarkan data konsolidasi bersih tahun 2022. Dimana pada akhir tahun 2022, berdasarkan hasil pengolahan database kependudukan, jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) terhitung sebanyak 30.857 orang sedangkan jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 18.488 sehingga diperoleh realisasi indikatornya sebesar 59,92%.

**E. Analisis Program/Kegiatan ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data**

Capaian kinerja cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, persentase capaian kerjanya adalah 100% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Data ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional karena tidak ada standar nasional mengenai Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan untuk perbandingan dengan regional tidak dapat dilakukan karena setiap kabupaten kota memiliki indikator sasaran yang berbeda. Data penunjang diperoleh dari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua.

Dalam sebuah Instansi terdapat beberapa factor yang menyebabkan keberhasilan/ kegagalan ataupun peningkatan/ penurunan kinerja.

Faktor-faktor kunci keberhasilan/ kegagalan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara efektif dan efisien serta sebagai acuan untuk kedepannya. Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, tantangan, kendala dan kelemahan yang dihadapi, termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua.

Faktor-faktor penentu keberhasilan/ kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sabu Raijua meliputi :

- a. Penempatan aparatur sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing sehingga dapat berjalan optimal;

- b. Peningkatan profesionalisme dan moral dari sumber daya manusia dalam melaksanakan dan pengawasan kegiatan;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan seluruh jajaran pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) yang terkait;
- d. Peningkatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan kegiatan kependudukan;
- e. Pemanfaatan dan pembangunan secara transparansi, sehingga dapat dilakukan evaluasi keberhasilan dan kegagalan.

Faktor peningkatan/ penurunan kinerja antara lain :

- a. Beban kerja berlebihan.  
Terlalu banyaknya pekerjaan, sedikitnya waktu yang tersedia dan tidak adanya dukungan system yang berdampak pada menurunnya kualitas kerja. Misalnya : rasio pegawai dengan jumlah pemohon dokumen kependudukan yang tidak seimbang.
- b. Kurangnya wewenang. Besarnya tanggungjawab yang harus dipikul namun tidak disertai kewenangan dalam membuat keputusan.
- c. Kurangnya kebutuhan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam pengorganisasian kegiatan dan pendokumentasian.

Beberapa solusi yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Menempatkan aparatur sesuai dengan bidang dan keahliannya
- b. Memenuhi kebutuhan SDM dalam pengorganisasian untuk meningkatkan kegiatan/ kinerja
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pegawai
- d. Adanya workshop tentang manajemen kepegawaian
- e. Adanya evaluasi kerja setiap bulannya.

Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua memiliki jumlah pegawai sebanyak 25 orang yang diantaranya 17 orang ASN dan 8 orang tenaga non ASN. Dari jumlah tersebut masih belum maksimal dalam meningkatkan kinerja pelayanan dokumen kependudukan. Dengan demikian minimnya jumlah pegawai yang menangani dokumen kependudukan sehingga kurang efektif dan efisiennya dalam melayani masyarakat

**F. Analisis Program/Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**  
Pelaksanaan Pemadaman, Penanggulangan dan Pengendalian kebakaran di Wilayah Kabupaten Sabu Raijua.



**Gambar 3.109** Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian kebakaran Rumah dan Lahan Kering milik Warga

**G. Analisis Program/Kegiatan penanganan tanggap darurat bencana**

Kegiatan Penanganan Tanggap Darurat Bencana Meliputi:

1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. Koordinasi dan Konsultasi Rencana Penanggulangan Bencana di BNPB di Jakarta;
  - b. Kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Kontijensi di Prov. NTT;
  - c. Koordinasi dan Konsultasi Rencana Penanggulangan Bencana di BPBD Prov. NTT;
  - d. Kegiatan Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Daratan Sabu;
  - e. Kegiatan Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Daratan Raijua.



**Gambar 3.110** Pemasangan Rambu Rawan Bencana Sebagai Bagian dari Kegiatan Mitigasi, Pencegahan dan Kesiapsiagaan

2. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dapat direalisasikan dengan kegiatan meliputi Monitoring Tim Teknis dan Tim Pendamping Masyarakat Kegiatan Perbaikan Kerusakan Rumah Penduduk Akibat Bencana Alam Badai Siklon Tropis Seroja.



**Gambar 3.111** Verifikasi dan Validasi Terhadap Kerusakan Rumah Calon Penerima Bantuan Badai Seroja dan Kegiatan Sosialisasi Pencairan Dana Bantuan Seroja

3. Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana meliputi pengadaan alat/bahan peralatan tanggap darurat bencana serta perjalanan dinas dalam rangka tanggap darurat bencana baik itu kebakaran rumah, kebakaran lahan, pencarian nelayan hilang, dan angin kencang.



**Gambar 3.112** Tanggap Darurat Kebakaran dan Pencarian Nelayan Hilang Akibat Cuaca Buruk

4. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana terdiri dari:
- Belanja Barang pakai habis berupa bahan bakar/pelumas dan tandon air ukuran 3.300L
  - Belanja Tagihan air tangki BPBD/Bantuan air bersih BPBD
  - Belanja paket pengiriman/Pengangkutan Logistik dari BNPB Jakarta dan BPBD Prov. NTT
  - Monitoring Pelayanan Air Bersih
  - Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/Bantuan Air Bersih.



**Gambar 3.113** Pelayanan Air Bersih oleh Tangki BPBD dan Tangki Pihak Ketiga



**Gambar 3.114** Pengadaan Tandon 3.300 L

## 10) Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUTUR

**Tabel 3.19** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUKTUR

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Pengembangan Pemukiman	1.1	Ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah	%	100	100	100	Dinas PUPR
2	Penataan Bangunan Gedung	2.1	Rasio Kepatuhan IMB	%	0,60	0,40	66,67	Dinas PUPR
3	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	3.1	Terselenggarakannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	Dinas PUPR
4	Penyelenggaraan Jalan	4.1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	66,51	66,70	100,29	Dinas PUPR
5	Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.1	Ketersediaan Peraturan Daerah	%	100	40	40	Dinas PUPR

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
			tentang Tata Ruang					
6	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	6.1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	50	50	Dinas PUPR
		6.2	Persentasi Penetapan Tanah untuk Fasilitas Umum	%	100	100	100	Dinas PUPR
7	Pengelolaan dan Pengembangan S/istem Air Limbah	7.1	Persentasi rumah tangga bersanitasi	%	71,40	71,54	100,20	Dinas PUPR
8	Pengadaan Tanah dan Kepentingan Umum	8.1	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	100	100	Dinas PUPR
9	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	9.1	Terselenggaranya penyelesaian sengketa tanah	%	100	90	90	Dinas PUPR
10	Pengembangan Perumahan	10.1	Persentase Berkurangnya jumlah unit Rumah tidak layak huni /11( RLTH ) (%)	%	29,34	33,00	112.47	Dinas PRKP
11	Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.1	Presentasi Rumah Layak Hani Yang Ditangani	%	100	58.11	58.11	Dinas PRKP
12	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12.1	Presentasi perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	100	100	100	Dinas PRKP
13	Kawasan Pemukiman	13.1	Presentasi Kawasan permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang ditangani	%	4,33	4,33	100	Dinas PRKP

Data diatas menunjukan dari 13 program yang mendukung upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas INFRASTRUTUR yang dilaksanakan secara lintas OPD (Dinas PUPR dan Dinas PRKP), terdapat 9 program dengan tingkat pencapaian diatas 90%. Sedangkan sisanya 4 program memiliki tingkat pencapaian dibawah 66,67%, dengan pencapaian

terendah ada pada program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan tingkat pencapaian hanya 40% terkait dengan Ketersediaan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :

Program Pengembangan Permukiman dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dapat direalisasikan sebanyak 1 unit untuk melayani 40 KK di Desa Kolorae Kecamatan Raijua.
- b. Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan pengawasan dan supervisi spam perdesaan yang ada didaratan Sabu Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena usulan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN tidak terlaksana di tahun 2022.
- c. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah terdiri dari kegiatan pembinaan spam perdesaan yang ada didaratan Sabu Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena usulan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN tidak terlaksana di tahun 2022.

**B. Analisis Program/Kegiatan Rasio Kepatuhan IMB**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :

Program Penataan Bangunan Gedung dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 3 dokumen perencanaan ( perencanaan gedung kantor SKPD, perencanaan pagar civic center, perencanaan pembangunan selasar Kantor Camat Sabu Tengah, 4 dokumen kegiatan pengawasan pekerjaan gedung kantor, 2 unit pembangunan fisik gedung kantor terdiri dari Pembangunan Gedung DPRD, dan Pembangunan Kantor Camat Raijua, Pembangunan 2 unit pos jaga rumah jabatan dan 3 unit pagar kantor camat.
- b. Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten / Kota yang dilaksanakan kegiatan monitoring dan pendataan bangunan gedung negara di 6 kecamatan.

**C. Analisis Program/Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :

Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota dapat direalisasikan 1 dokumen perencanaan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau dikecamatan Sabu Barat.

**D. Analisis Program/Kegiatan Kemantapan Jalan Kabupaten**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :

Program Penyelenggaraan Jalan dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian direalisasikan perencanaan DED jalan tahun 2022 di 6 kecamatan, Penguatan Data Base Survey kondisi Jalan sesuai SK Jalan Kabupaten, Penguatan Data Base Survey kondisi Jembatan di 6 kecamatan.

Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena perencanaan DED Jembatan Lobodei penyedia tidak menandatangani kontrak (mengundurkan diri).

- b. Panjang Jalan yang dibangun dari target 28,3 KM dapat direalisasikan 28,3 KM lokasi kegiatan pada 40 ruas jalan sesuai SK Jalan Kabupaten.
- c. Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan dari target 14 KM dapat direalisasikan 14 KM lokasi kegiatan pada 3 ruas jalan di Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Liae dan Kecamatan Sabu Barat sesuai SK Jalan Kabupaten.
- d. Panjang Jalan yang direhabilitasi Jalan dari target 700 Meter dapat direalisasikan 700 Meter lokasi kegiatan pada ruas jalan Tanajawa - Lohohede.
- e. Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan terdiri dari kegiatan pengawasan pekerjaan konstruksi jalan wilayah Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Liae, Sabu Timur, Hawu Mehara, Raijua dan pengawasan pekerjaan konstruksi jalan HRS (Base). Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena penyedia tidak dapat melengkapi dokumen pencairan 100% (PHO dan Invoice).

**E. Analisis Program/Kegiatan Ketersediaan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota pelaksanaan kegiatan ini berupa pengambilan titik advis plan di 6 kecamatan. Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena efisiensi. Personil yang melakukan pengambilan advis plan disesuaikan dengan jumlah pemohon.
- b. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan sosialisasi RTRW dan RDTR di 6 kecamatan, honor TKPRD, Honor tim penyusun naskah akademik Ranperda tentang RTRW periode 2022 s/d 2042. Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena Kegiatan sinkronisasi RTRW dari Kementerian ATR/BPN mendapatkan jadwal di triwulan I tahun 2023 sehingga kegiatan sosialisasi RTRW tidak dapat dilaksanakan, sedangkan dokumen pendukung berupa draft Naskah Akademik, draft Ranperda telah diselesaikan tahun 2022.

**F. Analisis Program/Kegiatan Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :  
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan dengan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari pengadaan sertifikat tanah Pemda sebanyak 20 bidang dan 120 buah pilar batas tanah. Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena rencana pembiayaan untuk pengalihan sertifikat tanah Pemda (Gedung Penyuluh KB Kecamatan Liae) ke Pemerintah tidak di punggut biaya dan penggantian sertifikat tanah masyarakat terdampak pelebaran jalan disesuaikan dengan luasan bidang tanah.
- b. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari kegiatan pengukuran tanah Pemda, pengambilan titik koordinat tanah Pemda, Penyelesaian Permasalahan Tanah Pemda di 6 Kecamatan dan Honor Tim penyelesaian masalah tanah di Kabupaten Sabu Raijua. Pencapaian indikator kinerja tidak mencapai 100% disebabkan karena ada efisiensi pada kegiatan rapat dan perjalanan dinas.

#### **G. Analisis Program/Kegiatan Rumah Tangga Bersanitasi**

Untuk mencapai sasaran indikator diatas, didukung dengan Program antara lain :

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun dapat direalisasikan 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan MCK tahun 2022 dilokasi Kecamatan Raijua, Kecamatan Hawu Mehara dan Kecamatan Liae.
- b. Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman terlaksananya 1 kegiatan pendataan rumah tangga bersanitasi layak di Kecamatan Hawu Mehara tidak dapat mencapai 100% disebabkan karena tugas utama supervisi sudah dapat dijalankan oleh fasilitator.
- c. Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman terlaksananya kegiatan pembangunan septiktank individual sebanyak 200 Rumah Tangga di 4 Desa yaitu Desa Ledekepaka, Desa Molie, Desa Wadumedi dan Desa Ledetalo.

#### **H. Analisis Program/Kegiatan Berkurangnya jumlah unit Rumah tidak layak huni ( RLTH )(% )**

Diharapkan kedepan agar anggaran untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertambah lagi melalui APBD Ataupun DAK. Hal lain yang menyebabkan berkurangnya realisasi dikarenakan belum adanya data base RTLH yang sinkron.

Persentase berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani Pada Tahun 2022 dengan realisasi Pencapaian target adalah sebesar33% yang telah tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 29,34% Dengan Perhitungannya itu jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)dibagi jumlah rumah Kabupaten dikali 100. Dengan data 7.994 Rumah / 23.906 rumah x 100 = 33%. Realisasi Pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 berkurang dari tahun sebelumnya dimana capaian pada tahun 2021 sebesar42,05% sedangkan di Tahun 2022 telah mengalami penurunan dimana realisasi pada tahun ini sebesar33%. Faktor utama dalam penurunan angka realisasi di tahun 2022 karena berkurangnya anggaran yang di peroleh sehingga mengakibatkan pengurangan volume perbaikan rumah tidak layak huni.

**I. Analisis Program/Kegiatan Rumah Layak Hani Yang Ditangani**

Persentase Rumah Layak Huni yang tertangani Pada Tahun 2022 dengan realisasi Pencapaian target adalah sebesar 58,11% yang telah tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 100% Dengan Perhitungan yaitu Jumlah rumah yang tertangani dibagi jumlah rumah Kabupaten dikali 100. Dengan data 13.894 Rumah / 23.906 rumah x 100 = 58,11%. Pencapaian tersebut terjadi dengan adanya bantuan dari dana DAK sebesar 50 Rumah dan Bantuan (BRSK) sebanyak 30 rumah. Diharapkan kedepan agar anggaran untuk penanganan rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bertambah lagi melalui APBD Ataupun DAK. Realisasi Pada Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021 telah meningkat dari tahun sebelumnya dimana capaian pada tahun 2021 sebesar 8,4% sedangkan di Tahun 2022 telah mengalami peningkatan dimana realisasi pada tahun ini sebesar 58,11%.

**J. Analisis Program/Kegiatan perumahan yang sudah dilengkapi PSU**

Realisasi Pada Kegiatan Ini Adalah 100% ,Anggaran Yang Digunakan disesuaikan Dengan DPA.

**K. Analisis Program/Kegiatan Kawasan permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang ditangani**

Indikator Presentasi Kawasan permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang ditangani pada tahun 2022 dengan Target 100 % dan realisasi 100%. Program/Kegiatan yang menunjang realisasi tersebut adalah Program Kawasan Permukiman dengan kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Anggaran yang disediakan dalam kegiatan tersebut adalah untuk membiayai Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Sosialisasi Rp3KP) sebesar Rp70.961.000,- serta Pembayaran Piutang Kegiatan Penyusunan Dokumen RP3KP yang Telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp630.400.000,-

- Jumlah rumah korban bencana yang dibangun dengan target 6 Unit dan terealisasi 6 Unit dengan capaian 100 %. Kegiatan Pembangunan Rumah Korban Bencana dilaksanakan di Desa Nadawawi Kecamatan Sabu Barat.



**Gambar 3.115** Rumah Penerima Bantuan

- Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) yang tersusun target 1 Dok dan terealisasi 1 Dok dengan capaian 100 %.



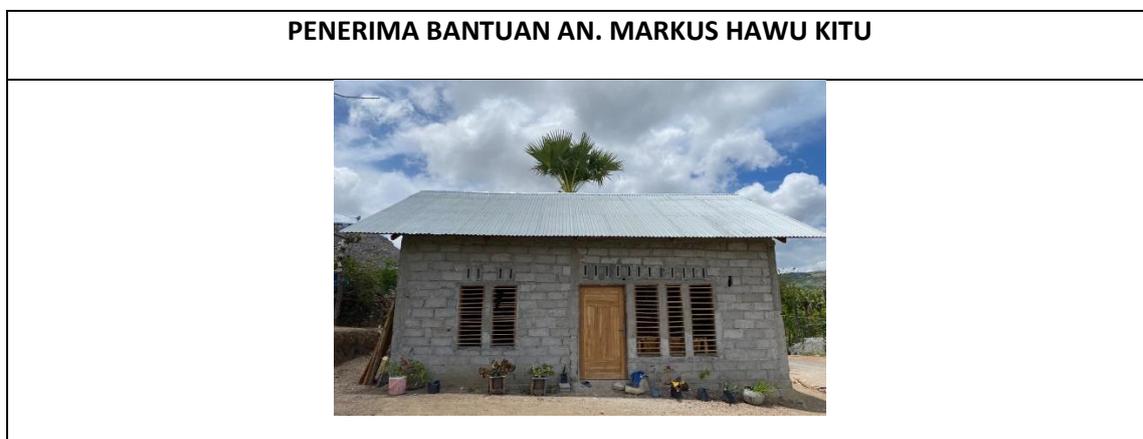
**Gambar 3.116** Rumah Penerima Bantuan

- Jumlah sosialisasi lingkungan sehat perumahan dengan target 1 Kegiatan dan terealisasi 1 keg. hasil capaian 100 %



**Gambar 3.117** Sosialisasi

- Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dengan target 30 unit, realisasi 30 Unit (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di desa Ledeara Kecamatan Sabu Barat.



**Gambar 3.118** Penerima Bantuan

- Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki (DAK) dengan target 50 unit, realisasi 50 unit (100%). Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Loborui Kecamatan Sabu Liae, Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat, Desa Eiada kecamatan Sabu Timur.
  - Desa Eiada Kecamatan Sabu Timur



**Gambar 3.119** Penerima Bantuan

- Desa Loborui Kecamatan Sabu Liae



**Gambar 3.120** Penerima Bantuan

- Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat



**Gambar 3.121** Penerima Bantuan

- Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU Perumahan. Target 1 dokumen. Realisasi 1 dokumen (100 %)
- Jumlah perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dengan target 75 kali perjalanan. Realisasi 75 kali perjalanan (100%).



**Gambar 3.122** Survei Jalan Lingkungan

## 11) Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR

**Tabel 3.20** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.1	Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ	Persen	100	100	100	Dishub
2	Pengelolaan Pelayaran	2.1	Terwujudnya Pengelolaan Pelayaran	Persen	100	100	100	Dishub

Data diatas menunjukkan dari 2 program yang mendukung upaya pencapaian Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, secara signifikan tingkat pencapaian program sebesar 100%. Namun demikian capaian sasaran kinerja terkait Terwujudnya TRANSPORTASI LANCAR dengan indikator Pertumbuhan Sub Sektor Transportasi dan Pergudangan hanya mencapai 44,31% dari target yang ditetapkan.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan ketersediaan fasilitas LLAJ**

Berdasarkan realisasi capaian kinerja pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja persentase ketersediaan fasilitas LLAJ pada tahun 2022 lebih besar di bandingkan capaian kinerja pada tahun 2021.

- a. Jumlah perlengkapan jalan yang diadakan pada tahun 2022 dengan target sebanyak 32 Unit rambu yang terpasang pada ruas jalan kabupaten Pedarro – Wadumaddi dengan persentase **100%**. Berdasarkan persentase tersebut maka kegiatan tersebut dikategorikan **berhasil**.



**Gambar 3.123** Pengadaan Rambu

- b. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.  
Jumlah Subsidi BBM yang disediakan dengan target 38.500 Liter. Subsidi BBM tersebut digunakan untuk angkutan anak sekolah selama 11 bulan di Kecamatan Sabu Barat, Kecamatan Sabu Liae, Kecamatan Sabu Tengah, Kecamatan Sabu Timur dan Kecamatan Hawu Mehara yang dilakukan dengan persentase **100%**. Kegiatan ini dikategorikan **berhasil**.

**B. Analisis Program/Kegiatan pengelolaan pelayaran**

Sedangkan pada indikator kinerja terwujudnya pengelolaan pelayaran tahun 2021 lebih besar dibandingkan capaian kinerja 2022. Dapat disimpulkan bahwa target pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perhubungan belum maksimal.

Penyediaan dokumen perencanaan/ DED (Detail Engineering Design) Kapal Bus Air Ro-Ro dengan persentase **100%**. Kegiatan ini dikategorikan **berhasil**.

- a) Adapun factor- factor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja sebagai berikut:

1. Kurangnya kualitas sumber daya manusia
2. Minimnya pendanaan
3. Terbatasnya sarana dan fasilitas

- b) Solusi

1. Adanya diklat teknis secara periodic
2. Adanya dukungan kebijakan terkait pendanaan dalam bidang transportasi dari kepala daerah
3. Adanya komitmen dan transparansi dalam lingkup Dinas Perhubungan

## 12) Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI

**Tabel 3.21** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Informasi dan Kominkasi Publik	1.1	Presentasi masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	94,90	93,48	98,50	DisKominfo
		1.2	Prensetasi layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	28,57	15,78	55,23	DisKominfo
		1.3	Presentasi OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	90,95	97,43	107,13	DisKominfo
2	Aplikasi Informatika	2.1	Indeks SPBE (sesuai dengan penilaian Menpan skala 1-5)	%	1,56	1,05	67,30	DisKominfo
3	Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	3.1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	34,00	35,89	105,55	DisKominfo

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
4	Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	4.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2,56	0	0	Diskominfo

Data diatas menunjukkan dari 4 program yang mendukung upaya pencapaian Meluasnya Pemanfaatan TEKNOLOGI INFORMASI yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo, terdapat 1 program yang pencapaiannya melampaui target (105,55%) yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Selanjutnya terdapat 1 program dengan 3 indikator yang 2 diantaranya memiliki pencapaian diatas 98% sedangkan 1 indikatornya hanya mencapai 55,23%. Sedangkan 1 program lg terkait dengan Aplikasi Informatika dengan indikator Indeks SPBE (sesuai dengan penilaian Menpan skala 1-5) memiliki tingkat pencapaian sebesar 67,30% dari target yang ditetapkan. Sedangkan 1 program lainnya yaitu program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi tidak mencapai target yang diharapkan akibat dari belum terlaksananya mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara secara berkelanjutan.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapai sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

**A. Analisis Program/Kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten**

Penyebaran informasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dilakukan melalui RSPD Kabupaten Sabu Raijua dan media informasi lainnya seperti Website pemerintah daerah, dan media sosial lainnya.

Diharapkan melalui media-media yang ada, masyarakat secara dapat menyeluruh mengakses dan memperoleh informasi tentang jalannya pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Dengan adanya kegiatan dialog interaktif pada RSPD Kabupaten Sabu Raijua yang menghadirkan pimpinan OPD secara bertahap, masyarakat dapat mendengarkan berbagai macam program kegiatan pemerintah daerah yang muaranya untuk pemenuhan kebutuhan rakyat menuju masyarakat sejahtera dan menuju Sabu Raijua yang Maju, Mandiri dan Bermartabat. Presentasi capaian penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten tahun 2022 sebesar 93,48%.



**Gambar 3.124** Website Kabupaten Sabu Raijua

Tertuang RPJMD target /Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang harus dicapai hingga tahun 2026 adalah 72,00 untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika akan terus berupaya dan berinovasi melalui kegiatan-kegiatan lain yang kemudian akan mencapai target yang telah ditetapkan.

**B. Analisis Program/Kegiatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**

Jumlah cakupan perangkat daerah yang telah menerapkan sistem pelayanan berbasis *e-government* pada Tahun 2022 sebanyak 57 layanan aplikasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sebagaimana yang terdata pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.22** Daftar Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online

No	Nama Aplikasi	Nama Layanan	Alamat (URL) jika webbase
1	Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE	<a href="http://lpse.saburaijuakab.go.id/eproc4">http://lpse.saburaijuakab.go.id/eproc4</a>
2	Perizinan	OSS	<a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>
3	Persetujuan Bagunan Gedung	PBG	<a href="https://simbg.pu.go.id/">https://simbg.pu.go.id/</a>
4	Informasi Gaeospasial	Geoportal	<a href="https://geoportal.saburaijuakab.go.id">https://geoportal.saburaijuakab.go.id</a>
5	Info Publik	PPID	<a href="https://ppid.saburaijuakab.go.id">https://ppid.saburaijuakab.go.id</a>
6	Produk hukum daerah	JDIH	<a href="https://saburaijuakab.jdihn.go.id">https://saburaijuakab.jdihn.go.id</a>
7	Perpustakaan	I-Sarai	<a href="https://web-isarai.moco.co.id">https://web-isarai.moco.co.id</a>
8	Pengaduan Layana Publik	E-Lapor	<a href="https://www.lapor.go.id">https://www.lapor.go.id</a>
9	Aspirasi	E-aspirasi	<a href="#">Layanan berbasis Android</a>

**C. Analisis Program/Kegiatan OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**

Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan jaringan internet intra pemerintah daerah, seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua telah terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah. Hal ini lakukan atas amanant regulasi terkait SPBE (Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik) dan untuk mendukung kelancaran Pelayanan, Pekerjaan dan kinerja ASN dan Pemerintahan di Kabupaten Sabu Raijua.

**Tabel 3.23** Cakupan Akses Internet Pemerintah Tahun 2022

NO	NAMA INSTANSI	TOTAL BANDWIDTH	KET
1	BAGIAN UMUM (RUANGAN ASISTEN)	3	
2	SEKRETARIAT DPRD	4	
3	INSPEKTORAT DAERAH	4	
4	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4	
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	4	
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	4	
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	
12	DINAS PARIWISATA	4	
13	DINAS PERHUBUNGAN	4	
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	
16	DINAS TRANSMIGRASI, KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	4	
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4	
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3	
20	BADAN KEUANGAN DAERAH	4	
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4	
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4	
23	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4	
25	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	
26	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	4	
27	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4	
28	BAGIAN HUKUM	4	
29	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	4	
30	BAGIAN PEMBANGUNAN	4	
31	BAGIAN PEREKONOMIAN	4	
32	BAGIAN ORGANISASI	4	
33	KANTOR CAMAT SABU TENGAH	4	

NO	NAMA INSTANSI	TOTAL BANDWIDTH	KET
34	KANTOR CAMAT SABU TIMUR	4	
35	KANTOR CAMAT HAWU MEHARA	4	
36	KANTOR CAMAT LIAE	4	
37	KANTOR CAMAT SABU BARAT	4	
38	KANTOR CAMAT RAIJUA	4	
<b>TOTAL BANDWIDTH YANG DISALURKAN</b>		<b>150</b>	

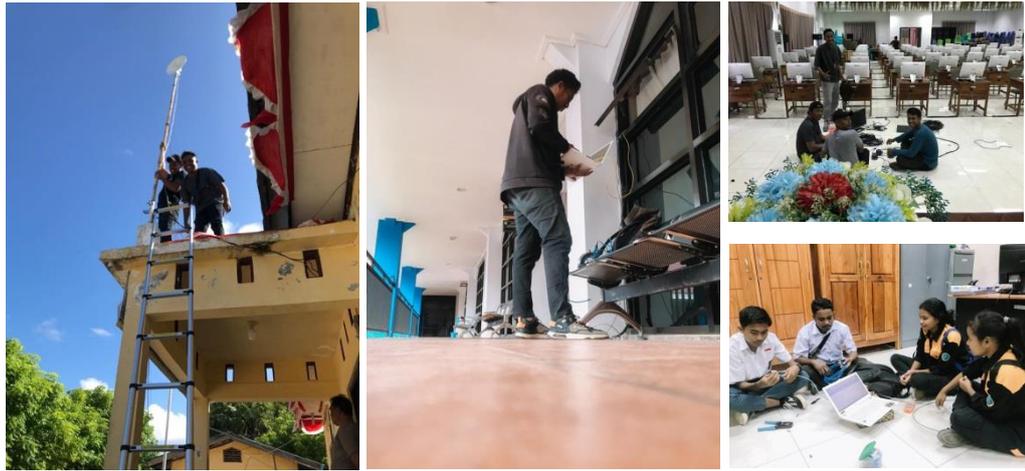
Demi mendukung kelancaran dan mengatasi gangguan konektifitas internet intra Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua juga melakukan pengembangan Sumber Daya Manuasi pengelola jaringan intra Pemerintah Daerah dengan mengikut sertakan ASN yang ada di Dinas Komunikasi dan informatika dalam kegiatan Training di Citraweb Yogyakarta baik tingkat *Basic Mikrotik Training* (MTCNA) maupuh tingkat *Advanced Mikrotik Training - Routing* (MTCRE).



**Gambar 3.125** Kegiatan Basic Mikrotik Training (MTCNA) tanggal 26-28 Juli 2022 di Citraweb, Yogyakarta



**Gambar 3.126** Advanced Mikrotik Training - Routing (MTCRE) tanggal 8-10 November 2022 di Citraweb, Yogyakarta



**Gambar 3.127** Penangan Gangguan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022

**D. Analisis Program/Kegiatan SPBE**

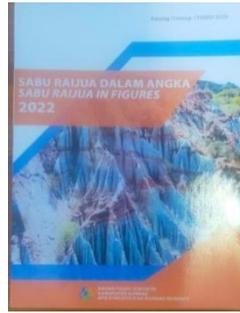
Indeks SPBE Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 2,6 dari tahun sebelumnya sebesar 1,05. Dalam Pengukuran indeks SPBE terdapat 34 indikator yang menjadi bahan evaluasi, indikator-indikator dimaksud tertuang dalam PERMENPANRB nomor 59 tahun 2020 pemantauan dan evaluasi SPBE. Jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD hingga tahun 2026 sebesar 2,00 maka dapat disimpulkan bahwa indeks capaian tahun 2022 sudah melebihi target yang direncanakan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua akan terus berkomitmen dan berupaya untuk terus meningkatkan capaian indeks SPBE ditahun-tahun yang akan datang.

**E. Analisis Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**

Dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, Organisasi Perangkat Daerah menggunakan Data Statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral dan berkonsultasi serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kupang untuk dapat mengadakan buku produk BPS dan didistribusikan pada setiap Organisasi perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Sabu Raijua. Pada tahun 2022 terdapat 9 jenis Buku Produk Badan Pusat Statistik yang digandakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk di sebar pada setiap perangkat daerah dan Desa.

- A. Buku Kabupaten Sabu Raijua Dalam Angka Tahun 2022 sebanyak 62 buku.

Foto Buku:



**Gambar 3.128** Dokumen Sabu Raijua Dalam Angka

- B. Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2022 sebanyak 159 buku.

Foto Buku:



**Gambar 3.129** Dokumen Kecamatan Dalam Angka

- C. Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan Tahun 2017 – 2021 sebanyak 50 buku.

Foto Buku:



**Gambar 3.130** Dokumen Produk Domestik Regional Bruto

- D. Buku Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017– 2021 sebanyak 50 buku.

Foto Buku:



**Gambar 3.131** Dokumen Produk Domestik Regional Bruto

#### F. Analisis Program/Kegiatan keamanan informasi pemerintah

Berkaitan dengan tingkat keamanan system informasi pemerintah daerah belum berjalan secara baik disebabkan oleh harus adanya mekanisme koordinasi dan kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara secara berkelanjutan.

### 13) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang BERKELANJUTAN

**Tabel 3.24** Analisis program/kegiatan pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang BERKELANJUTAN

NO	PROGRAM	No	INDIKATOR PROGRAM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	OPD Pelaksana
1	Perencanaan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	EQI	69	70,79	102,5	DLH
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Hidup		Cakupan Pengawasan Kegiatan AMDAL	%	100	100	100	DLH
3	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	8,23	8,23	100	DLH
4	Pengelolaan Persampahan		Persentase Pengelolaan Sampah	%	100	100	100	DLH

Data diatas menunjukkan dari 4 program yang mendukung upaya pencapaian Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang BERKELANJUTAN yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, semua program menunjukkan tingkat pencapaian rata-rata 100% dari target yang ditetapkan.

Analisis program/kegiatan dalam rangka pencapaiin sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Analisis Program/Kegiatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Sabu Raijua maka didapatkan hasil akhir perhitungan Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Sabu Raijua dengan Point 70,79. Point tersebut telah mencapai target IKLH yang ditetapkan yaitu 69 Point. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sabu Raijua berada pada kondisi baik sesuai dengan penilaian pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, Indikator sasaran yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan target yang diharapkan yaitu 69 yang terdiri dari : Peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA), Peningkatan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Peningkatan Indeks Tutupan Lahan (IKTL).

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas masing-masing dengan rumus tersendiri:

**Indeks Kualitas Air :**

$$: IP= \frac{\sum(Ci/Lij)^2}{n} \text{ Rata-rata} + (Ci/Lij)^2$$

2

Dari perhitungan diperoleh nilai 45,00, sehingga indikator IKU tercapai karena target yang diharapkan adalah 62.18.

**Indeks Kualitas Udara, rumusnya :**

$IKU = 100 - [50/0.9 \times (Ieu - 0.1)]$ , dari perhitungan diperoleh nilai 100, sehingga untuk indikator IKU sudah tercapai karena target yang diharapkan adalah 90,59

**Indeks Kualitas Tutupan lahan, rumusnya :**

$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$  dari perhitungan diperoleh nilai 61,05, sehingga untuk indikator IKU sudah tercapai karena target yang diharapkan adalah 29,84.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2022 untuk indikator rata-rata persentase pencapaian program adalah 100%, memenuhi target yang

ditetapkan yaitu 100% dengan tersusunnya 1 dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2022 yaitu 45,00



Berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2022 yaitu 100,00



Berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2022 yaitu 61,05



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua dihitung berdasarkan nilai IKA, IKU dan IKTL dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.25** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

KATEGORI	INDEKS	BOBOT
INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	45	0,376
INDEKS KUALITAS UDARA	100	0,405
INDEKS KUALITAS TUTPAN LAHAN	61,05	0,219

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 mendapatkan hasil keseluruhan dengan nilai 70,79 di mana kondisi tersebut mendapat kategori baik.

**Tabel 3.26** Kondisi Kategori

KATEGORI	ANGKA RENTANG
Sangat baik	$90 \leq x \leq 100$
BAIK	$70 \leq x < 90$
Sangat Sedang	$50 \leq x \leq 70$
Kurang	$25 \leq x \leq 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air tahun 2022 diperoleh dari hasil uji kualitas air di dari beberapa titik sample pada mata air yaitu :

- Sumur Gali Lokoae
- Kali Kuji Ratu
- Kali Tenihawu
- Mata Air Lokoeimada
- Mata Air Madakaba
- Mata Air Menanga
- Sumur Gali Lede Waga

IKLH merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten. Bila Indeks Kualiatas Udara meningkat, maka capaian IKU juga akan meningkat. Untuk tetap meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan penanaman tanaman perindang jalan yang efektif menyerap polutan udara, maupun dengan memperbanyak penanaman pohon di lahan kritis dan lahan lindung. Disamping itu perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang menghasilkan polusi dan sampah agar menaati persyaratan teknis dalam pencegahan pencemaran Lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 dibandingkan target pada akhir Renstra (target IK udara tahun 2022 =70,79) masuk dalam predikat baik karena prosentasenya di atas 70 point yaitu 70,79 point.

**B. Analisis Program/Kegiatan Cakupan Pengawasan Kegiatan Amdal**

Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

**Tabel 3.27** Cakupan Pengawasan AMDAL

No	Uraian	Tahun
1	Jumlah Seluruh Usaha/Kegiatan Pemerintah dan masyarakat Wajib AMDAL yang telah diawasi	5 Usaha/Kegiatan
2	Jumlah Seluruh Usaha/Kegiatan Pemerintah dan masyarakat Wajib UKL / UPL	2 Usaha/Kegiatan
3	Cakupan	100%

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL secara aktif dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan – perusahaan di Kabupaten Sabu Raijua untuk mendorong pemrakarsa/perusahaan agar senantiasa konsisten melaksanakan kewajiban yang tertuang pada Dokumen Lingkungan Hidup yang dimiliki dan mematuhi peraturan perundang – undangan bidang lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan pengawasan dikaitkan dengan pelaksanaan rekomendasi, antara lain dari: hasil Proper, hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL, UKL dan UPL periode sebelumnya, hasil pemantauan rutin terhadap kualitas air, kualitas udara ambient serta rekomendasi tindak lanjut adanya pengaduan masyarakat.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2022 untuk indikator rata-rata persentase pencapaian program adalah 97,04%, belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%.

**C. Analisis Program/Kegiatan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**

Data Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2022 sebanyak :

- SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) sebanyak 47 dokumen
- UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) sebanyak 2 Dokumen.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2022 untuk indikator rata-rata persentase pencapaian program adalah 98%, belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100%.

**D. Analisis Program/Kegiatan pengelolaan sampah**

Berikut data Jumlah Jumlah Sampah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022

Perkiraan Produksi Sampah	36,3348	Ton/Hari
Jumlah sampah yang terangkut ke TPA	1,546	Ton/Hari
Jumlah Sampah yang diantar langsung ke TPA	1,546	Ton/Hari
Jumlah Sampah yang terkelola	1,546	Ton/Hari
Jumlah Sampah yang tidak terangkut dan terkelola	36,802	Ton/Hari

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan yang indikator yaitu : **Persentase Pengelolaan Sampah**

1. Persentase Sampah yang terangkut ke TPA

Untuk persentase Jumlah sampah yang terangkut ke TPA, rumusnya adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Sampah yang terangkut ke TPA}}{\text{Perkiraan Produksi Sampah}} \times 100 \%$$

$$\frac{1.546}{36.3348} \times 100 \% = 0.0525 \%$$

Untuk target yang diharapkan yaitu 100 %, maka indikator diatas dinyatakan belum berhasil. Hal ini terjadi karena minimnya anggaran, tidak memiliki tenaga kebersihan, kurangnya Sarana prasarana persampahan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Transparansi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua sebagai kabupaten yang sedang berkembang sangat ditonjolkan untuk memotivasi perkembangan kemandirian ekonomi, belanja pemerintah dapat menjadi salah satu penggerak perekonomian. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua merealisasikan pendapatan sebesar Rp566.681.051.422,44 atau 93,74% dari target sebesar Rp604.507.472.367,00. Realisasi pendapatan tahun ini berkurang sebesar Rp17.153.791.234,91 atau 2,94% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2021 sebesar Rp583.834.842.657,35. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 sebesar Rp574.823.815.297,70 atau 89,59% dari anggaran sebesar Rp641.636.086.568,00. Realisasi Belanja Daerah tahun ini berkurang sebesar Rp68.557.575.159,92 atau 10,66% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp643.381.390.457,62.

### 1. Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar Rp31.829.660.587,44,00 dari target Rp52.343.352.290,00 atau 60,81%. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp3.490.415.142,09 atau 12,32% dibanding realisasi tahun 2021 yaitu sebesar Rp28.339.245.445,35. Perbandingan rincian realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.28** Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2022	2021	% Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pajak Daerah	5.661.974.798,04	4.543.581.620,00	24,61
2	Retribusi Daerah	18.160.726.740	5.189.605.100	249,94
3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.329.492.032,00	3.471.789.164,00	(32,90)
4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	5.677.467.017,40	15.134.269.561,35	(62,49)
	<b>Total PAD</b>	<b>31.829.660.587,44</b>	<b>28.339.245.445,35</b>	<b>12,32</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan presentasi kenaikan/(penurunan) adalah

perbandingan realisasi PAD tahun 2021 dan 2022. Secara keseluruhan pendapatan asli daerah meningkat sebesar 12,32%, hal ini bersumber dari peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu deviden dari PT. Bank Pembangunan Daerah NTT mengalami penurunan sebesar 32,90% dari tahun sebelumnya. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berkurang sebesar 62,49% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena adanya perubahan jenis pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang awalnya dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sekarang dicatat sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- b. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 sebesar Rp511.971.557.210,00 dari target Rp527.703.242.097,00 atau 97,02. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp24.892.756.002,00 atau 4,64% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp536.864.313.212,00. Penurunan realisasi Pendapatan Transfer disesuaikan dengan alokasi dari Pemerintah Pusat. Rincian pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.29** Realisasi Pendapatan Transfer

No	Uraian	2022	2021	% Kenaikan/ (Penurunan)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.647.358.866,00	11.333.430.516,00	(14,88)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	336.260.812.302,00	336.885.937.000,00	(0,19)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	67.791.045.075,00	67.400.137.692,00	0,58
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	23.783.563.711,00	25.654.671.564,00	(7,29)
5	Dana Desa	60.882.277.028,00	84.560.860.770,00	(28,00)
6	Pendapatan Bagi Hasil Propinsi	13.606.500.228,00	11.029.275.670,00	23,37
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>511.971.557.210,00</b>	<b>536.864.313.212,00</b>	<b>(4,64)</b>

- c. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp22.879.833.625,00 dari target Rp24.460.877.980,00. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp4.248.549.625,00 atau 22,80% dibanding realisasi tahun 2021 sebesar Rp18.631.284.000,00. Peningkatan ini disebabkan karena adanya perubahan jenis pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang awalnya dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sekarang dicatat sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.30** Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah

No	Uraian	2022	2021	% Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Hibah	885.825.500,00	1.475.127.000,00	(39,95)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	21.994.008.125,00	17.156.157.000,00	28,20
	<b>Total Lain-Lain Pendapatan Daerah</b>	<b>22.879.833.625,00</b>	<b>18.631.284.000,00</b>	<b>22,80</b>

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua terus berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan kebijakan berikut:

- 1) Melakukan optimalisasi Pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- 2) Memprioritaskan penanganan sektor-sektor unggulan yang dapat memberikan manfaat ganda, yakni peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah;
- 3) Meningkatkan promosi pariwisata untuk menambah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran.

Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian Daerah juga akan membaik. Berikut perbandingan rasio kemandirian daerah Kabupaten Sabu Raijua dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 3.31** Rasio Kemandirian Daerah

No	Tahun	Dana Perimbangan	PAD	Rasio Kemandirian Daerah
1	2022	437.482.779.954,00	31.829.660.587,44	7,28
2	2021	441.274.176.772,00	28.339.245.445,35	6,42
3	2020	479.064.608.440,00	36.433.624.244,95	7,61
4	2019	476.952.268.330,00	31.937.211.458,10	6,70
5	2018	443.920.629.300,00	31.139.294.535,86	7,01

## 2. Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Realisasi belanja untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua yang dapat memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi direalisasikan sebesar Rp341.133.860.908,70 dari anggaran sebesar Rp383.926.677.821,00 atau 88,85%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp9.551.941.066,30 atau 2,72% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp350.685.801.975,00. Rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.32** Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>383.926.677.821,00</b>	<b>341.133.860.908,70</b>	<b>88,85</b>	<b>350.685.801.975,00</b>
Belanja Pegawai	193.378.416.095,00	172.071.722.075,00	88,98	171.945.977.759,00
Belanja Barang	179.592.496.883,00	161.021.210.547,70	89,66	168.356.423.250,00
Belanja Hibah	48.300.000,00	47.400.000,00	98,14	8.158.554.162,00
Belanja Bantuan Sosial	7.905.167.843,00	5.138.426.286,00	65,00	2.224.846.804,00
Belanja Bantuan Keuangan	3.002.297.000,00	2.855.102.000,00	95,10	0,00

- b. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu

diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah : tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika:

- 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja modal direalisasikan sebesar Rp137.291.124.197,00 dari anggaran sebesar Rp149.863.987.142,00 atau 91,61%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp21.800.006.676,62 atau 13,70% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp159.091.130.873,62. Rincian realisasi belanja modal tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.33** Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>149.863.987.142,00</b>	<b>137.291.124.197,00</b>	<b>91,61</b>	<b>159.091.130.873,62</b>
Belanja Modal Tanah	13.500.000,00	8.411.920,00	62,31	27.472.380,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.677.912.888,00	9.247.832.312,00	95,56	19.736.931.091,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.096.828.617,00	31.557.107.226,00	89,91	33.815.385.571,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.017.733.837,00	93.612.153.264,00	91,76	98.642.948.466,62
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.058.011.800,00	2.865.619.475,00	93,71	6.868.393.365,00

- c. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan darurat meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3) Perusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Belanja tidak terduga direalisasikan sebesar Rp216.151.500,00 dari anggaran sebesar Rp11.026.917.843,00 atau 1,96%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp13.395.016.839,00 atau 98,71% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp13.611.168.339,00.

- d. Belanja Transfer direalisasikan sebesar Rp96.182.678.692,00 dari anggaran sebesar Rp96.818.503.762,00 atau 99,34%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp23.810.610.578,00 atau 19,84% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp119.993.289.270,00.

Belanja transfer terdiri atas belanja bagi hasil kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

**Tabel 3.34** Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran Strategis melalui Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	OPD
1	2	3	4	5	6	7
<i>MISI I</i>						
<i>MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN</i>						
1	Pengelolaan Pendidikan	47.573.941.949	45.270.293.395	2.303.648.554	95,16	PKKO
2	Pengembangan Kurikulum	205.319.250	196.540.000	8.779.250	95,72	PKKO
3	Pengendalian Perizinan Pendidikan	89.800.000	13.725.000	76.075.000	15,28	PKKO
4	Pembinaan Perpustakaan	209.295.000	82.500.000	126.795.000	39,42	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN
5	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.181.344.565	1.035.568.474	145.776.091	87,66	PKKO
6	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	765.975.000	749.370.000	16.605.000	97,83	PKKO
7	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	410.000.000	410.000.000	0	100,00	PKKO
8	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	46.130.583.324	41.577.827.224	4.552.756.100	90,13	DINKES & RSUD
9	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	606.534.877	434.371.701	172.163.176	71,62	DINKES
10	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minum	90.870.200	83.840.500	7.029.700	92,26	DINKES
11	Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	3.218.409.900	3.208.440.000	9.969.900	99,69	DINKES
12	Program pengendalian penduduk	15.180.000	7.728.000	7.452.000	50,91	DINKES

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	OPD
1	2	3	4	5	6	7
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.725.172.400	1.115.061.900	610.110.500	64,63	DINKES
14	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	945.815.000	449.427.043	496.387.957	47,52	DINSOS
15	Pemberdayaan Sosial	471.575.000	471.135.000	440.000	99,91	DINSOS
16	Rehabilitasi Sosial	223.029.580	208.439.000	14.590.580	93,46	DINSOS
17	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.273.880.000	1.264.281.000	9.599.000	99,25	DINSOS
18	Penanganan Bencana	613.528.000	556.748.500	56.779.500	90,75	DINSOS
19	Pengarus Utama Gender dan Pemberdayaan Perempuan	50.807.000	48.064.456	2.742.544	94,60	DINSOS
20	Perlindungan Perempuan	351.715.750	277.392.100	74.323.650	78,87	DINSOS
21	Peningkatan Kualitas Keluarga	89.637.000	82.063.733	7.573.267	91,55	DINSOS
22	Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak	26.206.000	19.925.000	6.281.000	76,03	DINSOS
23	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	275.618.300	254.485.024	21.133.276	92,33	DINSOS
24	Perlindungan Khusus Anak	448.930.825	261.115.800	187.815.025	58,16	DINSOS
25	Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	254.790.689	242.318.874	12.471.815	95,11	DISNAKERTRANS
26	Penempatan Tenaga Kerja	409.685.688	407.264.500	2.421.188	99,41	DISNAKERTRANS
27	Hubungan Industrial	22.126.000	20.846.000	1.280.000	94,21	DISNAKERTRANS
28	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	17.840.000	17.290.000	550.000	96,92	DISNAKERTRANS
29	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	37.099.000	25.438.000	11.661.000	68,57	DISNAKERTRANS
30	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	45.472.150	44.703.400	768.750	98,31	DISNAKERTRANS

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	OPD
1	2	3	4	5	6	7
31	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.322.195.000	1.293.224.300	28.970.700	97,81	DISNAKERTRANS
32	Pengembangan UMKM	209.450.000	199.666.800	9.783.200	95,33	DISNAKERTRANS
33	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	63.719.700	63.392.150	327.550	99,49	DISNAKERTRANS
34	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	33.650.000	32.618.713	1.031.287	96,94	DISNAKERTRANS
35	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	780.201.843	736.157.603	44.044.240	94,35	DINAS PMD
<b>JUMLAH</b>		<b>110.189.398.990</b>	<b>101.161.263.190</b>	<b>9.028.135.800</b>	<b>91,81</b>	
<b>MISI II</b>						
<b>MENJAMIN KETERCUKUPAN PANGAN, AIR DAN ENERGI SERTA DAYA SAING PEREKONOMIAN DAERAH DENGAN SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI PENGGERAK UTAMA</b>						
36	Peningkatan Disversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	354.349.400	354.349.400	0	100,00	DINAS PERTANIAN
37	Penanganan Kerawanan Pangan	39.877.000	35.967.000	3.910.000	90,19	DINAS PERTANIAN
38	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	750.480.000	743.540.000	6.940.000	99,08	DINAS PERTANIAN
39	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	438.728.032	427.528.000	11.200.032	97,45	DINAS PERTANIAN
40	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	233.041.000	232.374.100	666.900	99,71	DINAS PERTANIAN
41	Penyuluhan Pertanian	1.282.465.100	1.248.911.650	33.553.450	97,38	DINAS PERTANIAN

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN %</b>	<b>OPD</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
42	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.573.355.850	2.433.991.726	139.364.124	94,58	DINAS PERTANIAN
43	Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.575.354.925	2.499.481.798	75.873.127	97,05	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
44	Pengelolaan Perikanan Budidaya	474.048.106	447.190.904	26.857.202	94,33	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
45	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.566.607.900	8.507.572.450	59.035.450	99,31	DINAS PUPR
46	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.617.717.585	6.122.866.383	494.851.202	92,52	DINAS PUPR
47	Perekonomian dan Pembangunan	1.292.817.700	442.431.700	850.386.000	34,22	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN BAGIAN PEMBANGUNAN
48	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.090.245.600	1.921.580.722	168.664.878	91,93	DINAS PARIWISATA
49	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	132.851.625	99.829.340	33.022.285	75,14	DINAS PARIWISATA
50	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindung Hak Kekayaan Intelektual	49.556.000	44.921.500	4.634.500	90,65	DINAS PARIWISATA
51	Pemasaran Pariwisata	753.466.500	691.055.000	62.411.500	91,72	DINAS PARIWISATA
52	Pengembangan Kebudayaan	213.980.000	171.254.000	42.726.000	80,03	DINAS PKKO
53	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	554.654.500	532.200.000	22.454.500	95,95	DINAS PKKO

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	OPD
1	2	3	4	5	6	7
54	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	19.650.000	15.380.000	4.270.000	78,27	DINAS PMPTSP PERINDAG
55	Promosi Penanaman Modal	36.000.000	19.147.500	16.852.500	53,19	DINAS PMPTSP PERINDAG
56	Pelayanan Penanaman Modal	31.549.500	31.130.000	419.500	98,67	DINAS PMPTSP PERINDAG
57	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	388.654.000	230.518.600	158.135.400	59,31	DINAS PMPTSP PERINDAG
58	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	65.068.000	62.445.292	2.622.708	95,97	DINAS PMPTSP PERINDAG
59	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.024.150.800	791.539.925	232.610.875	77,29	DINAS PMPTSP PERINDAG
60	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	554.034.800	504.235.000	49.799.800	91,01	DINAS PMPTSP PERINDAG
61	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	133.099.000	70.190.164	62.908.836	52,74	DINAS PMPTSP PERINDAG
62	Perencanaan dan Pembangunan Industri	5.064.679.403	3.990.391.940	1.074.287.463	78,79	DINAS PMPTSP PERINDAG
<b>JUMLAH</b>		<b>36.310.482.326</b>	<b>32.672.024.094</b>	<b>3.638.458.232</b>	<b>89,98</b>	
<b>MISI III</b>						
<b>MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG BERSIH, EFISIEN DAN AKUNTABEL</b>						
63	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.246.937.200	2.979.303.994	267.633.206	91,76	BAGIAN PEMERINTAHANA, BAGIAN KESRA DAN BAGIAN HUKUM

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN %</b>	<b>OPD</b>
1	2	3	4	5	6	7
64	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	9.811.883.000	9.730.453.477	81.429.523	99,17	SETWAN
65	Program Kepegawaian Daerah	1.532.714.500	843.299.342	689.415.158	55,02	BKDPP
66	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.660.185.000	1.139.724.363	520.460.637	68,65	BKDPP
67	Penyelenggaraan Pengawasan	448.094.800	250.570.000	197.524.800	55,92	IRDA
68	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	179.591.000	135.771.200	43.819.800	75,60	IRDA
69	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.172.206.500	1.168.549.964	1.003.656.536	53,80	KECAMATAN
70	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	134.780.000	103.520.000	31.260.000	76,81	KECAMATAN
71	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	450.263.000	394.798.000	55.465.000	87,68	KECAMATAN
72	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	255.000.000	183.210.000	71.790.000	71,85	KECAMATAN
73	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	107.146.000	97.417.360	9.728.640	90,92	KANTOR KESBANGPOL
74	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Lembaga Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	568.805.000	50.870.000	517.935.000	8,94	KANTOR KESBANGPOL
75	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	18.440.000	6.840.000	11.600.000	37,09	KANTOR KESBANGPOL
76	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	14.190.000	8.010.000	6.180.000	56,45	KANTOR KESBANGPOL

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	OPD
1	2	3	4	5	6	7
77	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	426.121.000	315.243.720	110.877.280	73,98	KANTOR KESBANGPOL
78	Pengelolaan Arsip	200.265.000	147.822.400	52.442.600	73,81	DINAS PERPUSTAKAAN& KEARSIPAN
79	Penataan Desa	38.909.000	24.833.000	14.076.000	63,82	DINAS PMD
80	Administrasi Pemerintahan Desa	245.794.000	183.776.760	62.017.240	74,77	DINAS PMD
81	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	621.667.900	611.353.689	10.314.211	98,34	BAPPEDA
82	Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.438.000	10.349.078	88.922	99,15	BAPPEDA
83	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.224.818.000	1.200.852.097	23.965.903	98,04	BAPPEDA
84	Pengelolaan Keuangan Daerah	109.695.675.495	98.084.724.771	11.610.950.724	89,42	BAKEUDA
85	Pengelolaan Barang Milik Daerah	581.837.120	497.101.638	84.735.482	85,44	BAKEUDA
86	Pengelolaan Pendapatan Daerah	686.614.825	596.362.713	90.252.112	86,86	BAKEUDA
87	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.915.608.000	1.691.850.700	223.757.300	88,32	SATPOL PP
88	Pendaftaran Penduduk	764.882.450	587.909.900	176.972.550	76,86	DINAS DUKCAPIL
89	Pencatatan Sipil	189.791.000	189.791.000	0	100,00	DINAS DUKCAPIL
90	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	422.960.000	422.570.000	390.000	99,91	DINAS DUKCAPIL

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	OPD
1	2	3	4	5	6	7
91	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	133.192.000	117.318.000	15.874.000	88,08	SATPOL PP
92	Penanggulangan Bencana	1.732.713.750	1.449.968.759	282.744.991	83,68	BPBD
<b>JUMLAH</b>		<b>139.491.523.540</b>	<b>123.224.165.925</b>	<b>16.267.357.615</b>	<b>88,34</b>	
<b>MISI IV</b>						
<b>MENINGKATKAN AKSES MASYARAKAT MELALUI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL, PEMERATAAN WILAYAH SERTA MENJAMIN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>						
93	Pengembangan Pemukiman	482.320.000	300.000.000	182.320.000	62,20	DINAS PUPR
94	Penataan Bangunan Gedung	19.344.771.821	17.342.059.962	2.002.711.859	89,65	DINAS PUPR
95	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100.000.000	99.800.000	200.000	99,80	DINAS PUPR
96	Penyelenggaraan Jalan	89.439.080.202	81.096.742.281	8.342.337.921	90,67	DINAS PUPR
97	Penyelenggaraan Penataan Ruang	164.810.000	98.850.000	65.960.000	59,98	DINAS PUPR
98	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	216.020.000	133.551.920	82.468.080	61,82	DINAS PUPR
99	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.553.760.000	1.501.450.000	52.310.000	96,63	DINAS PUPR
100	Pengembangan Perumahan	245.010.000	245.010.000		100,00	DINAS PRKP
101	Kawasan Permukiman	3.516.895.960	3.511.900.900	4.995.060	99,86	DINAS PRKP
102	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	60.500.000	60.197.300	302.700	99,50	DINAS PRKP
103	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	652.029.300	645.488.860	6.540.440	99,00	DISHUB
104	Pengelolaan Pelayaran	132.820.000	132.115.050	704.950	99,47	DISHUB

NO	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %	OPD
1	2	3	4	5	6	7
105	Informasi dan Komunikasi Publik	438.034.700	402.946.638	35.088.062	91,99	DISKOMINFO
106	Aplikasi Informatika	1.697.836.849	1.617.568.314	80.268.535	95,27	DISKOMINFO
107	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	155.427.000	153.497.700	1.929.300	98,76	DISKOMINFO
108	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	65.034.000	62.819.060	2.214.940	96,59	DISKOMINFO
109	Perencanaan Lingkungan Hidup	175.160.000	175.160.000	0	100,00	DLH
110	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Hidup	24.866.000	24.730.000	136.000	99,45	DLH
111	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	19.736.000	19.152.000	584.000	97,04	DLH
112	Pengelolaan Persampahan	14.897.000	14.344.200	552.800	96,29	DLH
<b>JUMLAH</b>		<b>118.499.008.832</b>	<b>107.637.384.185</b>	<b>10.861.624.647</b>	<b>90,83</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>404.490.413.688</b>	<b>364.694.837.394</b>	<b>39.795.576.294</b>	<b>90,16</b>	

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Rincian pembiayaan tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.35** Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
	(Rp)	(Rp)		(Rp)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>70.898.614.201,28</b>	<b>70.898.614.201,28</b>	<b>100,00</b>	<b>130.467.756.957,88</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	60.995.254.428,59	60.995.254.428,59	100,00	97.982.962.339,82
Pencairan Dana Cadangan	9.903.359.772,69	9.903.359.772,69	100,00	32.484.794.618,06
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>33.770.000.000,00</b>	<b>7.852.718.003,76</b>	<b>23,25</b>	<b>9.925.954.729,02</b>
Pembentukan Dana Cadangan	26.770.000.000,00	852.718.003,76	3,19	2.925.954.729,02
Penyertaan Modal	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>37.128.614.201,28</b>	<b>63.045.896.197,52</b>	<b>169,80</b>	<b>120.541.802.228,86</b>

- a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Penerimaan pembiayaan direalisasikan sebesar Rp70.898.614.201,28 dari anggaran sebesar Rp70.898.614.201,28 atau 100,00%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp59.569.142.756,60 atau 45,66% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp130.467.756.957,88.
- b. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pengeluaran pembiayaan direalisasikan sebesar Rp7.852.718.003,76 dari anggaran sebesar Rp33.770.000.000,00 atau 23,25%. Jumlah tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp2.073.236.725,26 atau 20,89% dari realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp9.925.954.729,02.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesian Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan pendekatan dalam menghitung capaian kinerja lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada dokumen RPJMD.

Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran atas visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam implementasi program, diperlukan komitmen dari semua unsur pemerintah (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat dan pelaku pasar untuk saling bersinergi mewujudkan Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Hasil analisis akuntabilitas kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Sabu Raijua tahun 2022 sebanyak 29 indikator, terdapat 19 Indikator (65,52%) yang memiliki tingkat pencapaian berkategori **SANGAT TINGGI**; 5 Indikator (17,24%) memiliki tingkat pencapaian berkategori **TINGGI**; 3 Indikator (10,34%) memiliki tingkat pencapaian berkategori **SEDANG**; dan 2 Indikator (6,90%) memiliki tingkat pencapaian berkategori **SANGAT RENDAH**. sedangkan indikator kinerja yang pencapaiannya berkategori **RENDAH** tidak ada.

Secara keseluruhan dari 4 tujuan dan 13 sasaran dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang dalam pengukuran kinerjanya dituangkan dalam 29 indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Bab VIII Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang RPJMD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2021-2026, berdasarkan hasil analisis kinerja, rata-rata Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 mencapai **106,57** persen atau terkategori **SANGAT TINGGI**. Capaian Rata-rata yang sangat tinggi ini tidak bermakna seluruh target telah tercapai di atas target yang ditetapkan, namun lebih dipengaruhi oleh beberapa target dari indikator kinerja utama yang capaiannya jauh melampaui target yang ditetapkan atau diatas 100 persen yang memepengaruhi capaian target kinerja secara akumulatif.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022, ini dapat di simpulkan bahwa secara umum pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signiikan atas sasaran-sasaran strategis yang tela ditetapkan untuk tahun 2022. Sasaran startegis tersebut disusun dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sabu Raijua 2021-2026. Untuk itu setiap Perangkat

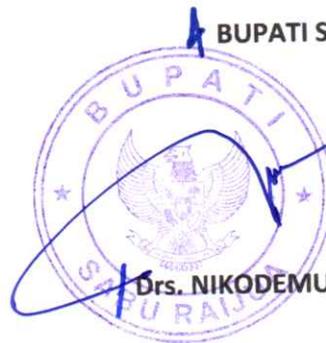
Daerah perlu memperhatikan kaidah-kaidah dalam melaksanakan evaluasi kinerja selanjutnya yaitu sebagai berikut :

1. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai di harapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu terus direncanakan secara baik untuk tahun anggaran berikutnya dan sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak;
2. Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik wajib melandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis dengan ditandai dengan semakin menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi –instansi terkait untuk lebih berpartisipasi aktif dalam mendorong proses penyusunan program/kegiatan yang transparan serta mengawasi tahapan penyusunan dan implementasi program tersebut. Stakeholders yang kuat akan mendorong Tim Kerja yang solid dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan.
4. Mengupayakan peningkatan kesadaran bersama secara lintas sektor dan pengembangan kemampuan berbagai pihak untuk merestorasi dan memelihara keberlanjutan program kegiatan yang lebih inovatif serta meningkatkan kinerja aparat birokrasi yang transparan, akuntabel dan berorientasi pelayanan publik demi pengembangan tata kelola sumber daya secara adil tanpa mengabaikan efektifitas dan efisiensi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 ini disusun untuk menjadi bahan evaluasi kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya aparatur sipil negara dalam kerangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang lebih produktif, efektif dan efisien kedepannya, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dalam manajemen kinerja dan keuangan di tahun mendatang.

Seba, 24) Maret 2023

BUPATI SABU RAIJUA,



Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si

## Lampiran 1

**DARTAR PENGHARGAAN**

<b>NO</b>	<b>JUDUL PENGHARGAAN</b>	<b>TAHUN DITERIMA</b>	<b>DARI</b>
1.	Penghargaan Univesal Health Coverage (UCH) Award 2023	2023	Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2.	Kepala Daerah Penggerak Revolusi Dunia Kesehatan	2022	Perkumpulan/Asosiasi Pemda Kepulauan-Kepulauan Pesisir Seluruh Indonesia
3.	BKN Award 2022 – Peringkat 3 dalam Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian	2022	Badan Kepegawaian Nasional
4.	Juara II Lomba JUPEN – Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-39 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	2019	PEM PROV NTT
5.	Juara III Lomba Stand Terbaik - Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38 dan Pameran Pangan Lokal Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur	2018	PEM PROV NTT
6.	Pemilihan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Terbaik Provinsi NTT – Peringkat 2	2018	PEM PROV NTT
7.	Kepatuhan LHKPN 100%	2017	Komisi Pemberantasan Korupsi

## Lampiran 2

## DAFTAR INOVASI

NO	NAMA INOVASI	TAHUN	OPD
1.	<p>Moro Huri Minawodo (Tim Pelayanan Adminduk Yang Bergerak Cepat dan Gesit ke Semua Sektor)</p> <p>Moro Huri Minawodo merupakan inovasi dimana masyarakat langsung mendapatkan akta kelahiran bayi setelah melahirkan baik melahirkan di Sabu maupun di luar Sabu.</p>	2020	DINAS DUKCAPIL
2.	<p>Pelayanan Angkutan Gratis Untuk Anak Sekolah yang Terjamin Aman, Ramah dan Kooperatif (PANGKAS JARAK)</p> <p>Dinas Perhubungan menyiapkan 5 bus pelajar di 5 kecamatan yang dikhususkan kepada pelajar tanpa dipungut biaya.</p>	2020	DINAS PERHUBUNGAN
3.	<p>Digital Smart Book "Mari Pintar Berkoperasi</p> <p>Membuat buku digital dimana berisi informasi-informasi dasar mengenai perkoperasian dan informasi bagaimana mendirikan koperasi.</p>	2021	DINAS NAKERTRANS
4.	<p>Kader Peduli TBC</p> <p>Pengkaderisian masyarakat terhadap penanganan TBC dengan menggunakan pendekatan keluarga.</p>	2020	DINAS KESEHATAN, PPKB
5.	<p>HATI SARAI (Hela'u Hari Tu le Di/Semua Dilakukan Bersama Untuk Kebaikan Kita di Sabu Raijua)</p>	2020	DINAS KESEHATAN, PPKB

6.	GTIB (Gerakan Temukan Ibu Hamil Baru)	2020	DINAS KESEHATAN, PPKB
7.	WEBSITE "SAHABAT KOPERASI"	2021	DINAS NAKERTRANS
8.	<p>FPI (FORUM PEDULI IMUNISASI)</p> <p>Mewakili Sabu Raijua ke Kompetisi Provinsi (Masuk 40 Besar).</p> <p>FPI ini merupakan Upaya Kesehatanan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang tumbuh dan berkembang di Puskemas Eilogo, Kecamatan Liae. FPI bertujuan untuk meningkatkan capaian Desa UCI menjadi 100%.</p>	2017	DINAS KESEHATAN, PPKB
9.	<p>Satu Rumah Tangga Satu Produk</p> <p>Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengubah bahan terpilih menjadi barang bernilai tinggi dengan harapan tiap rumah dapat menghasilkan satu produk utama yang kompetitif dan dapat bersaing ditingkat global namun tetap memiliki khas daerah.</p>	2021	DINAS PMPTSP PERINDAG